

Rancangan
Teknokratik
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Lampung Barat
2025-2029





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-2
1.4. Maksud dan Tujuan	I-3
1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.2 Demografi	II-78
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-79
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-79
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-82
2.3. Aspek Daya Saing	II-96
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-96
2.3.2 Daya Saing SDM	II-97
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-103
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-113
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-117
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	III-1
3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan ...	III-7
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan	IV-1
4.2. Isu Strategis Daerah	IV-3
BAB V REKOMENDASI	V-1
5.1. Permasalahan dan Isu strategis.....	V-1
5.2. Visi, Misi, Arah kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD 2025-2045.....	V-5
5.3. Rangkaian kinerja dan Rangkaian Kerja RPJMD 2025-2029.....	V-24
5.4. Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW	V-42
BAB VI PENUTUP	VI-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024 hal : Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2045, maka seluruh Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional Tahun 2024. Salah satu wujud dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Adanya Rancangan Teknokratik dimaksud, menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum

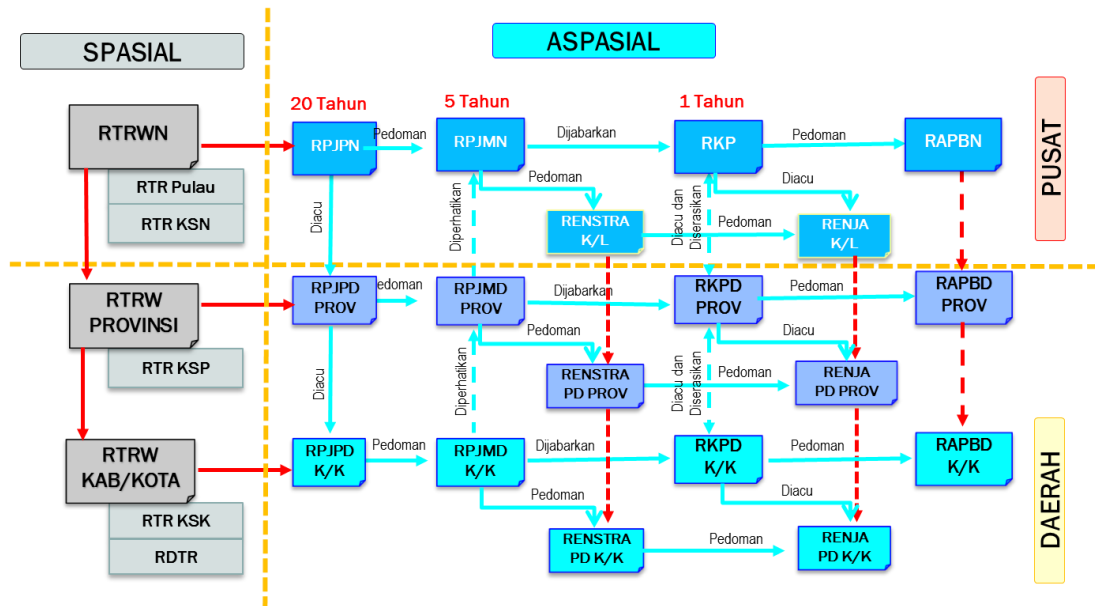
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Dalam perkembangannya, dokumen perencanaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah terdiri dari beberapa dokumen yang saling berhubungan dan sebagian besar dipertimbangkan berdasarkan periode pembangunan.



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dimaksudkan untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- Menyediakan data Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu dasar penentuan permasalahan dan isu strategis daerah.
- Menyediakan perkiraan kemampuan keuangan daerah.
- Menyediakan rekomendasi kebijakan sebagai salah satu acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah

1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1 Geografi
 - 2.1.2 Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3. Aspek Daya Saing
 - 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
 - 2.3.2 Daya Saing SDM
 - 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
 - 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir
- 3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan
- 4.2. Isu Strategis Daerah

BAB V REKOMENDASI

- 5.1. Permasalahan dan Isu strategis
- 5.2. Visi, Misi, Arah kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD 2025-2029
- 5.3. Rangkaian kinerja dan Rangkaian Kerja RPJMD 2025-2029
- 5.4. Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

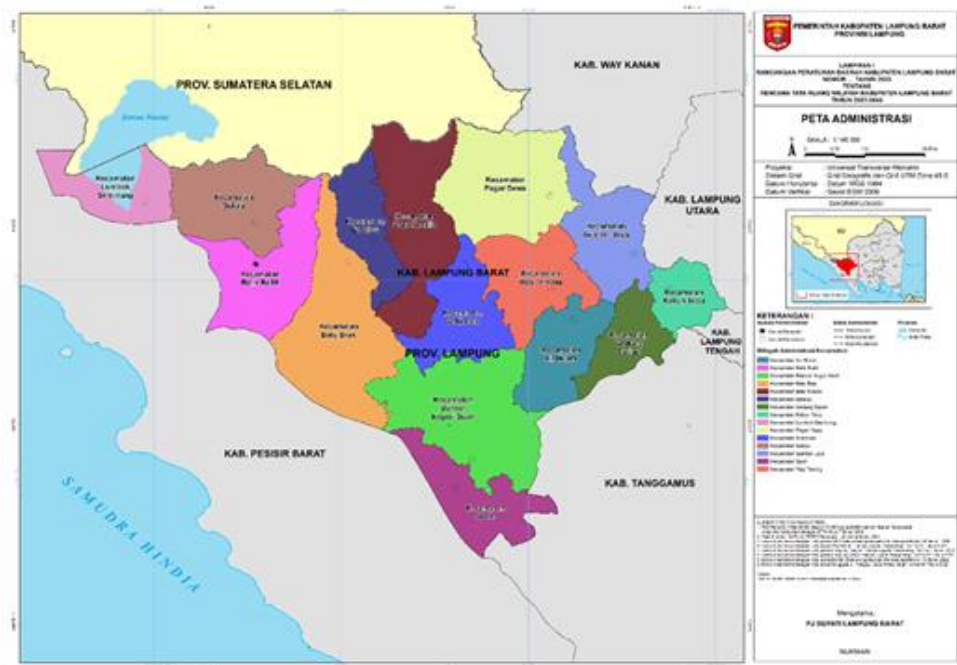
A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 September 1991.

Pada tahun 2012, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran dengan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Kabupaten Lampung Barat paska pemekaran, secara geografis terletak pada koordinat 04°51'26" – 05°20'26" Lintang Selatan (LS) dan 103°50'13" – 104°33'49" Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah ± 210.799,62 Ha, atau **6,28** % dari luas administrasi Propinsi Lampung.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Barat



Sumber : Lampiran I Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak ($\pm$ 24.270,41 Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu ($\pm$ 6.154,89 Ha).

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Perkecamatan

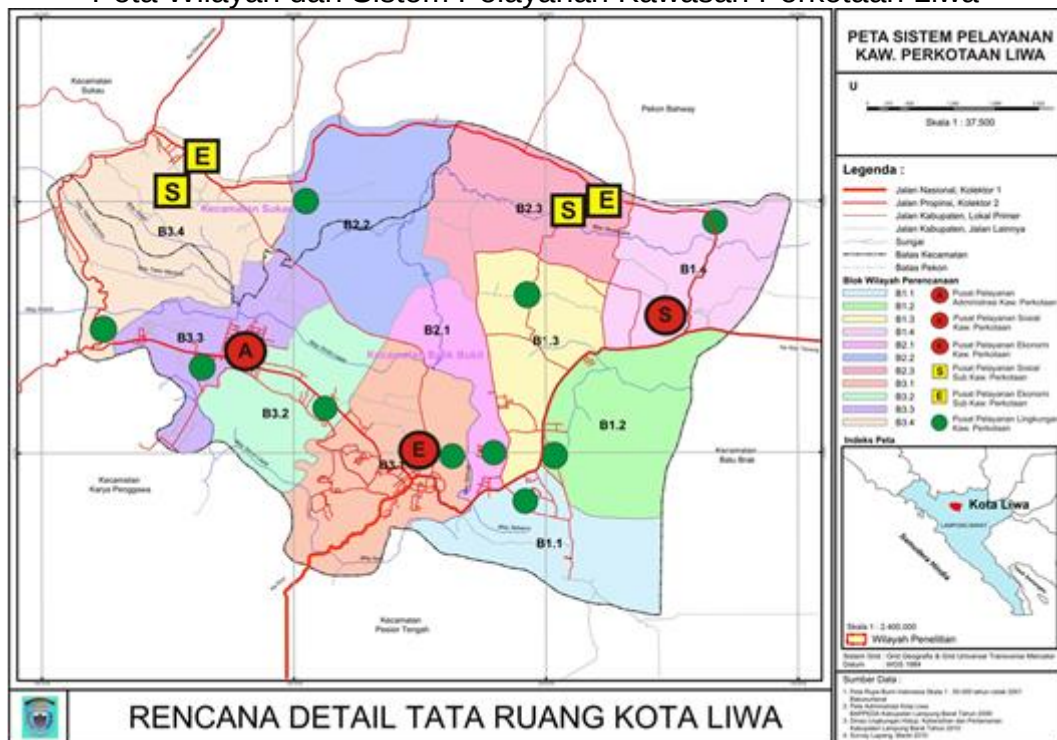
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Juml. Kelurahan	Ibu Kota
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	9.390,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Sumber Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Sri Mulyo
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Semarang Jaya
Lampung Barat		210.799,62	131	5	Liwa

Sumber: Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Ibukota Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Liwa. Dalam Struktur Ruang, Liwa difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa mencakup 12 pekon dan kelurahan yang meliputi 8 pekon dan 2 kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 (dua) pekon di Kecamatan Sukau, yaitu sebagian pekon Tanjung Raya dan Hanakau. Luas wilayah kawasan perkotaan Liwa ± **5.008,31 Ha.**

Gambar 2.2.
Peta Wilayah dan Sistem Pelayanan Kawasan Perkotaan Liwa



Sumber: Konsinyasi RDTR Liwa, Tahun 2013

Pada masa pemerintahan Belanda, Liwa merupakan bagian dari wilayah administrasi yang disebut sebagai Afdeeling Krui. Liwa berbentuk *margahoofd* atau pesirah. Pesirah merupakan kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda khususnya pada wilayah-wilayah yang disebut sebagai “Zuid Sumatera” (Sumatera bagian selatan), yang meliputi keresidenan Bengkulu, Palembang, dan Lampung.

Afdeeling Krui sebelum menjadi bagian dari Keresidenan Lampung, merupakan bagian dari Keresidenan Bengkulu. dengan pusat pemerintahan berada di Krui. Pesirah Liwa dibentuk oleh Pemerintah

Belanda pada tahun 1861, dengan ibu kota pesirah berada di Negeri Agung (sekarang menjadi pekon Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit).

Merujuk pada Peta *Overzichtskaarts Bevolking Residentie Benkoelen skala 1:500.000 tahun 1930*, di wilayah administrasi Afdeeling Krui terbagi menjadi 23 margahoofd (pesirah) dimana 7 (tujuh) diantaranya berada dalam Kabupaten Lampung Barat saat ini, yaitu **Pesirah Sukau** dengan jumlah penduduk 3.468 kk, **Pesirah Liwa** (6.883 kk), **Pesirah Kembahang** (1.115 kk), **Pesirah Buay Kenyangan** (2.440 kk), **Pesirah Suwuh** (439 kk), **Pesirah Buay Belunguh** (4.140 kk), dan **Pesirah Way Tenong** (279 kk). Kini ketujuh pesirah tersebut, telah berkembang menjadi 15 Kecamatan.

Gambar 2.3.

Peta Administrasi Afdeeling Krui tahun 1910



Sumber: Peta Afdeeling Krui, Keresidenan Bengkulu, Skala 1:200.000 tahun 1910, (Perpustakaan Digital Universitas Leiden)

Pada tanggal 22 Agustus 1934, Afdeeling Krui berubah menjadi Onder Afdeeling (setingkat kewedanaan), yang dipimpin oleh seorang Controleur (Kontrolir), dan ibukota onderafdeeling dipindahkan dari Krui ke Negara Batin (Liwa).

Peninggalan sejarah pemerintahan onderafdeeling Krui masih dapat dilihat dari bangunan rumah dan kantor Controleur (Tangsi) yang berada di kelurahan Pasar Liwa, yang dahulunya bernama Negara Batin. Kedua bangunan bernilai cagar budaya tersebut, masih tetap dilestarikan, sebagai Wisma Sindalapai untuk eks rumah Kontrolir dan Kantor Satlantas Balik Bukit untuk eks bangunan Tangsi (Penjara).

Kedua bangunan bernilai cagar budaya ini dapat dijadikan *landmark* yang memperkuat fungsi Kota Liwa sebagai kota hijau (*green city*) sekaligus kota budaya (Kota Pusaka).

Guna memperkuat kedudukan dan akses menuju Liwa sebagai pusat pemerintahan onderafdeeling, pada tanggal 30 Maret 1937, Pemerintah Belanda meresmikan pembukaan jalan penghubung antara ibukota pesirah Way Tenong di Mutar Alam dengan Bukit Kemuning. Sejak saat itu terbuka akses antara keresidenan Bengkulu dengan afdeeling Kotabumi (Keresidenan Lampung). Jalan akses dengan status "*klasse autowagen*" (Jalan Raya), merupakan cikal bakal jalan nasional yang kini bernama ruas Liwa – Padang Tambak – Bukit Kemuning.

Gambar 2.4.

Peresmian Pembukaan Jalan Bukit Kemuning – Mutar Alam (Way Tenong), pada tanggal 30 Maret 1937



Sumber: Tropen Museum

Melihat posisi geografisnya, sejak masa pemerintahan Belanda hingga otonomi daerah, Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis di jalur barat pulau Sumatera. Kabupaten Lampung Barat berperan sebagai penghubung (*feeder*) antara Propinsi Lampung dengan Propinsi Bengkulu, dan juga wilayah-wilayah di bagian barat Propinsi Sumatera Selatan, yang biasa disebut sebagai daerah uluhan musi

(Hulu sungai Musi), seperti Kabupaten OKU Selatan, OKU, dan OKU Timur.

Lampung Barat berperan sebagai ***interkoneksi di Koridor Barat Propinsi Lampung yang difungsikan sebagai Pertumbuhan Wilayah III dengan nilai geostrategis pendukung kepentingan Konservasi dan Pariwisata.***

B. Geomorfologi

a) Topografi

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah dataran tinggi dan secara topografi wilayahnya dibagi menjadi tiga jenis topografi, yaitu :

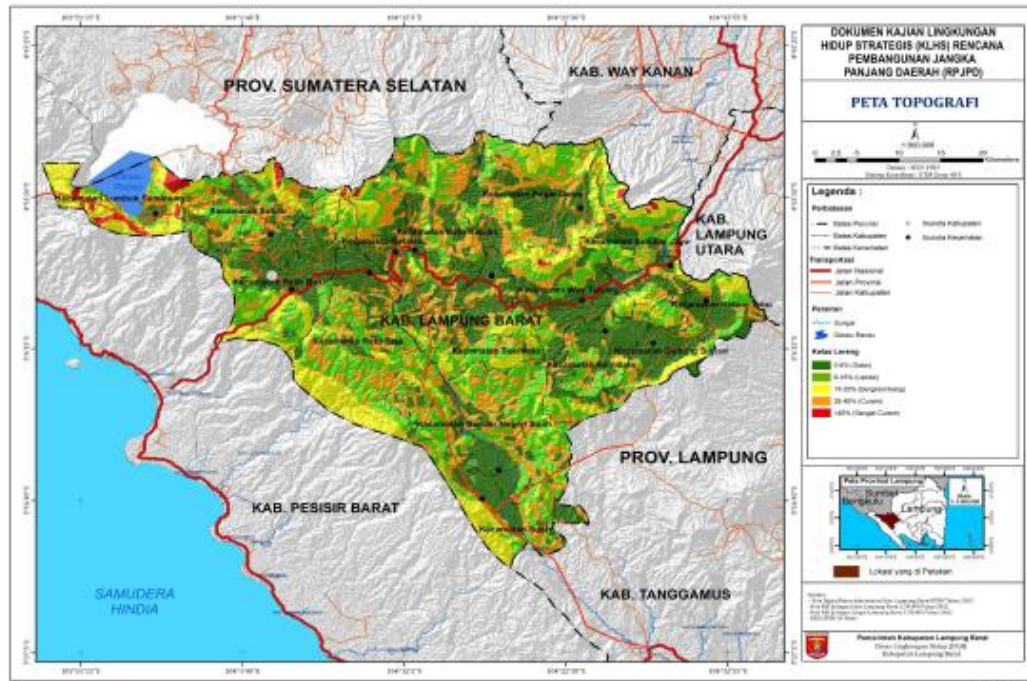
- (1) Daerah dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Luas dataran rendah mencapai 15% dari luas wilayah Lampung Barat. Lampung Barat memiliki 4 daerah depresi atau cekungan, yaitu depresi Gedung Surian, depresi Ranau, depresi Suoh, dan depresi Rowo Rejo. Depresi ini tidak hanya menyediakan lahan yang subur, namun juga berpotensi sebagai daerah genangan banjir.
- (2) Daerah dataran menengah dan berbukit merupakan daerah dengan ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Luas daerah dataran menengah dan berbukit mencapai 37% dari luas wilayah Lampung Barat..
- (3) Daerah dataran tinggi dan pegunungan merupakan daerah dengan ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Luas daerah dataran menengah dan pegunungan mencapai 47% dari luas wilayah Lampung Barat.

Aktivitas sesar Sumatera yang berlangsung jutaan tahun yang lalu, menyajikan bentang alam yang unik. Sebagian besar wilayah administrasi Lampung Barat merupakan dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Di sisi Barat Laut hingga Barat daya membentang pegunungan Bukit Barisan Selatan, yang puncaknya terdiri dari Gunung Pugung (1.808 mdpl), Bukit Palalawan (1.753 mdpl), dan Bukit Tababayan (1.413 mdpl).

Bagian Utara hingga Timur, terdiri dari gunung Seminung (1.804 mdpl), bukit Kawit Kerambai (1.777 mdpl), Kukusan (1.779 mdpl), Pesagi (2.127 mdpl), bukit Penetoh (1.166 m), bukit Siguguk (1.779 mdpl), gunung Ulumajus (1.789 mdpl), Bukit Subhanallah (1.623 mdpl), Bukit Rgis (1.623 mdpl).

Bagian Tenggara hingga Selatan membentang Gunung Sekincau (1.718 mdpl), gunung Labuan Balak (1.313 mdpl), Bukit Bawang Bakung (1.104 mdpl), Bukit Sipulang (1.315 mdpl), Bukit Limau Kunci (1690 mdpl), Bukit Penataan (1.688 mdpl).

Gambar 2.5.
Peta Topografi Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Album Peta KLHS RPJPD Lampung Barat 2025-2045

Berdasarkan peta kelerengan skala 1:50.000, Lampung Barat memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi, terbagi menjadi 5 (lima) kelas kelerengan, sebagai berikut:

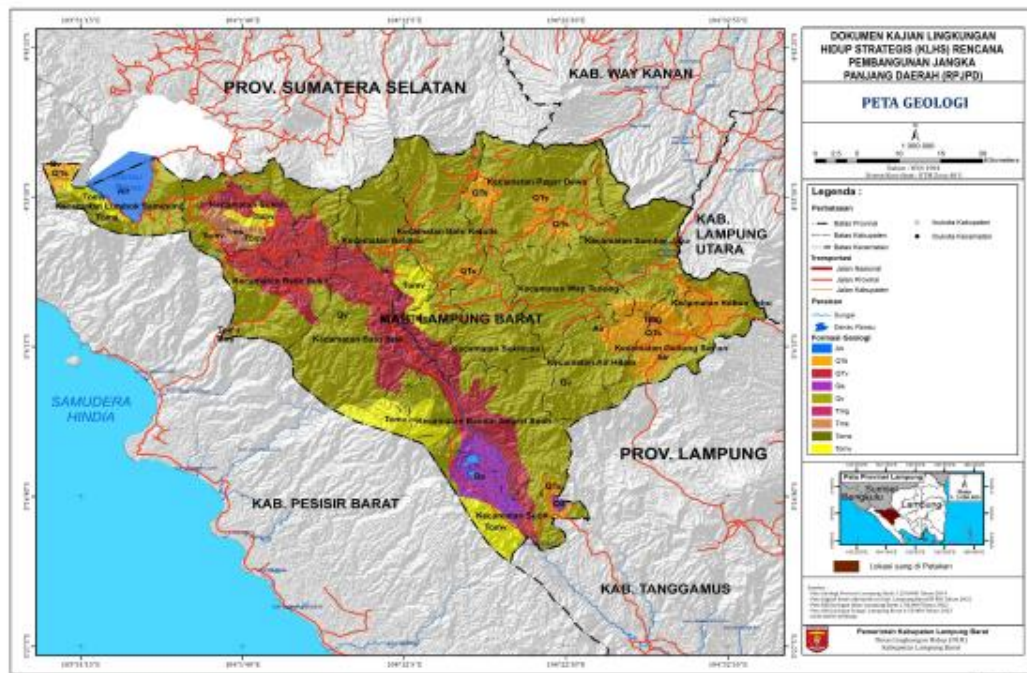
- (1) **Kelas Kelerengan A (0–8%)**, seluas 35,01% dari total luas wilayah administrasi Lampung Barat. Dominan tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Suoh, BNS, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.
- (2) **Kelas Kelerengan B (8%-15%)**, seluas 19,14% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- (3) **Kelas Kelerengan C (15%-25%)**, seluas 20,79% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- (4) **Kelas Kelerengan D (25%-45%)**, seluas 19,80% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar dominan di bagian utara, barat, dan Barat wilayah administrasi Lampung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya.
- (5) **Kelas Kelerengan E (>45%)**, mencapai luasan 5,26% dari luas wilayah administrasi Lampung Barat, sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Barat.

b) Geologi

Karakteristik bentukan alam (Geomorfologi) Kabupaten Lampung Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 grup landform (bentang alam) utama, yaitu: Fluvial (F), Struktural (S), dan Vulkanik (V).

- (1) **Grup Fluvial.** Bentuk lahan ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil proses fluvial di kaki lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 200 s/d 250 mdpl di sepanjang cekungan pada aliran sungai Way Semaka dan Way Besai Hulu pada ketinggian 830 s/d 910 mdpl. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya cekungan fluvial atau rawa belakang, kipas alluvial dan kipas alluvial aktif. Struktur geologi terdiri dari Formasi Alluvium (Qa). Relatif subur untuk pengembangan pertanian lahan basah. Penyebaran di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam, dan Gedungsurian.
- (2) **Grup Struktural.** Bentuk lahan struktural menunjukkan ciri dominan dari proses endogen (pengangkatan dan perlipatan) lapisan lempeng bumi. Bentuk lahan ini terdiri dari dataran bergelombang sampai berbukit dan gugusan pegunungan memanjang diselingi lembahlembah dengan sistem aliran sungai terkontrol oleh kondisi struktur batuan, serta bidang patahan dan garis patahan. Bentuk lahan ini membentuk deretan perbukitan Bukit Barisan Barat, yang memanjang dari Kecamatan Lumbok Seminung hingga kecamatan Suoh. Struktur geologi terdiri dari Formasi Ranau (QTr), Formasi Hulu Simpang (Tomh), Formasi Bal (Tmba), Formasi Seblat (Toms), Formasi batuan gunung api quarter (Qv). Meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak, dan Belalau.
- (3) **Grup Vulkanik.** Grup vulkanik terbentuk karena aktivitas vulkan/gunung berapi. Grup ini dicirikan oleh bentukan kerucut vulkan, aliran lahar atau wilayah yang merupakan akumulasi bahan vulkanik. Secara umum bentuk lahan ini dapat dibedakan berdasarkan litologi induknya yaitu dari jenis andesitis dan basal yang terletak pada ketinggian 700 s/d 1.150 mdpl. Grup Vulkanik terdapat di Sebelah Utara hingga Timur Kabupaten Lampung Barat. Struktur geologi terdiri dari formasi Sekincau Vulcanics (Qhvs) dan sedikit Formasi Granite (Tmgr) yang tersebar mulai dari Gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung - Gunung Pesagi (Kec Balik Bukit – Belalau – Batu Ketulis), Gunung Sekincau (Sekincau, Way Tenong) hingga Kecamatan Pagar Dewa dan Sumber Jaya, serta formasi Alluvium (Qa) yang tersebar di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.

Gambar 2.6.
Peta Geologi Lampung Barat



Sumber: Album Peta KLHS RPJPD Lampung Barat 2025-2045

Umumnya tanah yang terbentuk dari proses vulkanik mempunyai kesuburan tinggi karena pelapukan batuan vulkanik menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah cukup bervariasi, seperti Podsolik (Tropudults, Dystropepts, Humitropepts), Latosol (Eutropepts), andosol (Dystrandepts), Aluvial (Trapaquepts, Tropofluvents), Gleisol (Hydraquents, Sulfaquents), dan Regosol (Tropopsamments). Jenis tanah Andosol seperti yang ada di kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Belalau, Batu Brak, dan Balik Bukit sesuai untuk budidaya tanaman kopi robusta dan hortikultura (wortel, kol, tomat, cabe). Jenis tanah aluvial sesuai untuk budidaya tanaman padi sawah.

c) Potensi Kandungan

(1) Mineral Logam dan Non Logam.

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Lampung Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, lempung, endapan alluvium, tufa masam, dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka urusan dan kewenangan perusahaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Berdasarkan Keputusan

Menteri ESDM No.: 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Propinsi Lampung, pada lampiran keputusan, disebutkan bahwa wilayah pertambangan di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Di dalam keputusan tersebut, Wilayah Pertambangan Propinsi Lampung, belum mengakomodir Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga perusahaan pertambangan rakyat akan selalu menyumbang permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam kedepannya baik dalam hal pemanfaatan dan pengendalian ruang (perizinan), maupun teknis pengelolaan lingkungan hidup paska penambangan (reklamasi dan rehabilitasi lahan).

(2) Geothermal

Posisi Lampung Barat yang berada pada jalur patahan yang memiliki resiko tinggi terhadap kebencanaan geologi, mengandung pula potensi geologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan panas bumi (geothermal). Lampung Barat memiliki lima kawasan potensi geothermal, yaitu:

- a) **Panas bumi danau Ranau** telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1551.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011, dengan total luas ± 8.561 Ha. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung), dan Kabupaten OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan). Wilayah WKP yang berada di Kabupaten Lampung Barat seluas ± 6.157 Ha (72%) dan sekitar ± 2.404 Ha (28%) berada di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Potensi terduga panas bumi diperkirakan mencapai 210 MWe, dengan rencana pengembangan berupa 1 unit PLTP berkapasitas 40 MWe. Perusahaan Panas Bumi danau Ranau ditugaskan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1864 K/30/MEM/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan jangka waktu penugasan selama 37 tahun.
- b) **Panas bumi Sekincau** termasuk sistem panas bumi vulkanik dan berada dalam sistem CAT Kota Agung, memiliki potensi energi panas bumi yang paling tinggi dan paling banyak sebaran titik lokasi manifestasi panas bumi, dengan perkiraan potensi ± 378 MWe – 485 MWe. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai PLTP dengan Kapasitas 2 x 110 MWe. Manifestasi panas bumi sekincau meliputi kaldera Sekincau, Purunan, Bacingot, Belirang, Suoh-hantatai, Heling, Way Peros, Labuhan Balak-Way

Kunjir, Way Ngingi-Way Haru. Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Luas wilayah Panas Bumi Sekincau $\pm$ 32.970 Ha dimana sekitar 30.500 Ha berada dalam Kawasan TNBBS. Penugasan Panas Bumi Sekincau diberikan kepada PT Star Energy Geothermal Sekincau Suoh (SGSS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1870 K/30/MEM/2018, tanggal 21 Juli 2018.

- c) **Panas Bumi Fajar Bulan**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigit). Perkiraan potensi 150-250 MWe.
- d) **Panas Bumi Way Umpu**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.
- e) **Panas Bumi Kukusan**, belum tertuang dalam buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (terbitan Kementerian ESDM), akan tetapi tertera dalam peta geologi Belanda tahun 1933. Manifestasi panas bumi berada di sungai Way Penyelan Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan kisaran suhu 35°C – 40°C . Hulu dari sungai ini berada di Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara dan termasuk dalam CAT Ranau dan sistem panas bumi non vulkanik. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan potensi energi panas bumi yang dapat dihasilkan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2019 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam perda ini, pemanfaatan langsung panas bumi meliputi: a) kegiatan Pariwisata seperti perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan. b) Kegiatan Agrobisnis seperti pengeringan teh, kopi, kopra, jagung, dan green house, c) Kegiatan Industri seperti pengolahan kayu, kulit, dan rotan, d) kegiatan lainnya yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

C. Hidrologi

Geografis Lampung Barat merupakan dataran tinggi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas siklus hidrologi bagi Provinsi Lampung maupun Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pembentukan hujan sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang membentuk system daerah

aliran sungai yang bermuara hingga ke pantai Timur dan Selatan di Propinsi Lampung.

C.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dengan lebih dari 170 anak sungai.

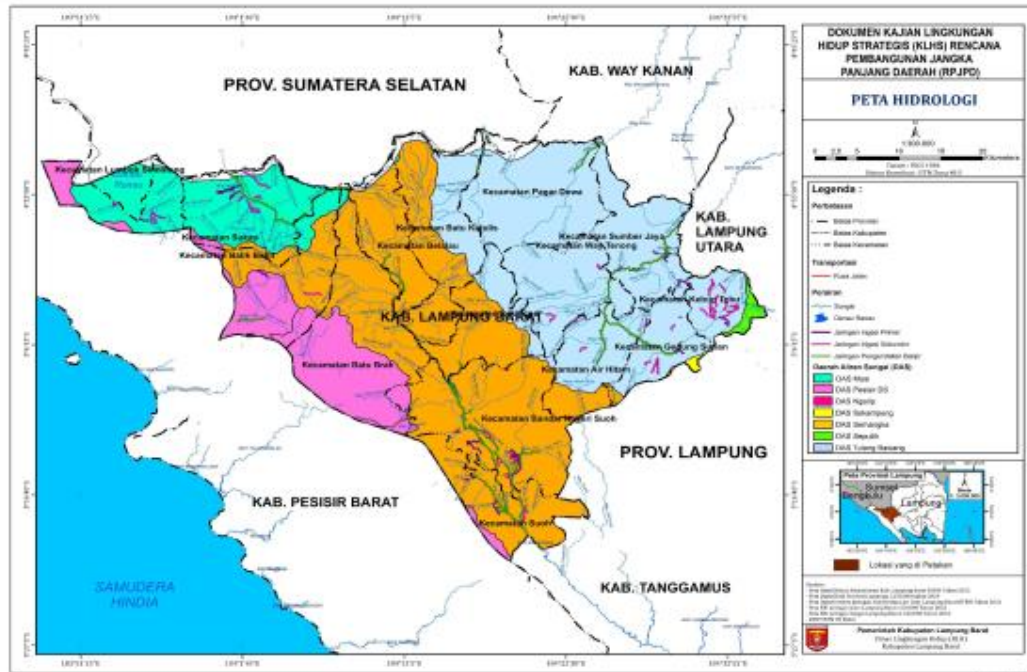
Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi.

DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang.

Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya. DAS Tulang Bawang masuk sebagai DAS Prioritas Nasional, sebagai pendukung ketahanan pangan dan energi Nasional.

DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5$ km².

Gambar 2.7.
Peta DAS Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Lampung Barat

C.2. Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri tiga sungai besar yaitu Way Besay, Way Semangka, dan Way Warkuk serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau.

Panjang sungai Way Semaka $\pm 95,47$ km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Rubok, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Giham, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir.

Danau Ranau merupakan outlet dari sub DAS Komering, yang merupakan bagian dari DAS Musi. Luas sub DAS Komering $\pm 407.898,78$ Ha, sedangkan luas Outlet Danau Ranau mencapai ± 508 km² (50.800 Ha) yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas perairan Danau Ranau mencapai $\pm 12.623,52$ Ha dan luas daratan sebagai daerah tangkapan air (catchment area) mencapai $\pm 38.176,48$ Ha, dengan panjang total garis sempadan danau mencapai: $\pm 64,7$ km. Perairan danau Ranau seluas $\pm 2.792,19$ Ha (22,12%) berada di Kecamatan Lumbok Seminung, dengan panjang garis sempadan danau $\pm 23,6$ km.

Gambar 2.8.
Danau-danau yang ada di Kabupaten Lampung Barat



Keterangan: *Kiri:* danau Ranau dan gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung, *Kanan:* danau Lebar dan danau Minyak di Kecamatan Suoh.

Berdasarkan data dari **BBWS Wilayah Sungai Sumatera VIII**, jumlah sungai yang bermuara di danau Ranau (inlet) sebanyak ± 36 sungai dan 1 sungai sebagai outlet yaitu sungai Silabung. Inlet terpanjang adalah sungai Way Warkuk dengan panjang mencapai ± 26 km. Danau Ranau termasuk danau prioritas nasional Tahap II.

Selain Danau Ranau, Lampung Barat juga memiliki 4 danau kecil yang terletak di Kecamatan Suoh yaitu Danau Lebar (67,6 Ha), Danau Asam (121,1 Ha), Danau Minyak (10 Ha), dan Danau Belibis (2 Ha).

Keempat danau tersebut berada pada zona Pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai Geopark, karena keunikan proses geologinya, dimana keempat danau tersebut terbentuk sebagai akibat proses erupsi freatik (semi vulkanik) dari salah satu kaldera di komplek kaldera pematang bata pada tanggal 10 Juli 1933. Letusan tersebut dipicu oleh kejadian gempa yang terjadi sebelumnya pada tanggal 25 Juni 1933.

C.3. Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT menyediakan sumber daya air yang berpotensi sebagai bahan baku hydrothermal pada sistem panas bumi. Lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2016 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, memetakan wilayah hidrogeologis Kabupaten Lampung Barat kedalam 3 (tiga) CAT, yaitu:

- a) **CAT Ranau** dengan luas ± 1.501 km², CAT Ranau meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Sukau, dan sebagian Kecamatan Balik Bukit.
- b) **CAT Kota Agung** dengan luas ± 1.236 km², CAT Kota Agung meliputi Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.

- c) **CAT Metro-Kotabumi** dengan luas $\pm 21.640 \text{ km}^2$. CAT Metro-Kotabumi meliputi Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Sumber Jaya.

C.4. Potensi Kandungan

Keberadaan sungai, danau, dan cekungan air tanah, menyediakan pasokan sumber daya air yang melimpah. Ketersediaan air baku yang melimpah akan menjamin, perwujudan ketahanan dan keamanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung perwujudan kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Beberapa peranan penting sumber daya air di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Pembentuk Sistem Kebudayaan

Sebagian besar permukiman yang berkembang di kabupaten Lampung Barat, berada di sempadan sungai. Hasil penelitian Badan Arkeologi Bandung pada tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 16 situs pemukiman kuno abad 10-14 masehi ditemukan di sepanjang sungai Way Rubok (Kecamatan Balik Bukit). Bagi masyarakat kuno, sungai berperan sebagai sistem navigasi dan jalur migrasi penduduk membentuk koloni (pemukiman), bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya (abad 7 – 12 masehi) beberapa sungai besar dipergunakan sebagai jalur perdagangan. Bentuk adaptasi pemukiman terhadap sungai terlihat pada arsitektur bangunan rumah tradisional masyarakat asli yang berbentuk rumah panggung dengan pola penyebaran seperti pita (ribbon) atau linear. Ikatan kekerabatan bagi masyarakat asli (Lampung) juga didasari atau dikelompokkan berdasarkan daerah aliran sungai, yang disebut sebagai Kebuayan. Adaptasi terhadap kondisi sumber daya air, melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak sumber daya air.

b) Penyedia Sistem Air Baku

Air baku adalah sumber air yang menjadi bahan baku pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi air minum dan kebutuhan lain-lainnya. Sumber air baku di Lampung Barat meliputi: air tanah, air permukaan, mata air, dan air hujan. Pemanfaatan air baku di Lampung Barat antara lain sebagai penyediaan sistem air bersih untuk air minum, sanitasi dan sistem irigasi.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. Hingga tahun 2023, PDAM Limau Kunci memiliki 10 unit SPAM perpipaan dengan kapasitas 6 – 21 liter/detik. Cakupan layanan meliputi sistem perkotaan di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Sekincau, Way Tenong, dan Kebun Tebu, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 15.310 SR atau baru sekitar 39,2% dari kapasitas terpasang.

Selain penyediaan air minum perkotaan yang dikelola oleh PDAM, dilakukan pula pelayanan penyediaan air minum pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pekon, dengan jumlah cakupan layanan air bersih mencapai 74.787 KK atau sekitar 89% dari total kepala keluarga di Lampung Barat.

Pemanfaatan lain dari air baku adalah sebagai sumber air irigasi guna mendukung kedaulatan pangan. Hingga tahun 2024, terbangun sebanyak 118 daerah irigasi (DI) dengan luas DI (baku Sawah) $\pm$ 11.442,76 Ha dengan indek pertanaman (IP) mencapai $\pm$ 121,02 %.

c) Penyedia Energi Baru Terbarukan

Sungai-sungai yang mengalir ke arah Timur maupun Selatan, umumnya memiliki alur yang panjang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, baik berupa PLTMH (mikrohidro, minihidro) maupun PLTA. Sungai-sungai yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, adalah sungai Way Besai dan sungai Way Semaka.

Pemanfaatan sungai Way Besai sebagai sumber energi Listrik di Lampung Barat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 MWe,

Pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe.

D. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan klasifikasi Oldeman dan Las Davies (1979) memiliki tipe iklim B, dengan curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm per Tahun, bulan basah berkisar antara 7-9 bulan, dan suhu rata-rata berkisar antara 20-25°C. dengan persentase penyinaran matahari (intensitas cahaya) berkisar 37,9 – 50,0%. Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, serta data kebijakan satu peta (KSP) tahun peluncuran 2018 bervariasi, diantaranya:

- (1) 500 – 2.000 mm/tahun termasuk dalam kategori rendah.
- (2) 2.000 - 2500 mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 2.2.
Curah Hujan bulanan di Lampung Barat Tahun 2023

<i>Bulan</i>	<i>Curah Hujan (mm/thn)</i>	<i>Hari Hujan (Hari)</i>
Januari	247,6	21
Pebruari	197,6	16
Maret	255,5	25
April	211,5	16
Mei	110,3	8
Juni	194,8	17
Juli	219,3	18
Agustus	92,0	10
September	27,3	4
Oktober	143,0	10
November	463,0	22
Desember	166,0	9
Total	2.327,9	176

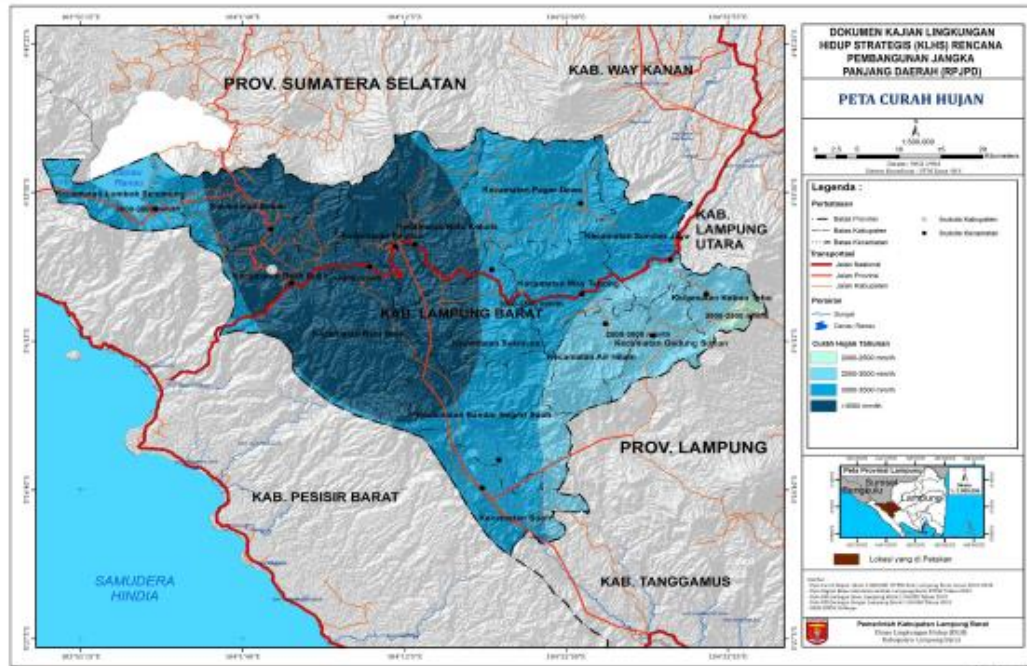
Sumber: Lampung Barat Dalam Angka, 2024

Selama tahun 2016, rata-rata suhu udara di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 20°C - 22°C. Sementara rata-rata kelembapan udara berkisar antara 87.10% - 93.50%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan suhu rata-rata berkisar 21,23°C – 22,98°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei dan terendah terjadi pada bulan September. Kelembapan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kisaran rata-rata sebesar 88,16%-92,06%.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan
di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara(°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
1.	Januari	26,44	18,64	21,76	94	88	92,06
2.	Februari	26,83	18,90	22,20	93	78	90,38
3.	Maret	26,70	18,74	22,98	96	89	91,97
4.	April	26,40	18,75	21,85	96	83	90,40
5.	Mei	27,23	18,75	21,71	95	89	91,19
6.	Juni	26,65	18,24	21,85	95	86	90,87
7.	Juli	26,85	18,08	21,76	98	83	89,23
8.	Agustus	27,02	17,22	21,80	91	77	88,16
9.	September	26,58	17,05	21,23	93	81	88,27
10.	Oktober	26,86	18,41	21,45	94	71	89,10
11.	November	26,37	18,38	21,61	94	85	90,37
12.	Desember	25,54	18,50	21,41	94	78	89,87

Gambar 2.9.
Peta Curah Hujan



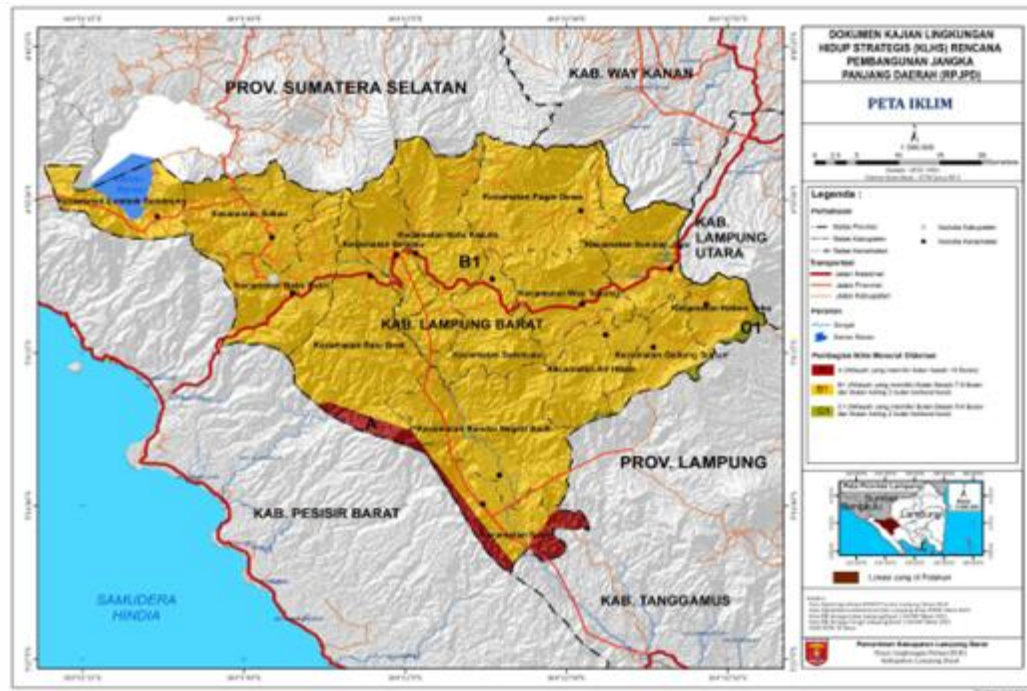
Sumber: KLHS RPJPD Lampung Barat

Peningkatan suhu dan penurunan kelembaban yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- Dinamika atmosfer yang tidak biasa. Salah satunya berupa fenomena El Nino, yaitu kondisi ketika suhu permukaan laut di kawasan Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya.
- Adanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini menyebabkan terjadinya lonjakan panas di wilayah sub-kontinen Asia Selatan, kawasan Indochina, dan Asia Timur. Gerak semu Matahari merupakan suatu siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya yang menandai masuknya musim kemarau. Gerak semu matahari menyebabkan bentukan awan berkurang, dan meningkatnya suhu harian diatas suhu rata-rata.
- Pemanasan global dan perubahan iklim. Meningkatnya emisi gas rumah kaca menyebabkan naiknya temperatur bumi dan memicu gelombang panas yang semakin sering terjadi.
- Dominasi monsun Australia. Dominasi monsun Australia yang membuat Indonesia memasuki musim kemarau. Pada musim kemarau, umumnya curah hujan di Indonesia akan menurun drastis dan suhu udara menjadi lebih tinggi.
- Intensitas maksimum radiasi matahari. Pada saat cuaca cerah, sinar matahari akan langsung masuk ke bumi dan memanaskan permukaannya. Hal ini menyebabkan suhu udara menjadi lebih tinggi dan dapat memicu terjadinya cuaca panas yang berkepanjangan. Untuk lokasi dengan kondisi cuaca cerah-

berawan pada pagi sampai dengan siang hari dapat berpotensi menyebabkan indeks UV (ultraviolet) pada kategori “Very high” dan “Extreme” di siang hari.

Gambar 2.10.
Peta Iklim di Lampung Barat



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Barat, 2023

Propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Zona Musim (ZOM). Zona Musim (ZOM) adalah zona daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan periode musim kemarau dan musim hujan. Luas suatu wilayah ZOM tidak selalu sama dengan luas suatu wilayah pemerintahan, satu wilayah ZOM bisa terdiri dari beberapa kabupaten atau sebaliknya. Kabupaten Lampung Barat, memiliki 4 Zona Musim (ZOM), yaitu ZOM Lampung 09, Lampung 10, Lampung 11, dan Lampung 12. Adanya ZOM ini menandai bahwa dalam satu wilayah administrasi bisa mengalami perbedaan awal memasuki musim penghujan atau musim kemarau.

E. Kebencanaan

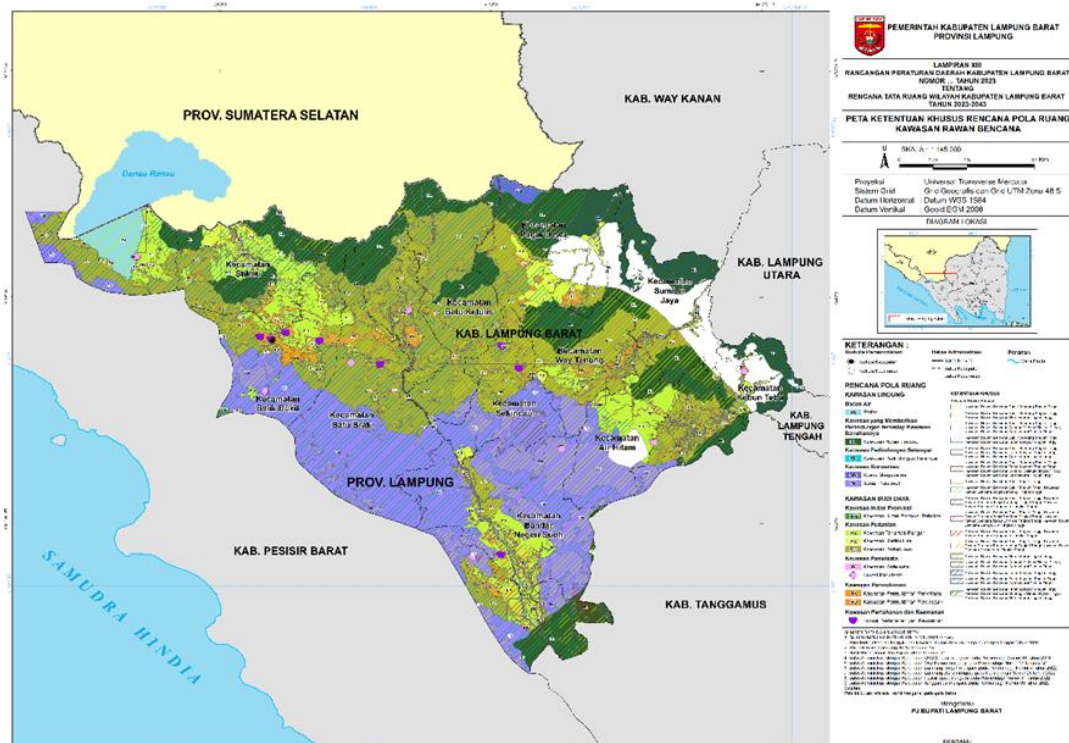
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Wilayah Kabupaten Lampung Barat berada di atas zona subduksi yang merupakan pertemuan antara lempeng Indo Australia dengan lempeng

Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan arah miring sekitar 45 derajat, dan bergerak sekitar 50-70 cm/tahun. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya sesar atau patahan (fault) yang memanjang dari kepulauan Andaman hingga selat Sunda sepanjang 1.900 km yang disebut sebagai *The Great Sumatera Fault*. Jalur sesar sumatera ditandai dengan adanya pegunungan Bukit Barisan di bagian sisi barat pulau Sumatera. Sesar Sumatera terbagi menjadi 19 segmen dan merupakan sesar tektonik aktif. Aktivitas lempeng ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat kedalam sabuk atau cincin api pasifik (Ring of Fire) yang memiliki tingkat kerawanan dan resiko kerusakan parah dari aktivitas tektonik maupun vulkanik.

Gambar 2.11.

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



Sumber : RTRW Lampung Barat 2023-2043

Bencana digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sesuai dengan karakteristik wilayah dan pertimbangan dengan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

E.1. Bencana Alam

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Kejadian bencana alam yang umum terjadi di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Tanah Longsor

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan kawasan rawan bencana longsor. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Kecamatan Gedung Surian yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor. Gerakan Tanah/Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor. Artinya lebih dari 62,48% dari luas kawasan Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan rawan longsor. Bahaya longsor menduduki urutan teratas pada sisi sebarannya (lebih kurang 80%).

b) Banjir

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Penyebab utama dari banjir adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar.

Kabupaten Lampung Barat secara geomorfologi memiliki 4 (empat) daerah cekungan atau depresi yang menjadi daerah limpasan atau hamparan banjir alami (flood plain), yaitu cekungan Ranau dengan limpasan banjir sungai Way Warkuk, cekungan Suoh-Hantatai dan Cekungan Rowo Rejo dengan limpasan banjir sungai Way Semaka, dan Cekungan Gedung Surian dengan limpasan banjir sungai Way Besai.

Dampak perubahan iklim ditambah dengan semakin parahnya kerusakan di catchment area menyebabkan kejadian bencana banjir kian meningkat.

Gambar 2.12.
Peristiwa Banjir di Cekungan Suoh pada November 2022



c) Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Zona Musim (ZOM). Zona Musim tidak mengikuti batas administrasi kabupaten/kota. Satu wilayah Kabupaten/Kota bisa memiliki lebih dari satu zona musim (ZOM), misalnya di Kabupaten Lampung Barat, memiliki 4 ZOM, yaitu ZOM Lampung 09, Lampung 10, Lampung 11, dan Lampung 12. Adanya 4 Zona Musim ini menempatkan Lampung Barat sebagai kabupaten yang relatif aman dari bencana kekeringan ekstrim, namunupun begitu tetap harus diwaspadai, dengan kondisi perubahan iklim global saat ini, karena masih berada dalam zona iklim dengan sifat musim kemarau di bawah kondisi normal, dengan durasi musim kemarau antara 9-12 dasarian (1 dasarian = 10 hari). Dua kecamatan yang beresiko mengalami kekeringan ekstrim di Lampung Barat, yaitu Kecamatan Sekincau, dan Kecamatan Pagar Dewa.

d) Gempa Bumi

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan yang disebut sebagai sesar Sumatera yang memanjang dari Aceh, Sumatera bagian barat hingga ke selat Sunda. Sesar Sumatera terbagi menjadi 19 segmen, dimana dua segmennya berada di Kabupaten Lampung Barat, yaitu **segmen Komering**, dan **segmen Semangko**. Segmen Komering memanjang dari bagian utara danau Ranau hingga ke dataran tinggi Liwa di bagian tenggara, sedangkan Segmen Semangko memanjang dari Karang Brak (Batu Brak) – Suoh - Kota Agung.

Tercatat ada tiga peristiwa gempa dengan kekuatan > 7 skala richter (SR) yang pernah mengguncang Lampung Barat, yaitu pada tahun 1908 dengan kekuatan gempa mencapai 7,0 SR sebagai aktivitas *tektonik sesar Semangko*. Tahun 1933 dengan kekuatan gempa 7,5 SR dan Tahun 1994 dengan kekuatan gempa 7,2 SR, sebagai aktivitas *tektonik sesar Komering*.

Gempa Liwa tahun 1933 terjadi tanggal 25 Juni 1933, pukul 04:54 WIB dengan pusat gempa berada pada koordinat $5^{\circ}2'$ LS dan $104^{\circ}9'$ BT. Termasuk gempa dangkal (± 8 km) dengan kekuatan 7,5 SR. Jumlah korban meninggal sebanyak 550 jiwa, dengan radius kerusakan mulai dari Pulau Duku (Kabupaten OKUS, Propinsi Sumatera Selatan) hingga Kota Agung (Tanggamus, Lampung). Guncangan gempa terasa hingga Singapura.

Gempa Liwa tahun 1994 terjadi tanggal 16 Februari 1994, dengan pusat gempa berada pada koordinat $04^{\circ},96'$ LS dan $104^{\circ}30'$ BT. Termasuk gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa ± 23 km, dan kekuatan gempa mencapai 7,2 SR. Jumlah korban jiwa meninggal dunia sebanyak 207 jiwa, 2.000 orang terluka, dan 75.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, dan Batu Brak.

Berdasarkan hasil perhitungan *conditional probability* terhadap perkiraan tahun perulangan kejadian gempa, maka kejadian gempa bumi dengan kekuatan > 7 SR di segmen sesar Semangko akan terulang kembali diperkirakan di tahun 2030 dan pada sesar Komering diprediksi akan terjadi kembali di tahun 2033. Hasil perhitungan *conditional probability* akan memudahkan dalam menyusun time line dari rencana aksi pengurangan resiko (mitigasi) gempa bumi di Lampung Barat.

e) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Berdasarkan peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan diklasifikasikan menjadi dua kelas kerentanan; Rendah-Sedang dan Sedang-Tinggi. Aktivitas manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Secara spasial aktivitas manusia terdiri atas: jarak dari jalan, tutupan lahan dan kepadatan penduduk. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu lingkungan di dunia karena menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan lingkungan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Adapun luas lahan dengan klasifikasi kerentanan Rendah-Sedang sebesar 6.418 Ha dan luas lahan untuk kerentanan Rendah sebesar 30.174 Ha. Kecamatan yang didominasi oleh tingkat kerentanan Sedang-Tinggi yaitu Kecamatan Balik Bukit. Sedangkan untuk tingkat kerentanan Rendah-Sedang berada di Kecamatan Suoh.

f) Erupsi Gunung Api

Lampung Barat masuk dalam zona ring of fire pulau Sumatera, dan memiliki 3 kaldera, yaitu kaldera gunung Seminung pada ketinggian 1.804 mdpl, kaldera gunung Sekincau pada ketinggian 1.718 mdpl, dan kaldera Nirwana Suoh pada ketinggian 300 mdpl.

Banyaknya manifestasi panas bumi (geothermal) yang muncul disekitar kaldera tersebut, menyebabkan ketiga kaldera dikategorikan “tidur” atau tidak aktif, namun potensi terjadinya erupsi perlu diperhitungkan, guna mengurangi resiko kerusakan yang diakibatkan. Terutama potensi gas beracun solfatara, yang muncul dari celah-celah rekahan geothermal, seperti yang terjadi di kaki gunung Seminung, yang menyebabkan matinya ribuan ikan diperairan danau Ranau. Fenomena ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai “**Bintelehan**”.

Gambar 2.13.

Erupsi Freatik Suoh-Hantatai tahun 1933,
asal mula terbentuknya kawah nirwana dan 4 danau Suoh



Keterangan: Kiri: Kaldera Pematang Bata sebelum meletus (Van Bemmelen, 1930), Kanan: Setelah terjadi letusan (Stehn, 17 Juli 1933).

Peristiwa erupsi gunung api pernah terjadi pada “gunung api kecil” Belirang di kompleks kaldera Pematang Bata pada tanggal 10 Juli - 5 Agustus 1933, yang dikenal sebagai Erupsi Freatik Suoh Hantatai. Erupsi ini menyebabkan area dalam **radius ± 18 km** dari pusat letusan mengalami kerusakan parah dan tertutup lumpur. Sisa-sisa dari proses erupsi freatik berupa kaldera bernama Nirwana, dan 4 (empat) buah danau indah di Suoh. sebagai warisan geologi yang dapat dikembangkan sebagai geopark.

E.2. Bencana Non Alam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- (1) Virus Corona (COVID-19) merupakan wabah global yang juga menyerang dan menjadi ancaman di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data terakhir tertanggal 15 Januari 2024, jumlah kasus positif virus corona telah mencapai 4.237 orang, dimana sebanyak 157 orang meninggal dunia, dan 0 positif aktif (masih sakit), serta 4.080 orang dinyatakan sembuh.
- (2) Ancaman lainnya dari bencana non Alam yang perlu diwaspadai adalah kegagalan teknologi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bahway yang terletak di Kecamatan Balik Bukit. Hingga saat ini TPA Bahway melayani tidak hanya sampah di Kota Liwa saja, akan tetapi juga di kecamatan sekitar. Diperkirakan TPA Bahway akan penuh sebelum umur produksinya berakhir pada tahun 2030. Potensi bahaya berupa kebakaran gas metan, dan longsoran material sampah yang dapat mengancam keselamatan penduduk dan pencemaran ekosistem disekitarnya.

E.3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan aksi teror. Kabupaten Lampung Barat dianugerahi tidak hanya bentang alam yang indah, namun juga bentang budaya (kultur) yang unik dan beragam. Lampung Barat tidak hanya dihuni oleh etnik Lampung saja namun juga etnik lain yang sudah berasimilasi lama, sehingga hampir tidak ada lagi istilah penduduk asli dan pendatang. Etnis terbesar selain etnis Lampung antara lain Jawa, Sunda, Semende, dan Minang. Potensi bencana sosial yang menjadi ancaman bagi Lampung Barat, adalah konflik SARA, dan konflik tenurial.

Konflik tenurial yang terutama adalah penguasaan atas lahan hutan untuk pemukiman, fasilitas umum (Fasum), fasilitas sosial (Fasos), infrastruktur jalan, dan lahan garapan. Berdasarkan hasil

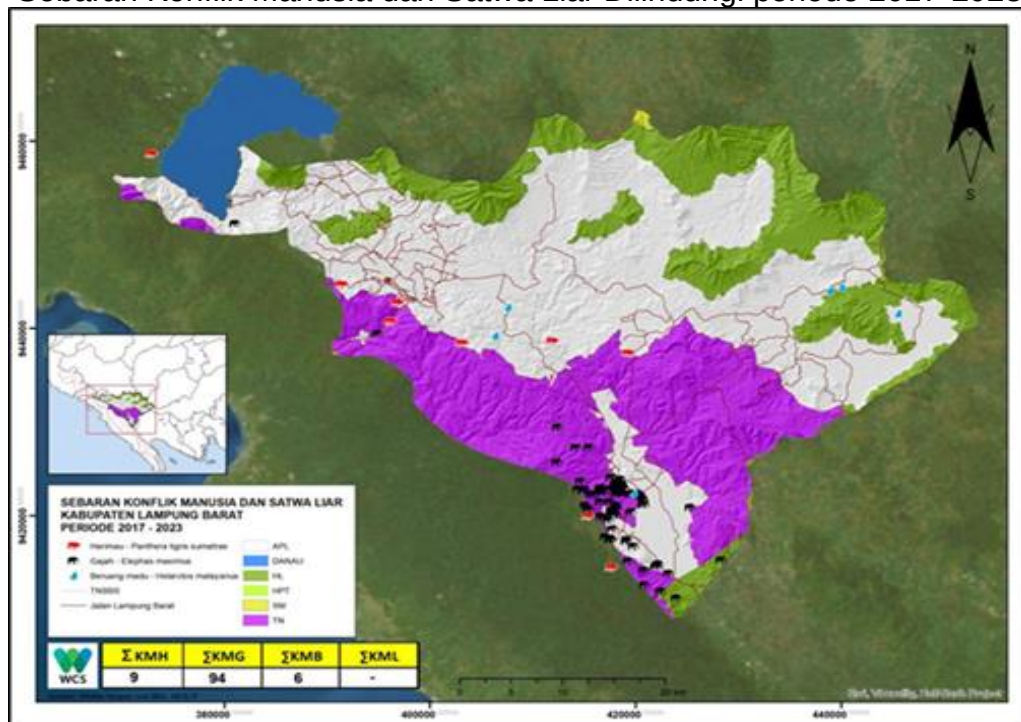
pengukuran Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) pada tahun 2022, teridentifikasi luas permukiman, fasum, dan fasos di dalam kawasan hutan sebagai berikut:

- (1) PPTPKH pemukiman, fasos dan fasum dalam kawasan hutan lindung mencapai luasan $\pm 590,7$ Ha dengan jumlah bangunan mencapai ± 4.556 unit, dan panjang jalan $\pm 44,7$ km.
- (2) PPTPKH pemukiman, fasos dan fasum dalam kawasan Hutan TNBBS, mencapai luas $\pm 333,1$ Ha, dengan jumlah bangunan ± 3.482 unit, dan panjang jalan $\pm 11,8$ km.

Pemukiman, fasilitas umum dan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, perburuan liar, serta alih fungsi lahan hutan, menjadi pemicu habitat satwa menjadi hilang (Habitat Loss), terpecah (Habitat Fragmentation), dan penurunan kualitas (Habitat Degradation). Kerusakan habitat satwa tidak hanya menimbulkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor, akan tetapi menyebabkan gangguan teror satwa liar pada kawasan pemukiman penduduk sekitar kawasan hutan.

Gambar 2.14.

Sebaran Konflik Manusia dan Satwa Liar Dilindungi periode 2017-2023



Sumber: Analisa WCS IP dalam Roadmap Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa, 2023

Satwa liar dilindungi yang kerap menimbulkan konflik, antara lain gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, rusaknya lahan

pertanian dan peternakan, namun juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan beban psikologis bagi masyarakat. Terdapat sekitar 21 pekon penyangga hutan di 9 Kecamatan yang berpotensi menimbulkan konflik manusia dan satwa liar dilindungi di Kabupaten Lampung Barat.

Konflik tenurial maupun konflik manusia dan satwa, apabila tidak terkelola dengan baik, akan berdampak munculnya kecemburuan sosial yang meluas pada tindakan anarkhis dan kerusuhan sosial.

E.4. Indikator Resiko Bencana

Indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana di suatu wilayah disajikan atau ditunjukkan dengan ukuran Indek Resiko Bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap 3 komponen, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kapasitas terdiri dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Berikut data indeks resiko bencana Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Indeks Risiko Bencana

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	179.29	179.29	163.85	178.48	176,61

Sumber: BPBD Lampung Barat, 2023

F. Kawasan Berfungsi Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kebijakan Penataan Ruang bagi kawasan lindung di Lampung Barat adalah dengan memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung; dan mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 24 dari Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, total luas kawasan berfungsi lindung ± 106.560 Ha atau sekitar 50,5% dari wilayah administrasi Lampung Barat, yang terdiri dari:

- (1) **Badan air** berupa danau, telaga, embung, dan sungai, dengan luas mencapai ± 3.194 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan. Ekosistem perairan danau Ranau yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung merupakan badan air terluas yang dimiliki Lampung Barat, yakni $\pm 2.792,2$ Ha.
- (2) **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya**, yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas ± 44.855 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 9B Gunung Seminung, HL 17B Serarukuh, HL 43 Krui Utara, HL 44B Way Tenong-Kenali, HL 45B Bukit Rgis, HL 48B Palakiah, dan sebagian HL 39 Kota Agung Utara. Pengelolaan Hutan Lindung dilakukan oleh UPT KPHL II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kecuali HL 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Suoh pengelolaannya dilaksanakan oleh KPHL Kota Agung yang berada di Kabupaten Tanggamus. Tutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung, menunjukkan tingkat kritis, diperkirakan tersisa sekitar 18-20% dari luas kawasan Hutan Lindung, yang masih berupa tegakan hutan primer, selebihnya sudah berubah menjadi, hutan sekunder, kebun campuran, dan semak belukar.

Tabel 2.5.
Hutan Lindung dan HKm di wilayah Kerja KPHL II Liwa

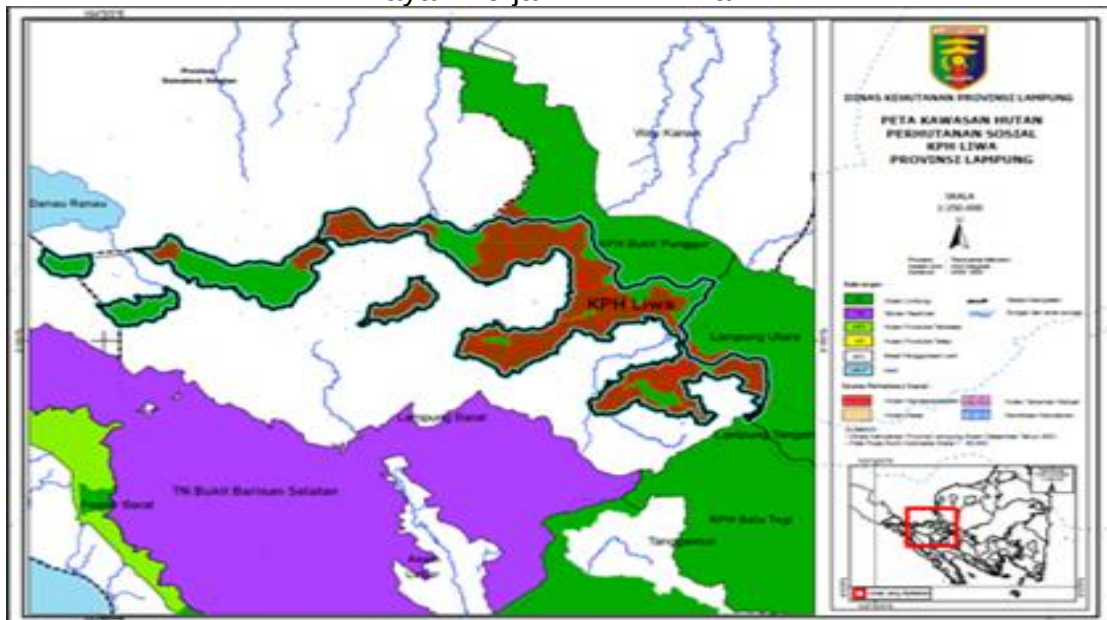
Kawasan Hutan Lindung (HL)			Izin Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)		
Nama HL	Status / SK	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Gapoktan	Anggota (kk)
HL 9B	Penetapan, 4044/ MENHUT / KUH/2014	1050,91	-	-	-
HL. 17B	Penetapan, 522/KPTS-II/1999	1.596,10	1.781,00	2	470
HL. 43B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	14.030,00	8.658,56	7	2.209
HL. 44B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	13.040,00	10.049,34	19	5.331
HL. 45B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	8.345,00	6.923,31	22	4.223
HL. 48B	Penetapan, 521/KPTS-II/1999	1.800,17	-	-	-
Total		39.862,18	27.412,20	50	12.233

Sumber, KPHL II Liwa, 2022

Guna memulihkan kembali fungsi ekologis dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dilakukan implementasi Program Perhutanan Sosial, melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hingga tahun 2022 jumlah gabungan kelompok tani hutan yang mendapatkan IUPHKm sebanyak 53 Gapoktan dengan jumlah anggota sebanyak ± 14.862 kk dengan luas HKm mencapai $\pm 32.758,06$ Ha. Untuk wilayah kerja KPHL II Liwa, jumlah Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 50 gapoktan dengan luas HKm 27.412,20 Ha dengan 12.233 KK.

Gambar 2.15.

Peta Sebaran Hutan Kemasyarakatan melalui Perhutanan Sosial di
Wilayah Kerja KPHL II Liwa



Sumber: KPHL II Liwa, 2022

- (3) Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan danau Ranau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No.: 369/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Ranau pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, seluas 98 Ha yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung. Selain sempadan danau, terdapat pula potensi hutan desa dan hutan adat seluas $\pm 3.285,2$ Ha yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial di luar kawasan hutan dan dukungan terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui skema REDD+ dalam rangka pemenuhan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Lampung. Potensi hutan adat dan hutan desa tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Way Tenong dan Sumberjaya.

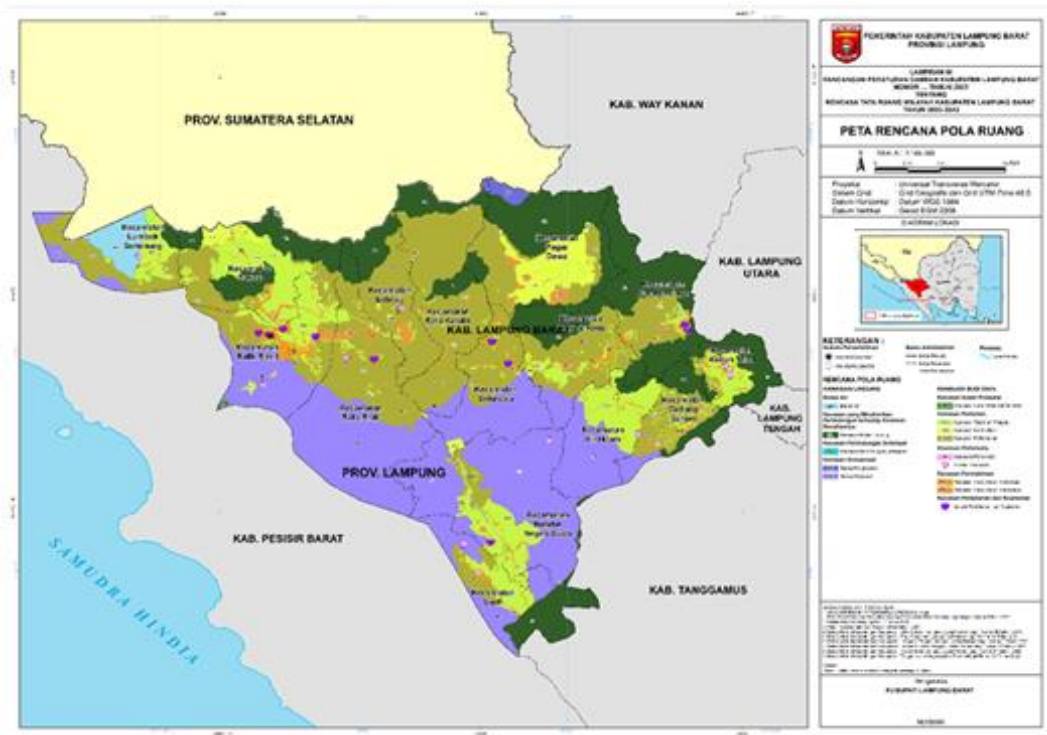
Gambar 2.16.
Kebun Raya Liwa dengan latar belakang hutan konservasi TNBBS



- (4) Kawasan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi insitu dan kawasan konservasi eksitu. Kawasan Konservasi insitu (pada habitat asli) yang beririsan dengan wilayah administrasi Lampung Barat meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ± 57.530 Ha, dan Suaka Margasatwa Gunung Raya seluas ± 883 Ha. Hutan Konservasi TNBBS telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, yang kini berstatus terancam dicabut (in Danger list).

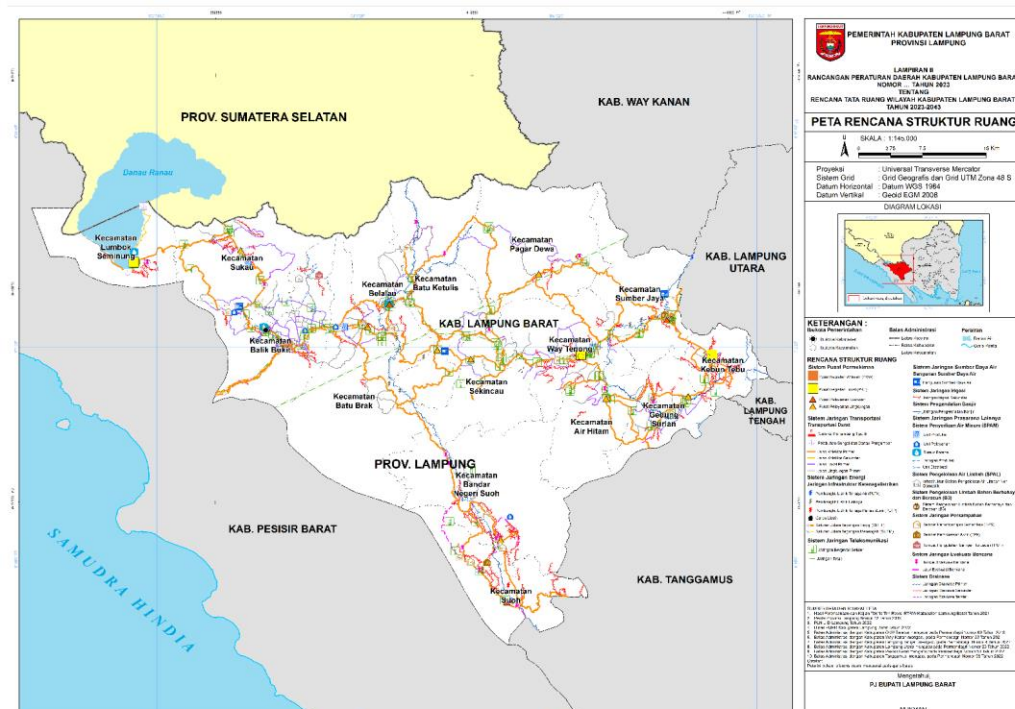
Kawasan konservasi eksitu (di luar habitat aslinya) berupa Kebun Raya Liwa seluas $\pm 86,68$ Ha. Kawasan konservasi eksitu Kebun Raya Liwa bertujuan untuk pengawetan flora khas hutan hujan pegunungan Sumatera, dengan 5 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata (rekreasi), dan ekologis (jasa ekosistem / Ruang Terbuka Hijau).

Gambar 2.17.
Pola Ruang Kabupaten Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

Gambar 2.18.
Struktur Ruang Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

G. Kawasan Budidaya

Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan, dengan kata lain kawasan budidaya adalah kawasan di luar kawasan hutan milik negara sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau di dalam kawasan hutan milik negara yang telah mendapat izin untuk diusahakan, diolah atau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29 Perda Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang RTRW Lampung Barat 1923-1943, Kawasan Budidaya mencakup:

G. 1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Berada di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit seluas $\pm$ 87 Ha. Pengelolaan kawasan HPT, dilakukan oleh UPT KPHP Krui Dinas Kehutanan Propins Lampung. HPT diperuntukan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) Agroforestry (Repong) Damar untuk pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu).

G. 2. Kawasan Pertanian

- a. **Kawasan Tanaman Pangan** seluas $\pm$ 26.824 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam rangka perlindungan Kawasan Pertanian, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas $\pm$ 8.203 Ha untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan seluas $\pm$ 2.014,33 Ha sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), sedangkan untuk luas indikatif Lahan Sawah Dilindungi (LSD) $\pm$ 9.806,08 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. KP2B diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.
- b. **Kawasan Hortikultura** seluas $\pm$ 6.210 Ha berada di Kecamatan Balik Bukit, Lumbok Seminung, Pagar Dewa, Sekincau, dan Sukau.
- c. **Kawasan perkebunan** seluas $\pm$ 64.012 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kopi robusta merupakan komoditi utama yang dihasilkan dari kawasan perkebunan di Lampung Barat.

G. 3. Kawasan Pariwisata

Lampung Barat dianugerahi dengan bentang alam yang indah dan bentang budaya yang beragam serta memiliki kekhasan. Kombinasi keduanya menempatkan Lampung Barat memiliki kekayaan objek dan atraksi wisata yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, menyebutkan bahwa kawasan danau Ranau ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Guna mendukung sinergitas KSPN dengan Kawasan Strategis Pariwisata di tingkat daerah, telah ditetapkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2016-2031, dan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang RTRWK 2023-2043 telah ditetapkan Kawasan Pariwisata Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung seluas 23 ha sebagai Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.6.
Perkembangan Pariwisata di Lampung Barat

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	688.790	1.798.010	1.390.601
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	0	156	252
Perkembangan restoran (unit)	58	58	129
PDRB adhb sektor Penyediaan akomodasi & makan minum (Rp milyar)	96,23	108,54	123,87
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi terhadap total PDRB adhb (%)	1,28 %	1,31%	1,37%

Sumber: Dinas Pariwisata Lampung Barat dan LBDA, 2024

Ragam destinasi wisata yang dapat dibangun di Lampung Barat, antara lain wisata alam, wanawisata, ekowisata, wisata kuliner, eduwisata, wisata religi, sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus. Salah satu wisata minat khusus yang tengah dibangun dan dikembangkan adalah Geopark Suoh atau Taman Bumi Suoh.

Geopark Suoh menjadi salah satu kawasan strategis propinsi Lampung dari sudut pandang kepentingan ekonomi yang berada di Lampung Barat. Dibangunnya geopark telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan Tematik Pariwisata di Lampung Barat, yaitu tematik keanekaragaman hayati yang terwakilkan oleh Kebun Raya Liwa, keanekaragaman geologi yang terwakilkan oleh geopark Suoh, dan keanekaragaman budaya yang terwakilkan oleh Situs Megalitikum Batu Berak.

Sebagai ajang mempromosikan pariwisata diselenggarakan festival budaya “Sekala Bekhak”, yang sudah ditetapkan dalam kalender even nasional (Kharisma Event Nusantara).

Daerah tujuan wisata utama di Lampung Barat antara lain: Kebun Raya Liwa di Kecamatan Balik Bukit, Rest Area Puncak dan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumberjaya, Situs Megalitikum Batu Berak di Kecamatan Kebun Tebu, Kampung Kopi di Kecamatan Air Hitam, Tamiangan Hill di Kecamatan Gedung Surian, Rumah Adat Kepaksian Pernong dan Bukit Bawang Bakung di Kecamatan Batu Brak, Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung, dan danau Suoh di Kecamatan Suoh.

G. 4. Kawasan Pemukiman

Kawasan permukiman di Lampung Barat terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan (urban), dan kawasan permukiman perdesaan (rural). Luas kawasan permukiman perkotaan ± 1.743 Ha yang tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Belalau, Kebun Tebu, Lumbok Seminung, Sekincau, dan Sumber Jaya, Suoh dan Way Tenong. Kawasan permukiman pedesaan seluas ± 5.339 Ha tersebar di seluruh Kecamatan.

H. Kualitas Lingkungan Hidup

Kelengkapan analisa untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dikategorikan berdasarkan 6 (enam) muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai berikut:

H.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (2) Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

H.1.1. Daya Dukung Air

Ketersediaan air yang berada di bumi merupakan suatu sistem yang dinamik, artinya selalu berubah dari waktu ke waktu. Neraca air lahan merupakan suatu estimasi ketersediaan air yang berada pada suatu lahan tertentu dengan jenis tutupan tertentu. Ketersediaan air yang

merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (*spatial variability*) dan variabilitas waktu (*temporal variability*) yang sangat tinggi. Penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Luas Tutupan Lahan Terhadap Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat

No	Tutupan Lahan	Luas	Koefisien	Luas X Koefisien
1.	Danau	3.094,58	1,00	3.094,58
2.	Hutan Rimba	39.851,51	1,00	39.851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	97,16	0,21	20,40
5.	Perkebunan/Kebun	121.866,32	0,21	25.591,93
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	484,35	1,00	484,35
8.	Sawah	11.293,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.326,92	0,21	5.318,65
10.	Sungai	456,98	1,00	456,98
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,98	0,21	4,83
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	211.688,97	-	81.856,73

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan perhitungan hasil dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan perhitungan adalah 1.651.173.935,39 m³/tahun. Kemudian untuk mengetahui selisih antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan maka jumlah air yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat dikonversikan dalam L/tahun sehingga ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat sebesar 1.651.173.935.390 L/tahun.

Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01 Tahun 2014 bahwa

kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan standar yang digunakan maka dapat diketahui bahwa kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 6.747.623.060 L/tahun. Angka ini didapatkan dengan mengalikan jumlah kebutuhan air per orang per hari dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Kemudian mengalikannya dengan 365 hari dalam setahun untuk mengetahui jumlah kebutuhan air dalam satu tahun. Asumsi untuk kebutuhan air pada kegiatan pertanian dihitung dengan mengalikan luas lahan pertanian sawah terhadap 1,2 Liter/Detik/Ha pada setiap musim panen sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk irigasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk standar pelayanan minimal kebutuhan irigasi sawah.

H.1.2. Status Daya Dukung Air

Berdasarkan perhitungan dari tabel ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2021, 2026, 2031, 2036 dan 2041 maka status daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat berada pada kondisi surplus, artinya masih memenuhi daya dukung air. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, penentuan status daya dukung air berdasarkan rasio dapat ditentukan setelah diketahui besarnya ketersediaan air dan kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan surplus atau relatif saja. Namun untuk menunjukan besaran relative, perlu juga dinyatakan dengan nilai supply/demand. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Dengan melihat perbandingan tersebut untuk Kabupaten Lampung Barat, maka pada tahun 2021 didapat rasio ketersediaan dan kebutuhan air yaitu berada pada kondisi surplus dan aman, begitu juga tahun 2041 memiliki status surplus dan aman. Secara lengkap rasio

daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.8.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	47.618	1.042.825.183	208.565.037	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	30.839	675.372.032	135.074.406	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	9.950	217.908.973	43.581.795	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	12.692	277.946.191	55.589.238	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	20.513	449.241.958	89.848.392	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	14.631	320.414.539	64.082.908	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	17.777	389.325.384	77.865.077	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	15.969	349.723.917	69.944.783	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	12.644	276.899.838	55.379.968	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	31.912	698.867.459	139.773.492	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	26.328	576.574.045	115.314.809	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	37.877	829.495.533	165.899.107	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	19.187	420.198.685	84.039.737	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	22.395	490.460.365	98.092.073	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.431	272.245.052	54.449.010	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		332.763	7.287.499.153	1.457.499.831	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.9.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2031

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	53.268	1.166.579.823	233.315.965	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	37.244	815.637.818	163.127.564	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	12.144	265.951.967	53.190.393	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	12.886	282.196.211	56.439.242	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	21.638	473.873.377	94.774.675	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	12.365	270.795.202	54.159.040	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	20.797	455.445.716	91.089.143	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	14.366	314.613.147	62.922.629	28.978.545.386		SURPLUS



RPJPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
9	Batu Ketulis	11.628	254.648.329	50.929.666	8.849.820.615	1.651.173.935.390	SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	36.634	802.286.070	160.457.214	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	27.640	605.310.053	121.062.011	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	40.358	883.850.982	176.770.196	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	21.622	473.528.851	94.705.770	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	23.069	505.211.749	101.042.350	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.453	272.710.499	54.542.100	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		358.111	7.842.639.796	1.568.527.959	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.10.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2036

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Non-domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	59.590	1.305.020.733	261.004.147	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	44.979	985.034.942	197.006.988	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	14.821	324.587.132	64.917.426	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	13.083	286.511.217	57.302.243	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	22.824	499.855.309	99.971.062	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	10.450	228.859.907	45.771.981	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	24.329	532.795.468	106.559.094	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	12.924	283.027.347	56.605.469	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	10.693	234.184.939	46.836.988	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	42.055	921.008.597	184.201.719	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	29.017	635.478.242	127.095.648	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	43.003	941.768.253	188.353.651	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	24.367	533.627.498	106.725.500	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	23.763	520.406.805	104.081.361	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.474	273.176.741	54.635.348	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		388.372	8.505.343.131	1.701.068.626	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

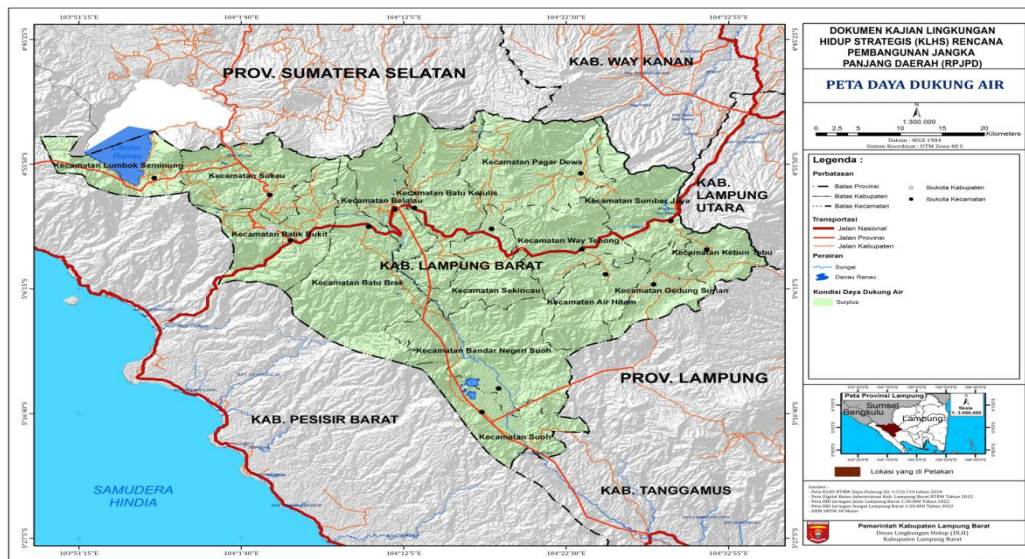
Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.11.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2041

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	66.662	1.459.890.766	291.978.153	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	54.320	1.189.613.595	237.922.719	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	18.089	396.149.755	79.229.951	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	13.283	290.892.204	58.178.441	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	24.076	527.261.799	105.452.360	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	8.832	193.418.705	38.683.741	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	2.022	44.281.800	8.856.360	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	11.626	254.612.625	50.922.525	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	9.834	215.365.974	43.073.195	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	48.279	1.057.299.719	211.459.944	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	30.463	667.149.990	133.429.998	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	45.821	1.003.480.746	200.696.149	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	27.459	601.353.658	120.270.732	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	24.478	536.058.877	107.211.775	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.495	273.643.780	54.728.756	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		397.739	8.710.473.993	1.742.094.799	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Gambar 2.19.
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2021)

H.1.2.1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan perkotaan merupakan kondisi kemampuan lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan lingkungan diatas lahan tersebut. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk dapat menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan.

H.1.2.2. Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan Kabupaten Lampung Barat ditentukan berdasarkan jumlah atau persentasi luasan lahan potensial, kendala atau limitasi yang ada. Dari hasil analisis yang telah dilakukan daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Barat di dominasi oleh lahan potensi sebesar 30% secara keseluruhan, hasil analisis daya dukung lahan yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12.
Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan		
		Limit	Kendala	Potensi
1.	Air Hitam	6.130,75	764,23	3.917,42
2.	Balik Bukit	6.069,81	3.969,79	5.827,02
3.	Bandar Negeri Suoh	20.496,28	1.988,42	4.110,41
4.	Batu Brak	10.103,89	7.263,61	2.469,21
5.	Batu Ketulis	4.029,21	7.115,39	8.169,83
6.	Belalau	2.075,84	5.238,63	2.072,34
7.	Gedung Surian	3.439,49	521,08	3.686,79
8.	Kebun Tebu	3.485,06		2.483,85
9.	Lumbok Seminung	3.207,61	1.989,76	4.536,42
10.	Pagar Dewa	9.795,43	3.261,57	7.317,04
11.	Sekincau	6.112,86	764,32	4.631,33
12.	Sukau	4.490,98	7.486,33	2.618,93
13.	Sumber Jaya	8.614,18	1.396,56	2.758,41
14.	Suoh	10.937,44	1.069,27	2.818,00
15.	Way Tenong	5.328,21	2.265,03	5.376,16
	Total	104.317,05	45.093,98	62.793,16

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja RTRW Kabupaten Lampung Barat, 2021

H.1.2.3. Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas tentang daya dukung lahan yang sebelumnya telah dilakukan maka dapat menjadikan dasar perhitungan proyeksi daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2041. Kapasitas lahan yang dimaksudkan adalah kapasitas untuk menampung kegiatan perkotaan terdiri dari lahan potensial dan lahan kendala perkecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini disebut juga sebagai ketersediaan lahan (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu menggunakan sistem proyeksi kebutuhan pada 20 tahun kedepan sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio perbandingan SL/DL. Hasil analisis diperoleh $0,8 < 1$, hal ini artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berikut daya tampung lahan yang ada dikawasan Lampung Barat dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.13.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	42.566	130,94	38,31	3,42	SURPLUS
2.	Sukau	25.536	1092,03	22,98	47,52	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	8.153	299,68	7,34	40,84	SURPLUS
4.	Belalau	12.500	440,95	11,25	39,19	SURPLUS
5.	Sekincau	19.447	124,55	17,50	7,12	SURPLUS
6.	Suoh	17.312	380,26	15,58	24,41	SURPLUS
7.	Batu Brak	15.197	262,36	13,68	19,18	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	17.751	306,04	15,98	19,16	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	13.749	91,06	12,37	7,36	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	27.798	774,01	25,02	30,94	SURPLUS



RPJPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
11.	Sumber Jaya	25.078	211,89	22,57	9,39	SURPLUS
12.	Way Tenong	35.547	675,67	31,99	21,12	SURPLUS
13.	Gedung Surian	17.026	287,28	15,32	18,75	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	21.742	196,40	19,57	10,04	SURPLUS
15.	Air hitam	12.410	422,98	11,17	37,87	SURPLUS
	Total	311.811	311.811	280,63	20,30	SURPLUS

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023

Tabel 2.14.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	47.618	130,94	42,86	3,06	SURPLUS
2.	Sukau	30.839	1092,03	27,76	39,35	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	9.950	299,68	8,96	33,46	SURPLUS
4.	Belalau	12.692	440,95	11,42	38,60	SURPLUS
5.	Sekincau	20.513	124,55	18,46	6,75	SURPLUS
6.	Suoh	14.631	380,26	13,17	28,88	SURPLUS
7.	Batu Brak	17.777	262,36	16,00	16,40	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	15.969	306,04	14,37	21,29	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	12.644	91,06	11,38	8,00	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	31.912	774,01	28,72	26,95	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	26.328	211,89	23,69	8,94	SURPLUS
12.	Way Tenong	37.877	675,67	34,09	19,82	SURPLUS
13.	Gedung Surian	19.187	287,28	17,27	16,64	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	22.395	196,40	20,16	9,74	SURPLUS
15.	Air hitam	12.431	422,98	11,19	37,81	SURPLUS
	Total	332.763	332.763	299,49	19,02	SURPLUS

Tabel 2.15.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2030

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	53.268	130,94	47,94	2,73	SURPLUS
2.	Sukau	37.244	1092,03	33,52	32,58	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	12.144	299,68	10,93	27,42	SURPLUS
4.	Belalau	12.886	440,95	11,60	38,02	SURPLUS
5.	Sekincau	21.638	124,55	19,47	6,40	SURPLUS
6.	Suoh	12.365	380,26	11,13	34,17	SURPLUS
7.	Batu Brak	20.797	262,36	18,72	14,02	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	14.366	306,04	12,93	23,67	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	11.628	91,06	10,46	8,70	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	36.634	774,01	32,97	23,48	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	27.640	211,89	24,88	8,52	SURPLUS
12.	Way Tenong	40.358	675,67	36,32	18,60	SURPLUS
13.	Gedung Surian	21.622	287,28	19,46	14,76	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23.069	196,40	20,76	9,46	SURPLUS
15.	Air hitam	12.453	422,98	11,21	37,74	SURPLUS
	Total	358.111	358.111	322,30	17,67	SURPLUS

Tabel 2.16.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2035

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	59590	130,94	53,63	2,44	SURPLUS
2.	Sukau	44979	1092,03	40,48	26,98	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	14821	299,68	13,34	22,47	SURPLUS
4.	Belalau	13083	440,95	11,77	37,45	SURPLUS
5.	Sekincau	22824	124,55	20,54	6,06	SURPLUS
6.	Suoh	10450	380,26	9,41	40,43	SURPLUS
7.	Batu Brak	24329	262,36	21,90	11,98	SURPLUS



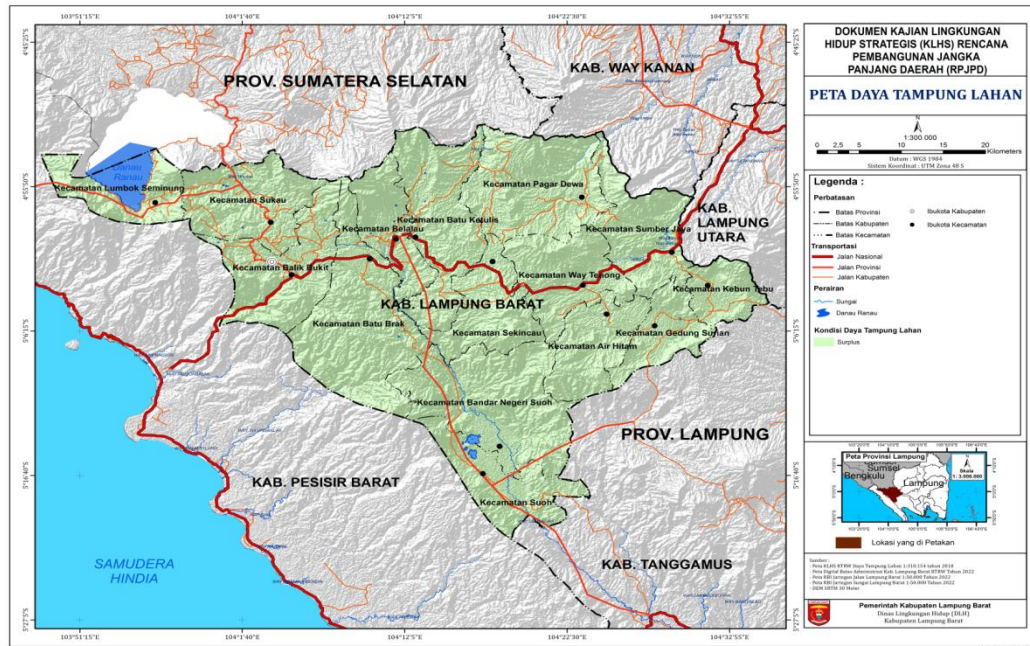
RPJPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
8.	Pagar Dewa	12924	306,04	11,63	26,31	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	10693	91,06	9,62	9,46	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	42055	774,01	37,85	20,45	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	29017	211,89	26,12	8,11	SURPLUS
12.	Way Tenong	43003	675,67	38,70	17,46	SURPLUS
13.	Gedung Surian	24367	287,28	21,93	13,10	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23763	196,40	21,39	9,18	SURPLUS
15.	Air hitam	12474	422,98	11,23	37,68	SURPLUS
	Total	388372	5696,10	349,53	16,30	SURPLUS

Tabel 2.17.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2040

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	66662	130,94	60,00	2,18	SURPLUS
2.	Sukau	54320	1092,03	48,89	22,34	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	18089	299,68	16,28	18,41	SURPLUS
4.	Belalau	13283	440,95	11,95	36,89	SURPLUS
5.	Sekincau	24076	124,55	21,67	5,75	SURPLUS
6.	Suoh	8832	380,26	7,95	47,84	SURPLUS
7.	Batu Brak	2022	262,36	1,82	144,17	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	11626	306,04	10,46	29,25	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	9834	91,06	8,85	10,29	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	48279	774,01	43,45	17,81	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	30463	211,89	27,42	7,73	SURPLUS
12.	Way Tenong	45821	675,67	41,24	16,38	SURPLUS
13.	Gedung Surian	27459	287,28	24,71	11,62	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	24478	196,40	22,03	8,92	SURPLUS
15.	Air hitam	12495	422,98	11,25	37,61	SURPLUS
	Total	397739	5696,10	357,96	15,91	SURPLUS

Gambar 2.20.
Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014), daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan. Adapun klasifikasi daya dukung fungsi lindung yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

No.	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
1.	Sangat Rendah	0,0 - 0,2
2.	Rendah	0,2 - 0,4
3.	Sedang	0,4 - 0,6
4.	Baik	0,6 - 0,8
5.	Sangat Baik	0,8 - 1,0

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Tabel diatas digunakan sebagai pedoman penentuan nilai kualitas daya dukung fungsi lindung. Sehingga dapat dilakukannya analisis daya dukung fungsi lindung kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan sebagai berikut :

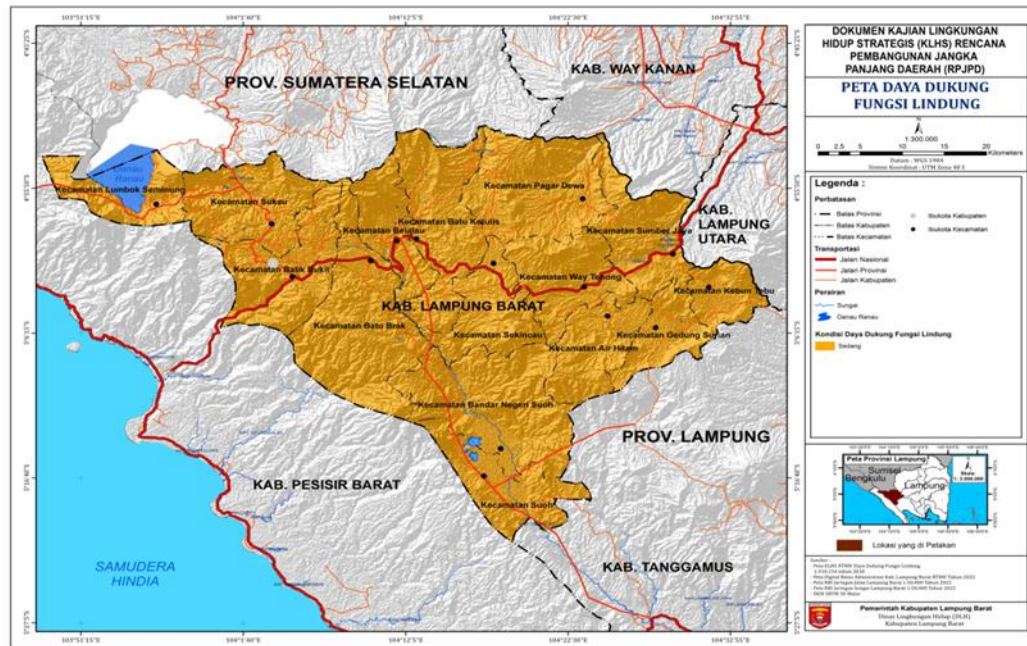
Tabel 2.19.
Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Koef x Luas
1.	Danau	3.094,58	0,98	3.032,69
2.	Hutan Rimba	39.851,51	1	3.9851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	97,16	0,01	0,97
5.	Perkebunan/Kebun	121.866,32	0,54	6.5807,81
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	484,35	0,46	222,80
8.	Sawah	11.293,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.326,92	0,28	7.091,54
10.	Sungai	456,98	0,98	447,84
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,98	0,01	0,23
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210.799,00	-	123.488,89

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, Daya Dukung Fungsi Lindung = $123.488,89/210.799,00 = 0,58$. Dari hasil perhitungan tersebut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kelas sedang. Mengingat Kabupaten Lampung Barat sebagai kawasan konservasi, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Barat perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan indeks tutupan lahan menjadi lebih hijau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.21.
Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

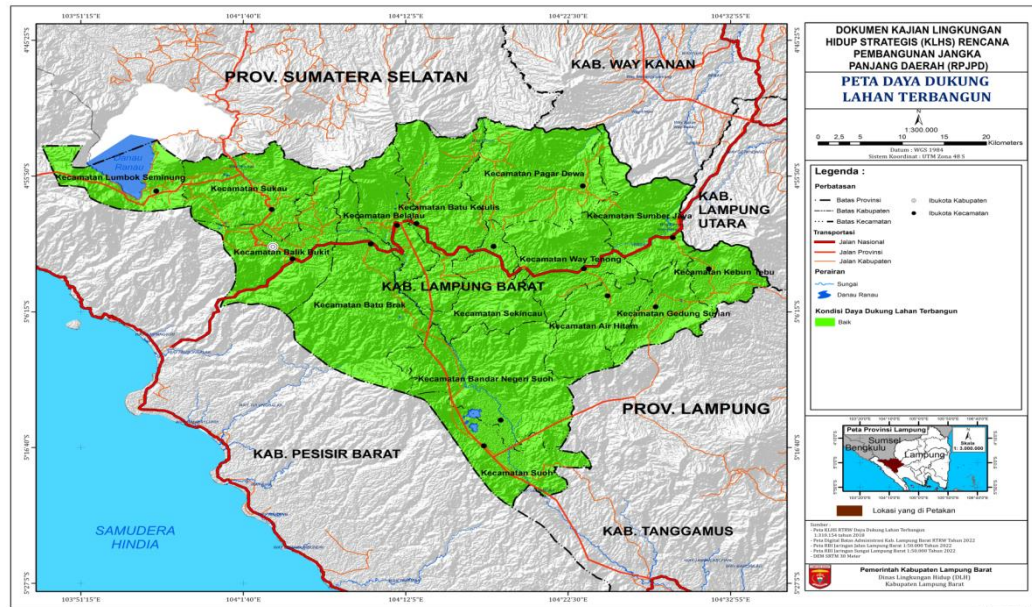


(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.4. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan pada bangunan dapat diketahui dari perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% lahan perkotaan wajib digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung). Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tutupan lahannya terdiri dari lahan terbangun dan pemukiman dengan total luas 3.097,2 Ha. Koefisien luas lahan terbangun yang digunakan adalah 60% (rata-rata koefisien perdesaan dan perkotaan) maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung setelah dilakukan perhitungan adalah 41,009 yang berarti bahwa daya dukung lahan terbangun dapat dikategorikan baik yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22.
Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Lampung Barat

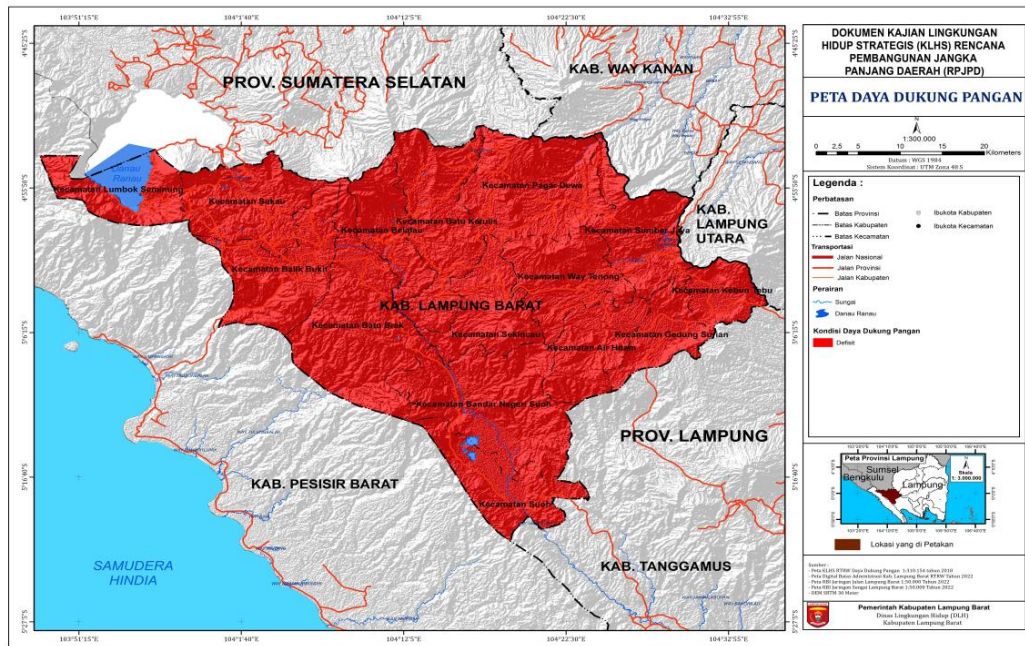


(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan menggunakan metode *Carrying Capacity Ratio (CCR)*. Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, *Carrying Capacity Ratio* Tanaman Pangan sebesar 0,88. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Tersaji peta daya dukung pangan pada gambar 3.13 berikut:

Gambar 2.23.
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup yang sering terjadi adalah bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Berikut uraian dari penggolongan tersebut:

(1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain:

- Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan aktif.
- Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

- Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai, dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
 - Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 KM/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
 - Tanah Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah.
 - Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering kali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
- (2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain:
- Gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
 - Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
 - Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
 - Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/ SK/VII/2004. Kejadian luar

biasa yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2020-2022.
 2. Konflik manusia dan satwa yang dilindungi. Konflik ini terjadi sebagai akibat dari rusaknya ekosistem hutan yang menyebabkan perubahan perilaku satwa yang keluar dari habitatnya. Kejadian konflik satwa di Kabupaten Lampung Barat terjadi sejak tahun 1999 dengan jenis satwa antara lain ; gajah sumatera, harimau sumatera, dan beruang madu. Daerah yang terdampak konflik satwa di Lampung Barat berada di 25 Pekon. Kerugian yang diakibatkan dari adanya konflik satwa antara lain ; kerusakan lahan pertanian, peternakan dan perkebunan, bangunan tempat tinggal, infrastruktur, dan korban jiwa
- (3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi:
- Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
 - Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
 - Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

H.3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Berdasarkan fungsinya terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu : jasa penyedia, jasa pengatur, jasa sosial budaya dan jasa pendukung. Berikut penjelasan keempat jasa lingkungan.

- (1) Jasa penyedia (*provisioning services*). Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem.
- (2) Jasa pengaturan (*regulating services*). Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya, dimana manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya.
- (3) Jasa sosial budaya (*cultural services*). Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non-material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya.
- (4) Jasa pendukung (*supporting services*). Adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya.

H.3.1. Jasa Penyediaan Pangan

Salah satu jasa penyediaan daya dukung lahan dan daya tampung yang memuat tentang hasil laut, pangan dan hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunana untuk pangan.

Tabel 2.20.

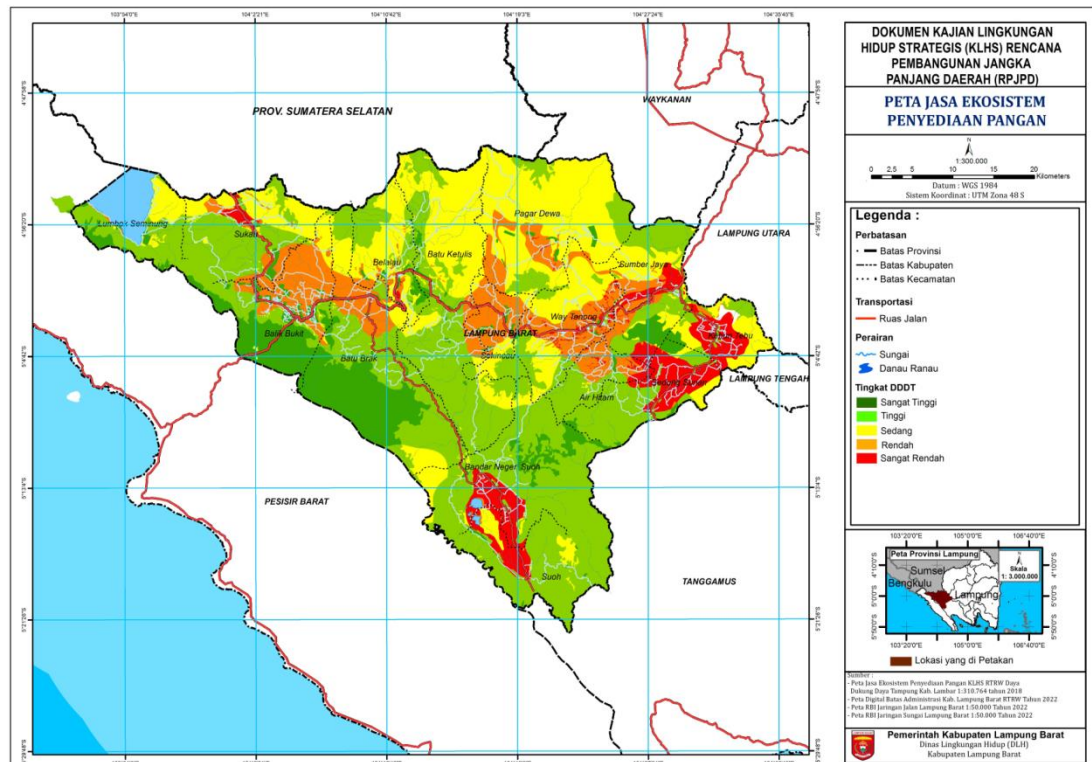
Luas dan Persentase Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

No	KECAMATAN	LUAS JASA PENYEDIAAN PANGAN (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	1.063,07	6.833,09	53,43	1.895,14	967,67
2.	Balik Bukit	6.752,48	3.382,38	1.371,48	4.434,47	
3.	BNS	1.358,05	20.421,49	2.268,91	109,66	2.565,23
4.	Batu Brak	9.008,83	6.624,12	1.467,99	2.828,07	
5.	Batu Ketulis	409,89	7.819,74	9.109,40	862,40	
6.	Belalau	530,78	3.258,85	5.014,35	541,52	45,36
7.	Gedung Surian	832,60	2.381,93	1.073,89	24,61	3.383,19
8.	Kebun Tebu		1.105,61	2.037,74	118,65	2.681,11
9.	Lumbok Seminung	945,53	4.220,28	4.540,89	94,99	
10.	Pagar Dewa	356,17	857,61	15.929,13	2.590,13	37,93
11.	Sekincau	336,88	5.375,89	2.080,50	3.715,24	
12.	Sukau	340,35	7.416,38	4.019,63	2.275,69	554,88
13.	Sumber Jaya	686,48	5.241,56	4.536,72	1.430,23	1.148,86
14.	Suoh	185,72	11.289,95	1.546,85	120,46	1.878,53
15.	Way Tenong	518,54	2.317,69	5.107,00	4.472,73	553,43
	TOTAL	23.325,35	88.546,59	60.157,91	25.513,98	13.816,20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa penyedia pangan rendah dengan total luas 88.546,59 Ha. Jasa penyedia pangan rendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 20.421,49 Ha. Pada jasa penyedia pangan bestatus tinggi dan sangat tinggi didominasi pada Kecamatan Way Tenong dan kecamatan Gedung Surian.

Gambar 2.24.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Pangan
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.2. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa pengaturan daya dukung dan daya tampung yang memuat tentang pengaturan Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air.

Tabel 2.21.

Luas dan Presentase Jasa Layanan Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Tiap Kecamatan

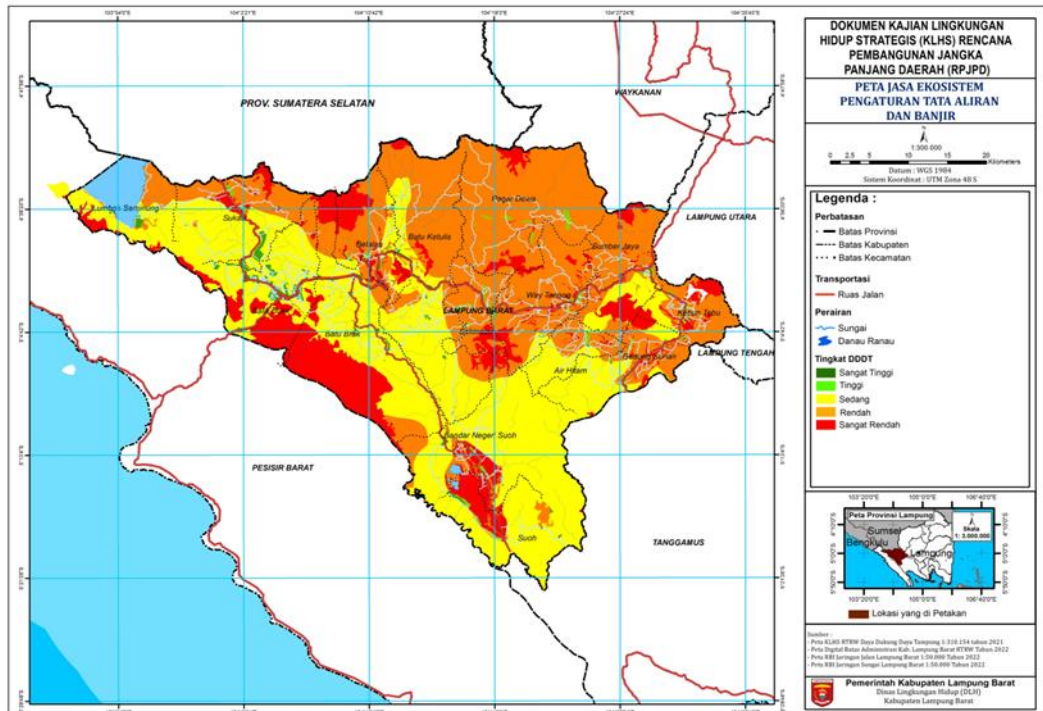
No	Kecamatan	Luas Jasa Tata Aliran Air Dan Banjir (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	15,05	81,04	7.812,46	2.699,43	204,41
2.	Balik Bukit	1.234,18		8.890,20	1.223,57	4.592,84
3.	Bandar Negeri Suoh	77,41	111,55	21.507,67	3.114,89	1.911,82
4.	Batu Brak	281,13	39,99	9.720,71	1.544,26	8.342,94
5.	Batu Ketulis	185,95		6.527,22	10.852,75	635,52
6.	Belalau	24,67	203,38	1.656,41	5.349,36	2.157,02
7.	Gedung Surian	29,09	155,46	2.800,82	3.530,20	1.180,65
8.	Kebun Tebu		223,89	335,14	4.299,06	1.085,04
9.	Lumbok Seminung	142,86		4.244,20	1.860,25	3.554,37
10.	Pagar Dewa		356,17		18.609,33	805,47
11.	Sekincau	16,58	320,30	2.612,51	6.590,69	1.968,43
12.	Sukau	302,52	143,40	8.434,01	4.655,96	1.071,05
13.	Sumber Jaya	2,75	205,32	1.717,69	9.701,57	1.416,51
14.	Suoh	120,29	149,29	11.315,08	1.478,34	1.958,52
15.	Way Tenong	19,48	388,77	952,93	10.033,25	1.574,96
	Total	2.451,95	2.378,56	88.527,06	85.542,91	32.459,55

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sedang dengan total luas 88.527,06 Ha. Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sedang paling luas terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 21.507,67 Ha. Sedangkan untuk jasa

pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Batu Brak.

Gambar 2.25.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.3. Jasa Penyediaan Air Bersih

Jasa penyediaan daya dukung dan daya tampung yang memuat tentang penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) maupun penyediaan air dari sumber permukaan. Berikut ini merupakan data luasan wilayah dan presentase jasa layanan lingkungan penyediaan air di Kabupaten Lampung Barat.

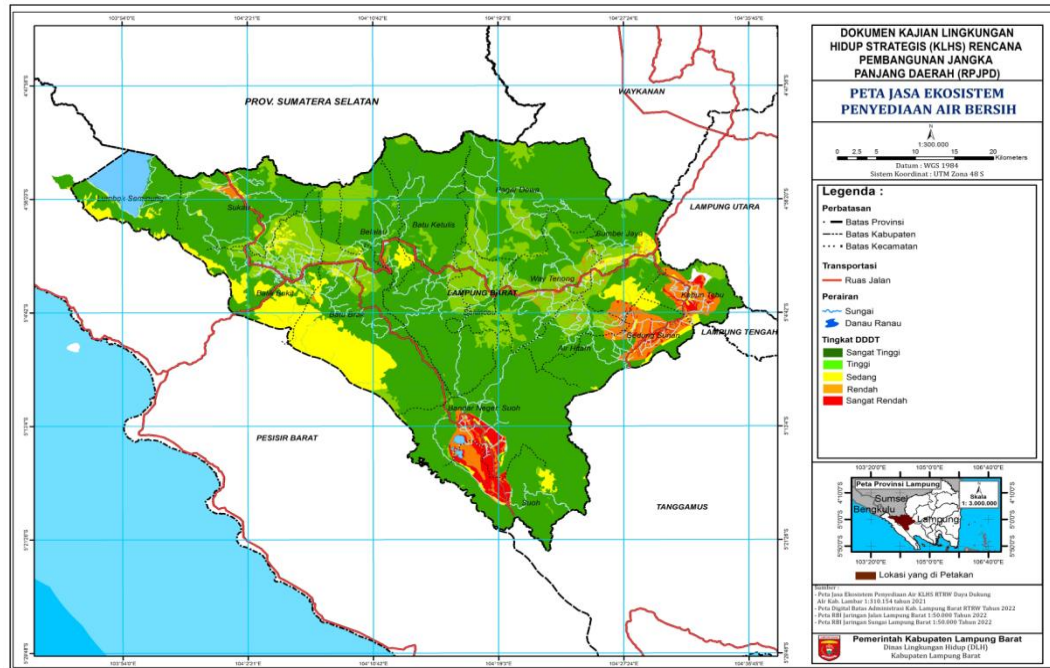
Tabel 2.22.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Air Bersih
Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Jasa Penyediaan Air Bersih (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	7.864,20	1.921,51	41,03	944,72	40,93
2.	Balik Bukit	6.962,08	4.601,59	4.356,67	20,46	
3.	Bandar Negeri Suoh	23.247,22	313,24	406,79	1.125,15	1.630,95
4.	Batu Brak	8.885,55	3.607,82	7.433,45	2,20	
5.	Batu Ketulis	16.598,27	1.511,28	91,88		
6.	Belalau	7.288,13	1.660,84	396,52	45,36	
7.	Gedung Surian	3.291,84	37,61	1.134,83	2.854,79	377,14
8.	Kebun Tebu	2.384,97	556,03	392,43	2.101,57	508,11
9.	Lumbok Seminung	5.862,49	63,36	1.063,92	79,93	2.731,99
10.	Pagar Dewa	16.475,80	3.257,25		37,93	
11.	Sekincau	5.823,72	5.684,78			
12.	Sukau	11.180,31	2.276,72	788,80	361,11	
13.	Sumber Jaya	8.818,32	2.278,23	1.740,38	206,92	
14.	Suoh	11.819,07	181,65	503,64	1.130,52	1.386,62
15.	Way Tenong	6.797,72	5.374,38	344,32	452,99	
	TOTAL	143.299,70	33.326,29	18.694,66	9.363,63	6.675,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa penyedia air bersih sangat rendah dengan total luas 143.299,70 Ha. Jasa penyedia air bersih sangat rendah terdapat pada kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 23 ribu Ha. Sedangkan untuk jasa penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh kecamatan Gedung Surian dan Lumbok Seminung.

Gambar 2.26.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.4. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam. Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/*evaporasi*, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Selanjutnya, secara biologis, pemurnian air dapat terjadi akibat adanya vegetasi dan aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Sementara pemurnian air secara kimia terjadi apabila muncul reaksi antar molekul yang berada di badan air, namun pemurnian air secara kimia tidak terjadi secara terus-menerus dan

bergantung pada kandungan zat dalam badan air atau secara temporer tergantung kepada kondisi dan kemampuan lahan.

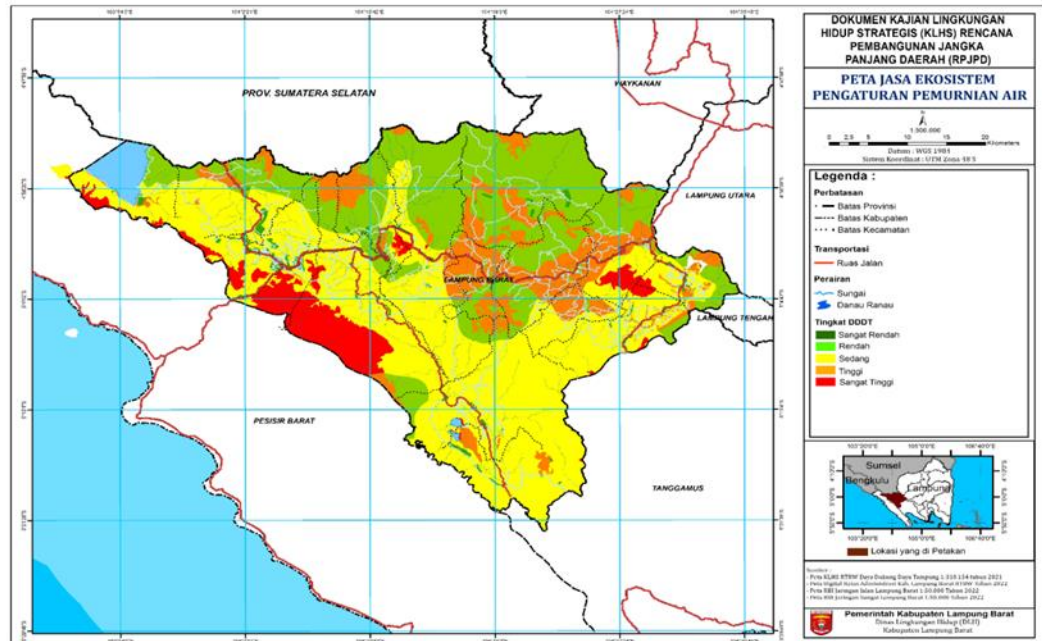
Tabel 2.23.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pemurnian Air Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pemurnian Air (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	15,05	81,04	8.634,73	2.022,57	59,00
2.	Balik Bukit	1.234,18	1.291,24	8.890,20	480,67	4.044,51
3.	Bandar Negeri Suoh	184,73	1.800,59	24.191,62	311,50	234,90
4.	Batu Brak	321,12	1.601,00	9.755,39	1.123,84	7.127,67
5.	Batu Ketulis	185,95	9.885,11	6.669,00	1.369,50	91,88
6.	Belalau	179,19	5.494,65	1.789,40	1.628,09	299,51
7.	Gedung Surian	184,54	498,71	5.656,44	528,39	828,12
8.	Kebun Tebu	223,89	2.050,05	2.437,15	1.223,22	8,82
9.	Lumbok Seminung	126,63	1.555,02	4.244,20	341,18	3.534,66
10.	Pagar Dewa	286,64	16.189,16		3.295,18	
11.	Sekincau	41,73	3.169,48	2.612,51	5.684,78	
12.	Sukau	340,35	4.436,39	8.434,01	1.396,18	
13.	Sumber Jaya	2,75	7.319,42	1.842,15	3.207,97	671,55
14.	Suoh	269,57	551,08	13.204,53	847,31	149,01
15.	Way Tenong	38,81	5.911,42	960.,92	5.850,86	207,39
	Total	3.635,14	61.834,36	99.322,26	29.311,24	17.257,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan pemurnian air di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan sedang dengan total luas 99.322,26Ha. Jasa pengaturan pemurnian air sedang paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 24 ribu Ha. Sedangkan untuk jasa pengaturan pemurnian air tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh kecamatan Sekincau dan Batu Brak

Gambar 2.27.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.5. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami

Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses alami.

Tabel 2.24.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pengaturan Penyerbukan Alami Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	379,94	7.441,39	2.877,01	17,97
2.	Balik Bukit	1.234,18	5.601,41	4.764,85	4.340,36	
3.	Bandar Negeri Suoh	188,96	6.510,95	19.833,14	190,30	
4.	Batu Brak	321,12	9.824,65	1.801,98	7.981,27	

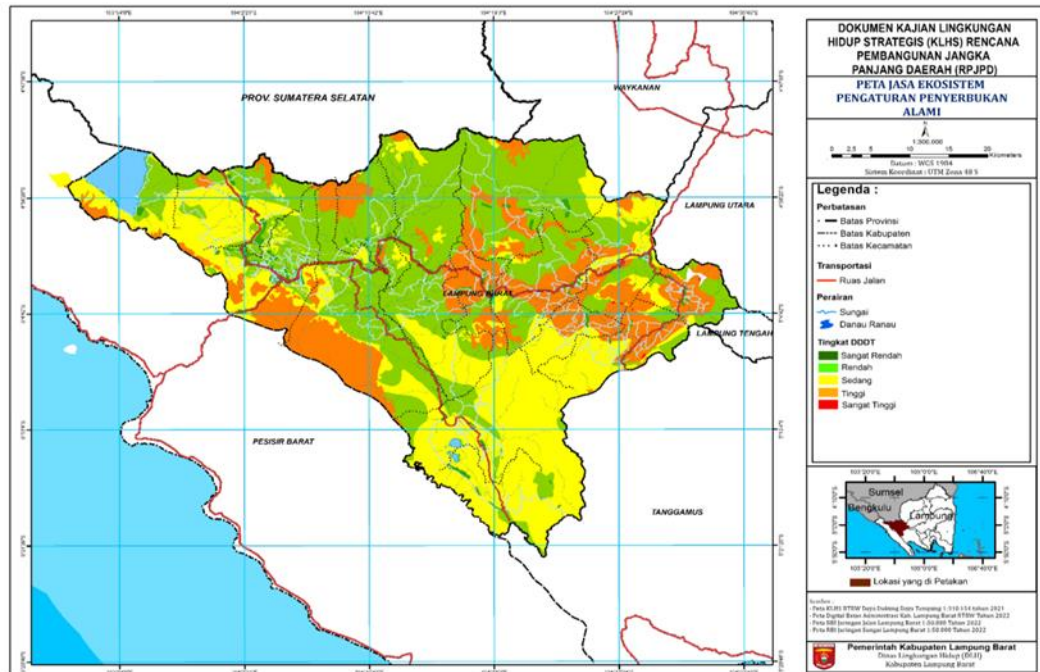


No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Batu Ketulis	185,95	15.084,43	1.561,56	1.369,50	
6.	Belalau	228,05	7.055,50	557,46	1.549,83	
7.	Gedung Surian	184,54	919,67	2.585,80	3.981,59	24,61
8.	Kebun Tebu	223,89	2.290,61	268,41	3.151,39	8,82
9.	Lumbok Seminung	3.152,28	2.486,88	3.442,65	719,87	
10.	Pagar Dewa	356,17	15.979,34	140,29	3.295,18	
11.	Sekincau	336,88	3.165,58	2.321,26	5.684,78	
12.	Sukau	445,92	5.741,16	7.611,56	808,29	
13.	Sumber Jaya	208,08	5.298,64	4.756,81	2.772,87	7,45
14.	Suoh	269,57	1.771,64	12.915,64	64,66	
15.	Way Tenong	408,26	5.362,66	1.311,21	5.887,24	0,03
	Total	7.839,92	87.473,08	71.314,00	44.674,14	58,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan rendah dengan total luas 87.473,08 Ha. Jasa pengaturanrendah paling luas terdapat pada kecamatan Pagar Dewa dengan luas lebih dari 15.979,34 Ha. Sedangkan untuk jasa pengaturan tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh Kecamatan Batu Brak.

Gambar 2.28.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Penyerbukan Alami
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.6. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk hidup atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies *trigger* dan pengendali hama dan penyakit.

Tabel 2.25.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Tiap Kecamatan

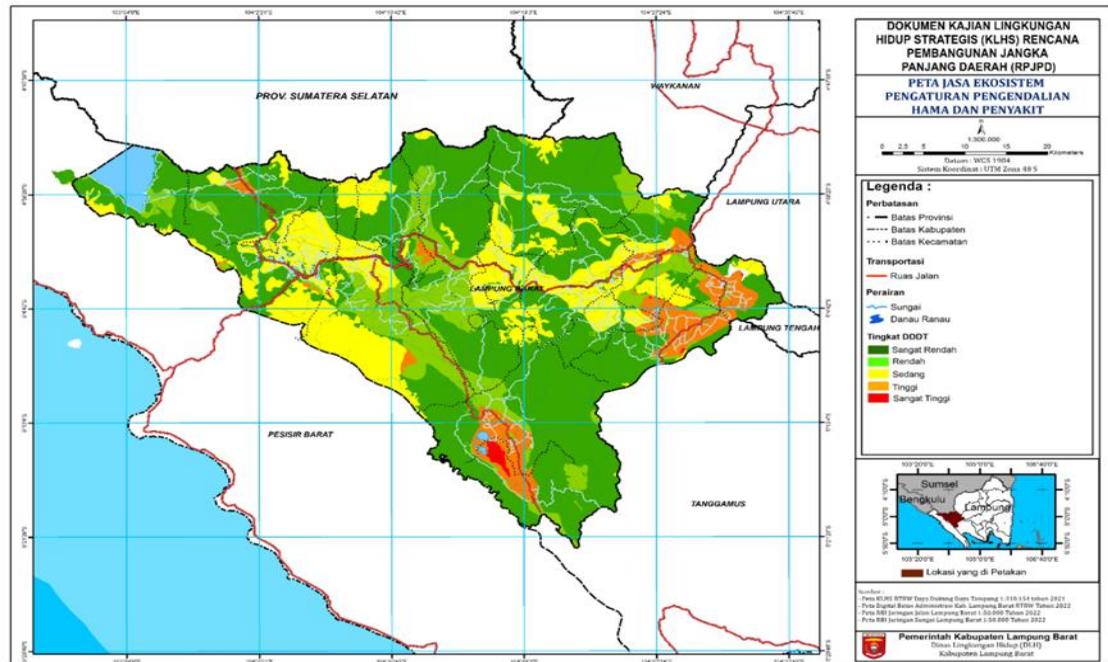
No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	7.484,27	424,29	2.031,79	854,08	17,97
2.	Balik Bukit	6.747,27	382,97	8.645,99	144,11	20,46
3.	BNS	18.909,81	4.840,29	200,71	2.691,32	81,21

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
4.	Batu Brak	3.042,59	5.884,05	10.729,94	270,25	2,20
5.	Batu Ketulis	10.641,51	6.098,54	1.369,50	91,88	
6.	Belalau	5.621,97	1.877,40	1.591,97	299,51	
7.	Gedung Surian	2.871,72	613,19	774,27	3.412,43	24,61
8.	Kebun Tebu	2.101,74	510,21	552,95	2.769,41	8,82
9.	Lumbok Seminung	7.868,14	1.213,67	719,87		
10.	Pagar Dewa	16.344,97	130,83	3.295,18		
11.	Sekincau	4.738,64	1.085,09	5.684,78		
12.	Sukau	10.704,96	739,09	2.618,59	544,30	
13.	Sumber Jaya	5.457,92	3.642,96	2.709,43	1.233,54	
14.	Suoh	11.017,97	1.428,01	58,39	1.998,99	518,15
15.	Way Tenong	6.514,60	390,55	5.879,81	184,43	
	Total	120.068,07	29.261,13	46.863,16	14.494,25	673,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan pengendalian hama dan penyakit di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan sangatrendah dengan total luas 120.068,07 Ha. Jasa pengaturansangat rendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 18 ribu Ha.

Gambar 2.29.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.7. Jasa Pendukung Siklus Hara

Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah, melalui proses penyerapan tumbuhan akan mengakumulasi zat hara tersebut dalam jaringan tumbuhan, kemudian pada proses alam tertentu seperti pengguguran daun atau ketika tanaman tersebut mati, zat hara yang terakumulasi akan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Tabel 2.26.
Luas Lahan Jasa Pendukung Siklus Hara Tiap Kecamatan

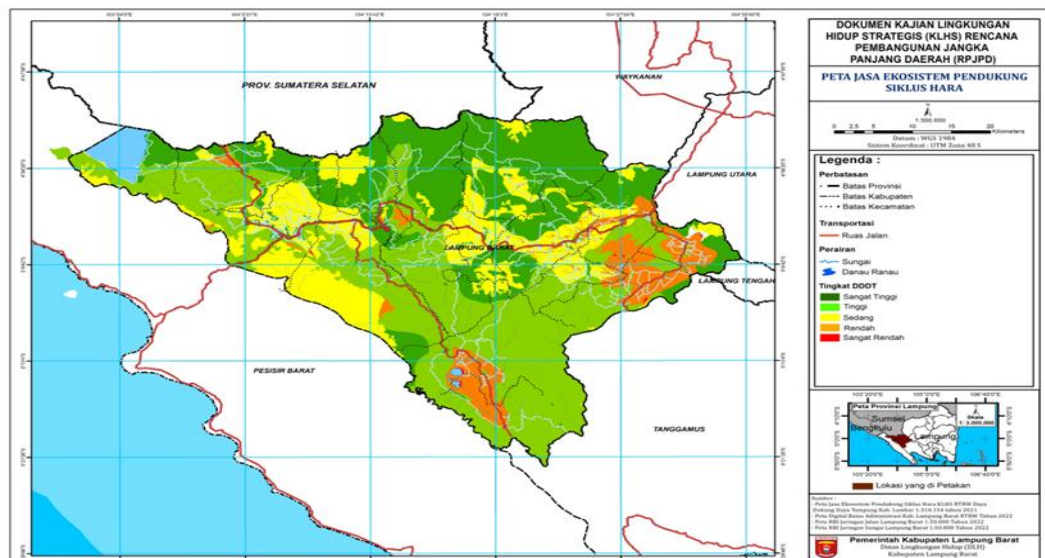
No	Kecamatan	Jasa Pendukung Siklus Hara (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	7.812,46	1.885,35	1.000,52	17,97
2.	Balik Bukit	2.417,04	4.713,21	8.645,99	144,11	20,46
3.	BNS	1.856,30	21.911,28	183,23	2.669,94	102,59

No	Kecamatan	Jasa Pendukung Siklus Hara (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
4.	Batu Brak	1.830,69	7.095,95	10.729,94	270,25	2,20
5.	Batu Ketulis	10.052,78	6.687,27	1.369,50	91,88	
6.	Belalau	5.270,29	2.229,07	1.546,61	344,87	
7.	Gedung Surian	527,80	2.957,11	73,10	4.113,60	24,61
8.	Kebun Tebu	2.028,50	583,44	552,95	2.769,41	8,82
9.	Lumbok Seminung	1.681,65	4.490,39	897,65	2.731,99	
10.	Pagar Dewa	16.425,59	50,21	3.257,25	37,93	
11.	Sekincau	3.211,21	2.612,51	5.684,78		
12.	Sukau	4.482,36	6.961,69	2.608,01	554,88	
13.	Sumber Jaya	7.087,67	2.013,21	1.995,67	1.939,85	7,45
14.	Suoh	666,73	11.783,90	53,75	2.407,60	109,54
15.	Way Tenong	5.786,07	1.119,08	5.268,37	795,84	0,03
	Total	63.420,76	83.020,79	44.752,15	19.872,66	293,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pendukung siklus hara di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pendukung rendah dengan total luas 83,020.79 Ha. Nilai jasa rendah paling luas berada diKecamatan Bandar Negeri Suoh.

Gambar 2.30.
Peta Jasa Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.7. Jasa Pendukung Pondasi Primer

Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembentukan oksigen dan karbon dalam bentuk glukosa melalui proses fotosintesis menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Ekosistem telah menyediakan komponen-komponen yang dapat mendukung keberlanjutan produksi primer tersebut seperti ketersediaan air hingga zat hara dalam tanah. Jasa ekosistem produksi primer tersebut akan bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan sebagai lokasi utama terjadinya fotosintesis.

Tabel 2.27.
Luas Lahan Jasa Pendukung Pondasi Primer Tiap Kecamatan

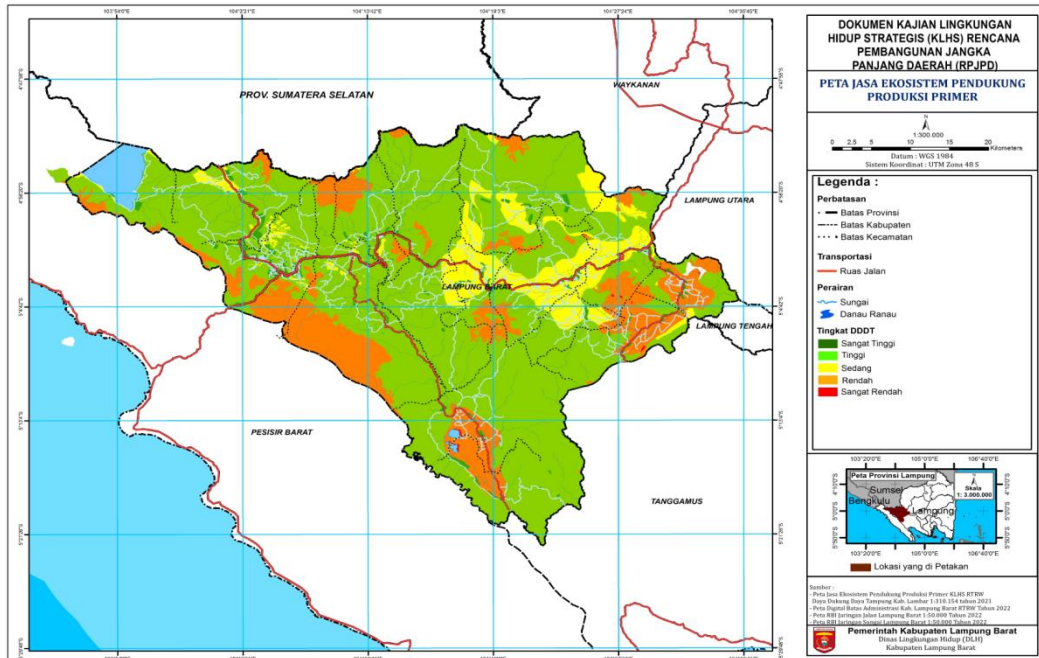
No	Kecamatan	Jasa Pendukung Pondasi Primer (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	7.812,46	1.999,62	886,25	17,97
2.	Balik Bukit	1.234,18	9.950,71	271,44	4.484,46	
3.	Bandar Negeri Suoh	188,96	23.578,62		2.853,17	102,59
4.	Batu Brak	321,12	11.050,61	305,77	8.251,52	
5.	Batu Ketulis	185,95	16.554,11	844,13	617,25	
6.	Belalau	228,05	7.242,81	211,88	1.708,11	
7.	Gedung Surian	184,54	3.270,27	205,95	4.010,83	24,61
8.	Kebun Tebu	223,89	2.387,84	171,19	3.151,39	8,82
9.	Lumbok Seminung	142,86	5.903,46	303,49	3.451,86	
10.	Pagar Dewa	356,17	15.988,79	2.708,69	717,33	
11.	Sekincau	336,88	5.486,84	3.716,36	1.968,43	
12.	Sukau	445,92	12.170,08	1.469,81	521,13	
13.	Sumber Jaya	208,08	6.802,33	4.718,69	1.307,30	7,45
14.	Suoh	269,57	12.176,08	4,97	2.461,35	109,54
15.	Way Tenong	408,26	6.488,53	5.002,84	1.069,75	0,03
	Total	4.830,51	146.863,55	21.934,83	37.460,12	271,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pendukung pondasi primer di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pendukung rendah dengan

total luas 146.863,55 Ha. Jasa pendukungrendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 23 ribu Ha.

Gambar 2.31.
Peta Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sangat ditentukan dengan kepatuhan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.28.
Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Belum

disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

Adanya komitmen sebagai kabupaten konservasi ini, merupakan bentuk dukungan Pemkab terhadap kebijakan Pemprov Lampung untuk mempertahankan seluruh kawasan hutannya. RTRW Lampung Barat berusaha mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan RTRW Provinsi, dan akan mengoptimalkan penggunaan kawasan di luar kawasan hutan dan lindung.

H.4.1 Efisiensi Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah khususnya sampah rumah tangga, masih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, khususnya penanganan sampah plastik. Hingga saat ini belum ada upaya-upaya untuk mendorong pengusahaan sampah menjadi bernilai ekonomi, atau yang dikenal dengan ekonomi sirkular.

Kebanyakan sampah dibuang ke badan-badan sungai, pekarangan, kebun, lahan pertanian, median jalan, dan kawasan hutan, serta dibakar.

Tabel 2.29.
Penanganan Sampah

Uraian	Tahun Dasar
	2022
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	66,74%

Pada tahun 2022, Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah sebesar 66,4%.

H.4.2 Efisiensi Ketahanan Energi

Secara garis besar isu strategis baik di bidang energi maupun kelistrikan adalah ketahanan energi (*energy security*) dan transisi energi (*energy transitions*). Permasalahan yang ada di bidang energi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk menghindari adanya krisis energi fosil di dunia merupakan solusi yang solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 2.30.
Indeks Ketahanan Energi

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Energi	6.57	6.59	6.60	6.61	6.70

Indeks ketahanan energi tingkat nasional pada tahun 2019 sebesar 6.57, lalu pada tahun 2020 sebesar 6.59, realisasi tahun 2021 sebesar 6.60, 6.61 tahun 2022, dan 6.70 pada tahun 2023. Data Indeks ketahanan energi tersebut hanya tersedia tingkat nasional, untuk data Provinsi dan Kabupaten tidak tersedia.

H.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : SIDIK, 2021.

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim

mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

H.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetik ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Prioritas utama kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pengelolaan kawasan hutan lindung maupun cagar alam, agar bisa terjaga dari campur tangan manusia yang cenderung merusak.

Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Tabel 2.32.
Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan

daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

Tabel 2.33.
Alih Fungsi Hutan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Alih Fungsi Hutan	3,3%	6,6 %	6,6 %	6,8 %	-

Tabel 2.34.
Luas lahan kritis (Ha)

2019		2020&2021	
Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Luas Lampung Barat	Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Luas Lampung Barat
7035	214278	14266,92	14278

Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialih- fungsikan menjadi lahan usaha lain.

Hal ini dilakukan karena populasi manusia yang bertambah, sehingga memerlukan lahan untuk membangun permukiman dan sarana penghidupannya. Demikian juga di Kabupaten Lampung Barat penambahan jumlah penduduk yang memerlukan tempat berusaha terutama lahan perkebunan dan pertanian memaksa masyarakat membuka lahan dan hutan.

adanya komitmen sebagai kabupaten konservasi ini, merupakan bentuk dukungan Pemkab terhadap kebijakan Pemprov Lampung untuk mempertahankan seluruh kawasan hutannya. RTRW Lampung Barat berusaha mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan RTRW Provinsi, dan akan mengoptimalkan penggunaan kawasan di luar kawasan hutan dan lindung.

Saat ini tidak sedikit hutan yang dimiliki Lampung Barat sudah rusak, dengan perubahan fungsi hutan. Sebagian besar alih fungsi tersebut adalah menjadi perkebunan kopi (fungsi budidaya). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemkab Lampung Barat melakukan beberapa upaya penanggulangan, termasuk kegiatan reforestrasi serta pemberian tapal batas kawasan hutan-hutan di Provinsi.

Tabel 2.35.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,82	71,94	62,04	68,31	70,55

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. yang Targetnya sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Pemantauan Kualitas Air bertujuan untuk memantau perubahan kualitas air di beberapa sungai yang menjadi titik sampling . Titik sampling sungai terdiri dari Way Warkuk, Way Besai, Way Semangka, Way Sindalpay, dan Way Umpu
Parameter yang diukur pada pengamatan kualitas air terdiri dari parameter fisika yaitu suhu air, suhu udara, kelembaban, Total Suspended Solid (TSS), dan Total Dissolved Solid (TDS) sedangkan parameter kimia antara lain Oxygen Demand (DO)/Oksigen terlarut, pH, Biologocal Oxygen (BOD), dan Chemical Oxygen Demand (COD).
- Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indeks Pencemaran Udara minimal mengacu pada 2 parameter dasar yaitu Nitrogen Oksidasi (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2). Selanjutnya indeks kualitas udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup Daerah II – 55 $\text{IKU} = 100 - [50/0,9 \times (\text{IEU} - 0,1)]$
Keterangan : IEU adalah rata SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ adalah 40 µg/m³ dan SO₂ adalah 20 µg/m³ Selanjutnya dapat diketahui kategori kualitas standar pencemar udara dengan membandingkan Kepmen LH No. 45 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.

Nilai Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan, tetapi terjadi penurunan yang sangat besar di tahun 2021 sebanyak 9.9 point. Dimana tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat sebesar 71.94 Point mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 62.04 Point hal ini disebabkan oleh adanya penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 sebesar 67.65 Point mengalami penurunan tahun 2021 sebesar 27.23 Point menjadi 0.42 Point. Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan beberapa factor salah satunya alih fungsi lahan yang marak terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Lampung Barat dan tidak terdatanya Sumber Daya Hutan yang masuk dalam kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) secara keseluruhan.

Nilai Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 pada sebesar 70.55 Point (dengan Predikat 'BAIK") dengan Nilai Indeks Kualitas Air sebesar 66.06 Point, Indeks Kualitas Udara sebesar 90.52 Point dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 41.33 Point. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang menurun disebabkan ada komponen IKL yang belum masuk data.

Tabel 2.36.
Penanganan Sampah

Uraian	Tahun Dasar
	2022
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	66,74%

Pada tahun 2022, Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah sebesar 66,74%.

Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan

dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : SIDIK, 2021.

Tabel 2.38.
Indeks Ketahanan Pangan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Pangan	74,62 %	74,02 %	70,80 %	74,34 %	75,39

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi menggunakan angka tetap 2022 dari BPS. Angka produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu dari Kementerian Pertanian. Data stok beras pemerintah daerah dari Badan Pangan Nasional.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya 4 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas 2022, BPS.

Jumlah pengguna listrik di Kabupaten Lampung Barat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan penyebarluasan penyediaan jaringan listrik oleh PLN serta keberadaan unit-unit Listrik mandiri milik masyarakat. Berdasarkan data dari BPS, Per Desember 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 79.289 pelanggan, di mana mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2022 yang sebanyak 70.321 pelanggan.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2022, BPS.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Sofiati 2010). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi et al. 2014). Sumber data berasal dari data Susenas 2022, BPS.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan

penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010; Sofiati 2010). Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 5 terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT et al. 2015). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari BPS.

Tabel 2.39.
Indeks Ketahanan Energi

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Energi	6.57	6.59	6.60	6.61	6.70

Secara garis besar isu strategis baik di bidang energi maupun kelistrikan adalah ketahanan energi (*energy security*) dan transisi energi (*energy transitions*). Permasalahan yang ada di bidang energi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk menghindari adanya krisis energi fosil di dunia merupakan solusi yang solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Indeks ketahanan energi tingkat nasional pada tahun 2019 sebesar 6.57, lalu pada tahun 2020 sebesar 6.59, realisasi tahun 2021 sebesar 6.60, 6.61 tahun 2022, dan 6.70 pada tahun 2023. Data Indeks ketahanan energi tersebut hanya tersedia tingkat nasional, untuk data Provinsi dan Kabupaten tidak tersedia.

Tabel 2.40.
Indeks Kualitas Air

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Air	52,11	65,00	65,14	58,34	66,06

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan yang didasarkan pada 7 parameter yaitu : coliform, TSS, BOD, DO, COD, Nitrat, Fosfat.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019-2021 mengalami kenaikan sementara di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 58,34. Hal tersebut diduga adanya penurunan pada kualitas air terutama parameter COD. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Barat mengalami Kenaikan menjadi 66.06 Point hal tersebut disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas air pada beberapa parameter seperti yang telah disebutkan sebelum terutama pada parameter pada parameter COD.

2.1.2. Aspek Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Jumlah Penduduk Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		KEPADATAN PENDUDUK PER Km ²
		Jumlah	%	Km ²	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	BALIK BUKIT	43.523	13,99	159,41	7,53	273,03
2	SUMBER JAYA	24.253	7,79	130,44	6,16	185,93
3	BELALAU	12.618	4,05	93,91	4,44	134,36
4	WAY TENONG	35.070	11,27	129,70	6,13	270,39
5	SEKINCAU	19.268	6,19	115,09	5,44	167,42
6	SUOH	18.840	6,05	150,22	7,1	125,42
7	BATU BRAK	15.327	4,92	199,29	9,42	76,91
8	SUKAU	25.801	8,29	146,07	6,9	176,63
9	GEDUNG SURIAN	17.207	5,53	76,96	3,64	223,58
10	KEBUN TEBU	21.390	6,87	61,55	2,91	347,52
11	AIR HITAM	12.492	4,01	108,12	5,11	115,54



No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		KEPADATAN PENDUDUK PER Km ²
		Jumlah	%	Km ²	%	
1	2	3	4	5	6	7
12	PAGAR DEWA	17.071	5,48	197,71	9,34	86,34
13	BATU KETULIS	13.744	4,41	182,01	8,6	75,51
14	LOMBOK SEMINUNG	8.608	2,76	98,88	4,67	87,06
15	BANDAR NEGERI SUOH	25.778	8,28	267,23	12,63	96,46
JUMLAH		310.990	100,00	2.116,59	100	146,93

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024

Tabel 2.42.
Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
DKB II 2022	DKB II 2023	
308.159	310.990	0,91%

Tabel 2.43.
Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2023

Jumlah Penduduk	310.990
Penduduk Produktif	214.958
Non Produktif	96.032
Angka Ketergantungan Penduduk	44,67

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2.44.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,18	-1,16	2,58	4,10	4,69

Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami Kontraksi sebesar -1,16% sehingga mengakibatkan Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2020 turun sebesar 4,92 triliun rupiah. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan dari 4,98 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,16 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,20 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,10% kemudian meningkat menjadi 4,69% pada tahun 2023.

INDEKS GINI

Indeks gini Kabupaten Lampung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2019 – 2023 menunjukkan trend penurunan dengan nilai indeks gini tahun 2019 sebesar 0,296 dan turun menjadi 0,274 pada tahun 2023. Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat termasuk kategori rendah yang menunjukkan kecenderungan meratanya pendapatan di masyarakat, hal ini dimungkinkan karena wilayah Lampung Barat sebagian besar adalah perdesaan dengan mayoritas pekerjaan penduduk Lampung Barat adalah pada sektor pertanian yaitu petani pada tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan yang masih didominasi pengelolaannya secara tradisional sehingga dimungkinkan tidak terdapat perbedaan yang terlalu timpang antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 2.45.
Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 - 2023

Tahun	Poin
2019	0.296
2020	0.295
2021	0.281
2022	0.284
2023	0.274

Sumber: BPS Lampung Barat, 2024

KEMISKINAN

Salah satu indikator yang penting adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34.700 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

Tabel 2.46.
Data Kemiskinan

No.	Judul Data	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Miskin	39,36	36,2	34,73
2	Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rp/Kap/Bulan)	457.478	495.283	530.803
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,8	0,45	0,8
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,69	1,89	2,34
5	Persentase Penduduk Miskin	12,82	11,71	11,17

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tabel 2.47.
Perkembangan TPT Kabupaten Lampung Barat

URAIAN	2021	2022	2023
TPT	2,83%	2,10%	2,25%

Sumber : BPS, Tahun 2023

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Tabel diatas menunjukkan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2023. Pengangguran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 2,25%.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. IPM Kabupaten Lampung Barat pada

tahun 2023 berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin.

Tabel 2.48.
Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020)	2022	2023
1	Lampung Barat	71,01	71,72
2	Provinsi Lampung	71,79	72,48

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu tolok ukur dalam pencapaian pembangunan untuk kesejahteraan Sosial Budaya adalah terkait pencapaian pada sektor kesehatan. Hasil pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dapat diukur dari salah satu pencapaian komponen IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).

UHH Kabupaten Lampung Barat meningkat dari tahun ke tahun sepanjang kurun waktu tahun 2019 – 2023, dengan nilai UHH 67,43 tahun termasuk kategori medium di tahun 2019 dan di tahun 2023 mencapai 73,78 tahun yang masuk dalam kategori tinggi. Pencapaian yang sangat signifikan di tahun 2023 disebabkan adanya perbedaan tahun pengukuran yaitu untuk periode tahun 2019 – 2022 perhitungan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sedangkan UHH tahun 2023 hasil perhitungan Sensus Penduduk Tahun 2020 di mana telah terdapat perubahan yang sangat berpengaruh yang dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang berdampak pada pencapaian yang cukup tinggi terhadap penurunan AKB.

Tabel 2.49.
UHH Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 - 2023

Tahun	UHH (Tahun)
2019	67,43
2020	67,58
2021	67,65
2022	67,90
2023	73,78

Sumber: BPS Lampung Barat, 2024

Angka Kematian Ibu

Tabel 2.50.
Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2019	69,1/100.000 KH
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH
2022	36,1/100.000 KH
2023	38,04/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Pencapaian Target Angka Kematian Ibu di bawah 110 / 100.000 KH (realisasi 38,04) masuk dalam kategori Sangat Baik, menjadi indikator bahwa program dan kegiatan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di tahun 2023 yang berkaitan dengan pelayanan. Kesehatan Ibu dan Anak telah menunjukkan hasil yang memuaskan, kondisi ini terlihat dengan rendahnya kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Tabel 2.51.
Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
AKI	69,1	72,4	145,6	36,1	38,04
kasus kematian ibu	4 kasus	4 kasus	8 kasus	2 kasus	2 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Adanya Bidan Pekon dan Perawat Pekon di hampir seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan AKI selain itu program bimbingan teknis terkait kesehatan ibu dan anak juga memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama secara tepat dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga kasus kematian ibu pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 2 kasus.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.52.
Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2019	3.63/1.000 KH
2020	2.90/1.000 KH

Tahun	Angka Kematian Bayi
2021	4,55/1.000 KH
2022	1,1/1.000 KH
2023	2,28/ 1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Dari table Angka Kematian Bayi di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 kasus kematian bayi yaitu 8 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 11 kasus. Angka lebih rendah jika dibandingkan dengan target 3,9 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi disebabkan antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, atresiani, megacolon, abortus dan cardinal anest cc pendarahan intracranial, gagal nafas dan syok.

Tabel 2.53.
Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
AKB	3,6	2,9	4,55	1,1	2,28
Kasus Kematian Bayi	21 kasus	16 kasus	25 kasus	8 kasus	11 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Pencapaian target Angka Kematian Bayi sesuai target indikator adalah sebesar 3,9 / 1.000 KH. Sepanjang tahun 2023 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5258 dengan kasus kematian bayi sebanyak 11 kasus, dan 9 diantaranya masih berusia 0-28 hari (AKN).

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Tabel 2.54.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Kasus Balita Gizi Buruk	2	1	1	1	0
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	2	1	1	1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Berdasarkan tabel cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus Balita Gizi Buruk pada tahun 2023 yakni sebanyak 0 kasus, maka capaian cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan telah mencapai 100%. Jumlah kasus Balita

dengan Gizi Buruk menunjukkan penurunan dalam periode 5 tahun terakhir dan di tahun 2023 tidak terdapat kasus balita gizi buruk.

Tabel 2.55.
Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
1	2019	22,23%	27,7%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019
2	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
3	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021
4	2022	16,6%	21,6%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022
5	2023		16 %	SKI Belum Rilis

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Capaian keberhasilan peningkatan gizi di masyarakat salah satunya adalah terkait capaian prevalensi *stunting* pada anak balita. Pada tabel di atas menunjukkan keberhasilan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya penurunan *stunting*. Di mulai dari tahun 2019, hasil SSGI menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 22,23% kemudian sedikit meningkat di tahun 2021, namun berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka *stunting* di Lampung Barat turun menjadi 16,6%. Sedangkan hasil survey untuk tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan.

A. PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator program masing-masing jenis penyakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indikator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini

- TBC

Tabel 2.56.

Angka Penemuan BTA (+) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2019	279	996	28,01	92%
2	2020	207	980	20.9	91,47%
3	2021	230	530	43,39%	91,43%
4	2022	423	1.094	38,67%	94,72%
5	2023	427	1151	41,36%	94,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Penanganan TBC berfokus pada penemuan kasus baru, jika dilihat dari data tahun 2019 – 2023 temuan kasus baru menunjukkan peningkatan, hal ini sejalan dengan target penemuan kasus yang juga ditargetkan meningkat sejak tahun 2022. Sementara itu untuk capaian CDR juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian pada 2 (dua) tahun pertama yaitu tahun 2019 dan 2020.

- HIV

Tabel 2.57.

Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KUMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2019	1	6	0	-
2020	3	9	0	-
2021	1	10	0	-
2022	2	12	1	-
2023	2	14	1	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Salah satu upaya penanganan HIV adalah dengan penyediaan layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan, pada tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat sudah membentuk 12 Layanan PDP HIV. PDP HIV adalah layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) untuk dapat mengakses terapi Anti Retro Viral (ARV). Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan HIV bagi penderita HIV di Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2023, jumlah total penderita HIV di Lampung Barat adalah sebanyak 14 kasus, kasus baru ditemukan setiap tahunnya dengan kasus baru tertinggi terdapat di tahun 2020

sebanyak 3 kasus baru. Adapun jumlah kematian sebanyak 2 kasus kematian dari total 14 kasus HIV di Lampung Barat.

- DBD

Tabel 2.58.
Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat
TAHUN 2018 – 2023

No	Puskesmas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumber Jaya	0	16	0	0	0
2	Gedung Surian	2	1	0	0	1
3	Fajar Bulan	7	8	0	1	0
4	Sekincau	1	6	0	4	0
5	Srimulyo	0	2	0	0	0
6	Kenali	3	1	0	0	0
7	Batu Brak	8	4	1	1	0
8	Liwa	22	29	9	22	28
9	Buay Nyerupa	25	15	2	5	28
10	Lombok	7	2	0	0	5
11	BNS	0	0	0	0	1
12	Pagar Dewa	3	4	0	0	0
13	Kebun Tebu	5	5	1	0	0
14	Air Hitam	2	0	0	0	1
15	Batu Ketulis	10	3	0	4	4
Kabupaten		95	96	13	37	69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Kasus DBD secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022, meskipun temuan kasus di tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2020, namun jumlah kasus tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun 2021 dan 2022.

- MALARIA

Tabel 2.59.
Angka Insidens Malaria Per Diobati Per Mil Penduduk Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2019– 2023

No	TAHUN	API
1.	2019	0,015
2.	2020	0
3.	2021	0
4.	2022	0
5.	2023	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Lampung Barat berhasil mempertahankan status eliminasi Malaria dengan tidak adanya kasus Malaria yang terkonfirmasi mikroskopis semenjak tahun 2020.

- **PENYAKIT KECACINGAN**

Tabel 2.60.
Capaian Pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 – 2023

NO	PUSKESMAS	2019	2020	2021	2022	2023
1	SUMBER JAYA	100,00	100,00	100%	100%	100 %
2	BUNGIN	73,28	100,00	100%	100%	99,9 %
3	FAJAR BULAN	100,00	100,00	100%	100%	101,42 %
4	SEKINCAU	100,00	100,00	101,86%	100%	100 %
5	SRIMULYO	99,64	99,69	99,69%	99,32%	90,52 %
6	KENALI	99,01	98,99	98,84%	161%	100 %
7	BATU BRAK	100,00	100,00	100%	100%	100 %
8	LIWA	133,18	103,31	100%	100%	100 %
9	B. NYERUPA	100,00	100,00	100%	100%	99,54 %
10	LOMBOK	86,14	106,13	89,69%	95,38%	91,87 %
11	B.N.SUOH	100,00	100,00	100%	100%	100 %
12	PAGAR DEWA	100,64	100,00	100%	100%	100 %
13	KEBUN TEBU	100,00	97,33	99,71%	100%	100 %
14	BATU KETULIS	99,84	100,00	99,01%	100%	100,26 %
15	AIR HITAM	100,00	100,00	100%	100%	97,76 %
	KABUPATEN	101,77	99,94	99,26%	101,5%	99.42 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

- **PENYAKIT TIDAK MENULAR**

Tabel 2.61.
Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Hipertensi	18.864	Gastritis	6049	Hipertensi	17.221
Diabetes Mellitus	3.022	Hipertensi	5436	Penyakit Jantung Koroner	305
Obesitas	1.891	Influenza	4828	Gagal Jantung	382
Asma Bronkiale	676	Diabetes Mellitus Tipe II	2411	Diabetes Melitus	3.320
Kecelakaan Lalin	623	Artritis reumatoid	2311	Obesitas	5.035
Osteoporosis	222	Dyspepsia	1847	Penyakit Tiroid	73
Penyakit jantung	122	Myalgia	1816	Stroke	



RPJPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2045

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
coroner					144
PPOK	97	Common Cold	1494	Asma Bronchiale	538
Stroke	80	Dermatitis Kontak Alergi	1356	SLE	-
Gagal jantung	64	Skabies	1151	Thalasemia	6
Cedera Lain	27	Vertigo	1061	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	265
Penyakit tiroid	20	Diare	953	Osteoporosis	1
Cedera akibat KDRT	9	ISPA	890	Ginjal Kronik	21
Tumor payudara	6	Bronkitis Akut	759	Tumor Payudara	12
Ginjal kronik	3	Migrain	662	Retinoblastoma	2
Kanker serviks	2	Kehamilan Normal	518	Leukimia	1
Leukimia	2	Persistensi Gigi Sulung	516	Kanker Serviks	-
SLE	1	Asma bronkial	513	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	628
		Demam Typoid	444	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
		CHF	403	Cedera Akibat Lain	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Selain penyakit menular, Kabupaten Lampung Barat saat ini juga sudah harus memberikan perhatian pada kasus penyakit tidak menular yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Di tahun 2023, 5 (lima) penyakit tidak menular tertinggi adalah: Hipertensi, penyakit jantung coroner, gagal jantung, diabetes melitus, dan obesitas. Trend kenaikan kasus penyakit degenerative ini dapat disebabkan karena telah terjadinya perubahan pola hidup di masyarakat yang cenderung memiliki perilaku kurang sehat.

Universal Health Coverage (UHC)

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berupaya secara intensif agar dapat mencapai cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage (UHC)*. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mencapai UHC dengan nilai cakupan peserta sebesar 96,34%.

Tabel 2.62.
Capaian UHC Jaminan Kesehatan

SEGMENT PESERTA (Jiwa)	KAB. LAMPUNG BARAT	AKTIF	NON AKTIF	KEAKTIFAN
APBD LB	29.925	27.566	2.359	92,12%
APBD PROV	13.367	6.529	6.838	48,84%
APBN	183.307	126.827	56.480	69,19%
BP PN	2.404	2.154	250	89,60%
BP Swasta	15	6	9	40,00%
PBPU	38.916	6.466	32.450	16,62%
PPU BU	9.770	6.715	3.055	68,73%
PPU PN	20.796	19.507	1.289	93,80%
TOTAL (A)	298.500	195.770	102.730	
Jumlah Penduduk (B)	309.554			
Cakupan (A/B x 100%)	96,43%			
Keaktifan (Aktif/B x 100%)	63,24%			

Sumber: BPJS Kesehatan, 2024

Literasi dan Numerasi

Dalam konteks perkembangan dunia global yang menempatkan informasi dan big data pada posisi fundamental dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Kemendikbud (2016) memaknai literasi, khususnya di sekolah, sebagai “kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas.” Dengan demikian, literasi sangat berkaitan dengan kapasitas manusia untuk menggunakan berbagai sumber daya demi kehidupan yang berkualitas. Adapun literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk: (a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

Saat ini literasi dan numerasi merupakan komponen utama dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti Ujian Nasional. Dalam AKM, kapasitas siswa diukur terkait dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), selain kemampuan bernalar

menggunakan bahasa (literasi) dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen terkait pencapaian Literasi dan Numerasi di setiap tingkat pendidikan dimulai di tahun 2021.

Berikut adalah pencapaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 3 tahun terakhir:

Tabel 2.63.
Rerata Nilai Literasi dan Numerasi SD SMP
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,64	51,94	65,27	75,52
2	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,49	38,49	46,29	65,59
3	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.58	62,52	67,81	71,09
4	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,57	55,01	47,31	68,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Perhitungan literasi dan numerasi dimulai tahun 2021, pada awal perhitungan ini penilaian dilakukan dengan rentang nilai antara 1 – 10, di tahun 2022 dan selanjutnya, penilaian dilakukan dengan rentang nilai 10 – 100. Dengan demikian terdapat perbedaan besaran nilai yang didapat antara tahun 2021 dan tahun berikutnya.

Pembangunan Pemuda

Tabel 2.64.
Indeks Pembangunan Pemuda

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Pemuda	61,04	60,63	62,59	63	61,34

Sumber : Dinas Pora pariwisata 2023

Indeks pembangunan pemuda memiliki Lima Domain Yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan Kesejahteraan
3. Lapangan dan Kesempatan Kerja
4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Gender dan Diskriminasi

Perhitungan indeks pembangunan pemuda di Lampung Barat berdasarkan persentase akumulatif dari kelima domain diatas dari berbagai sumber data diantaranya, SIPD Dinas Pendidikan, Data Badan Pusat Statistik Lampung Barat, Indeks Kesehatan Keluarga Lampung Barat dari dinas Kesehatan, dan dari Bidang pemberdayaan Perempuan Dinas KBPPPA Lampung Barat, serta yang utama dari database Bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat.

Untuk tahun 2020 indeks pembangunan pemuda mengalami penurunan disebabkan imbas dari Covid-19 yang mengakibatkan penurunan terbesar pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, secara umum indeks pembangunan pemuda di Lampung Barat yang berpartisipasi memberikan nilai terendah yakni pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini berdasarkan data yang ada pada Bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata disebabkan karena keterbatasan kesempatan bagi pemuda untuk mengisi zona-zona kepemimpinan dikarenakan batasan usia 16-30 tahun yang merupakan usia belajar.

IPP ini angkanya didapat dari eksternal pemuda yang mempengaruhi ke "nyamanan". Eksternal pemuda itu sendiri terdiri dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, Kemudian perhatian orang tua serta kondisi di lingkungan sekitar.

Untuk indeks pembangunan pemuda ini nilainya harus terus bertambah atau minimal tidak turun, karena jika nilai IPP turun khususnya di Kabupaten Lampung Barat maka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat Juga mengalami Penurunan, dan mempengaruhi pembangunan kabupaten lampung barat.

Pada nilai IPP domain partisipasi dan kepemimpinan ini mempunyai nilai yang rendah dibanding dengan empat domain lain, maka dari itu perlu adanya program/kegiatan sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan nilai di domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda, yang merupakan kegiatan pokok dibidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, seperti contoh kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, pertukaran pemuda serta jambore pemuda dan kepemimpinan pemuda.

Jika nilai pada domain partisipasi dan kepemimpinan ini mempunyai nilai yang rendah maka hal ini akan berdampak buruk bagi pemuda di kemudian hari, apalagi pemuda akan dihadapkan pada tantangan besar bonus demografi pada tahun 2030, kalangan pemuda dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah akan bertemu dengan penduduk muda lain dengan kualifikasi tinggi, dipasar kerja yang menyusut karena dampak dari pandemi.

Maka dari itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini bidang kepemudaan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata untuk membentuk pemuda yang ada di Kabupaten Lampung Barat Menjadi Pemuda yang mandiri dan dapat berdaya saing. Oleh karena itu program/kegiatan menjadi hal yang harus di prioritaskan jika ingin pemuda yang dapat berdaya saing guna menyongsong Kabupaten Lampung Barat Hebat dapat terwujud.

Pembangunan Perempuan

Tabel 2.65.

Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
IPG (%)	93,00	93,4	93,4
IDG (%)	69,14	65,92	65,92

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk

menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 IPG 93 Point, capaian ini mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.66.
Indeks Ketimpangan Gender

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketimpangan Gender	0,575	0,526	0,495	0,505	-

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara Perempuan dengan laki-laki dalam dimensi Kesehatan reproduksi , pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian Pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Nilai IKG 0 s/d 1 , semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan semakin rendah atau kesetaraan yang tinggi yang semakin membaik.

Dengan Nilai IKG lampung Barat tahun 0,505 , hal ini mencerminkan kegagalan / kerugian / ketidak optimalan pencapaian Pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkoreksi sebesar 50,5 % . Dan dibandingkan tahun 2021 ketimpangan ini mengalami kenaikan 1 %.

Penyebab kesenjangan gender di dunia kerja :

1. Tingkat Pendidikan
2. Pengalaman kerja
3. Budaya Patriaki
4. Tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga
5. Stigma bahwa Perempuan lebih tidak produktif

Pembangunan Pekon

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan desa di Kabupaten Lampung Barat adalah Pekon.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 131 pekon dan 5 kelurahan. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM), sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten yang memiliki jumlah desa dengan status Mandiri terbanyak se-Provinsi Lampung. Perubahan status pekon meningkat setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 – 2023

No	Status	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mandiri	2	10	40	47	51
2.	Maju	30	44	61	63	64
3.	Berkembang	85	76	30	21	16
4.	Tertinggal	14	1	-	-	
5.	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	
	Jumlah	131	131	131	131	131

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2023 masih terhitung cukup rendah dengan nilai cakupan kepesertaan sebesar 11,08%. Perhitungan ini didapatkan dari menghitung nilai perbandingan antara total peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (20.533 jiwa) terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja di seluruh sektor lapangan pekerjaan (185.269 jiwa). Dengan rincian kepesertaan sebagai berikut:

Tabel 2.68.
Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2023

No.	Peserta	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1.	ASN	4.300	
2.	Non ASN	548	
3.	Aparatur Pekon	1.697	118 pekon
4.	Swasta	12.988	Dari 57 perusahaan swasta
5.	Pekerja Rentan	1.000	Masuk dalam kategori Desil 1

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Barat atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 9,01 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 738 milyar rupiah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,27 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami kenaikan menjadi 5,26 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 5,50 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 perekonomian Lampung Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan menjadi 4,69 persen.

Kontribusi terbesar pembentukan PDRB ADHB tahun 2023 disumbangkan melalui Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,43% dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,33% selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,57%.

Tabel 2.69.

PDRB Kabupaten Lampung Barat (dalam miliar rupiah)

Uraian	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Lapangan Usaha				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,822.55	4,006.94	2,401.31	2,410.84
Pertambangan dan Penggalian	193.57	217.88	117.12	127.83
Industri Pengolahan	417.93	445.35	249.39	255.53
Pengadaan Listrik dan Gas	1.16	1.25	0.96	1.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.32	8.36	5.54	5.49
Konstruksi	360.18	399.24	237.75	257.19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,200.87	1,382.24	759.40	836.35

Uraian	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
Transportasi dan Pergudangan	266.67	354.51	159.30	188.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.54	123.87	62.23	69.71
Informasi dan Komunikasi	253.68	276.34	217.18	234.94
Jasa Keuangan dan Asuransi	155.07	164.35	88.89	92.48
Real Estate	341.11	352.56	238.47	240.57
Jasa Perusahaan	13.89	14.63	9.07	9.20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	515.80	592.22	313.43	354.71
Jasa Pendidikan	360.65	381.88	224.53	229.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.44	126.77	78.08	79.83
Jasa lainnya	139.22	169.58	95.66	111.28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,279.65	9,017.95	5,258.30	5,504.98

Sumber : BPS

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Sektor Ekonomi

Indikator	Tahun 2023		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,69%	4,55%	5,05%
PDRB per Kapita	28,86 juta	48,19 juta	75,00 juta

2.3.2 Daya Saing SDM

Kewirausahaan

Tabel 2.71.
Rasio Kewirausahaan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Rasio Kewirausahaan	3,85%	4,13%	4,67%	5,12%	5.8%

Rasio kewirausahaan adalah jumlah wirausaha baru ditambah dengan wirausaha mapan dibandingkan dengan jumlah partisipasi angkatan kerja dalam satu tahun. Wirausaha baru adalah jumlah wirausaha baru yang terdata pada sistem pendataan UMKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan wirausaha mapan adalah wirausaha yang memiliki usaha yang berjalan dan berkelanjutan.

UMKM adalah semua pelaku usaha baik disektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri pengolahan maupun sektor usaha lainnya yang memiliki skala usaha berdasarkan PP 7 tahun 2021.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rasio kewirausahaan di Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah yakni dibawah angka 6%. Meskipun terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya namun masih sangat jauh dari kondisi ideal, dimana kemajuan ekonomi sebuah wilayah sangat bergantung dari seberapa besar pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang diwilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas perlu dirumuskan sebuah kebijakan yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan dimasyarakat, bukan hanya kebijakan yang dibidang ekonomi, namun kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan penyiapan sumber daya manusia yang siap untuk berwirausaha dan memiliki daya saing usaha untuk memajukan ekonomi daerah.

Keluarga Sehat

Tabel 2.72.
Indeks Keluarga Sehat

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Keluarga Sehat	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,27 %	0,27 %

Indeks keluarga sehat pada tahun 2023 sebesar 0,27% sama dengan capaian tahun sebelumnya, upaya peningkatan indeks keluarga sehat terus ditingkatkan tiap tahunnya melalui berbagai program dan kegiatan.

ANGKA PARTISIPASI KASAR

Tabel 2.73.
Angka Partisipasi Kasar

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	APK SD	109,14	108,35	99,63
2	APK SMP	83,29	86,00	105,51
3	APK SMA	75,76	71,07	92,13
4	APK PAUD	18,85	19,33	21,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 APK SD sebesar 109,14 persen, APK SMP sebesar 83,29 persen dan APK SMA sebesar 75,76 persen. Pada tahun 2022 APK SD Sebesar 108,35 Persen, APK SMP Sebesar 86,00 Persen dan APK SMA Sebesar 71,22 Persen, sedangkan

pada tahun 2023 APK SD sebesar 99,63 persen, APK SMP sebesar 105,51 persen dan APK SMA sebesar 92,13 persen. Dari tahun 2022 dan 2023 APK SD mengalami penurunan akan tetapi masih dikatakan tercapai dikarenakan menurut Inpres Nomor 5, Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang secara nasional rata-rata mencapai nilai sekurang-kurangnya 95% dalam hal ini APK SD Kabupaten Lampung Barat mencapai 99,63 persen atau diatas rata-rata target pencapaian Nasional. hal ini dikarenakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Sedangkan untuk APK PAUD dilihat dari table pada tahun 2021 sebesar 18,85, tahun 2022 sebesar 19,33 dan pada tahun 2023 sebesar 21,33 atau mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, APK PAUD Lampung Barat masih rendah masih dibawah capaian Propinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 32,42%, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus menggerakkan Masyarakat agar dapat berpartisipasi 100% anak usia 3-6 tahun menempuh pendidikan anak usia dini.

ANGKA PARTISIPASI MURNI

Tabel 2.74.
Angka Partisipasi Murni

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	APM SD	99,41	99,02	93,54
2	APM SMP	78,99	81,90	80,48
3	APM SMA	61,22	55,18	65,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Angka partisipasi murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah disbanding angka partisipasi kasar karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Angka partisipasi murni SD pada tahun 2023 adalah sebesar 93,54 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 persen penduduk usia 7-12 tahun terdapat sejumlah 93,54 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Angka partisipasi murni SMP pada tahun 2023 adalah sebesar 80,48 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 persen penduduk usia 13-15 tahun terdapat sejumlah 80,48 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah

menengah pertama. Angka partisipasi murni SMA tahun 2023 sebesar 65,09 persen, hal ini menggambarkan bahwa dari 100 persen penduduk usia 16-18 tahun terdapat sejumlah 65,09 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Angka partisipasi murni Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk jenjang SD, SMP mengalami ketidak konsistenan. Angka partisipasi murni jenjang SD dan SMP pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 hal ini menandakan bahwa proporsi anak yang bersekolah di sekolah dasar tidak sesuai proporsinya. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Tabel 2.75.
Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	RLS	8,07 tahun	8,20 tahun	8,36 tahun

Sumber: BPS, 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dengan usia 25 tahun ke atas. Sampai dengan tahun 2023, RLS Lampung Barat adalah sebesar 8,36 tahun sehingga dapat dijelaskan bahwa penduduk Lampung Barat usia 25 tahun ke atas tahun rata-rata pendidikan tertingginya hanya sampai dengan SMP kelas 3. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Lampung dengan capaian 8,29 tahun. Upaya untuk meningkatkan RLS telah dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan non formal bagi masyarakat umum setiap tahunnya, namun yang menjadi kendala selama ini adalah masih sangat rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal melalui pendidikan Kejar Paket A, B dan C. Rendahnya minat masyarakat tersebut dapat disebabkan karena penduduk usia 25 tahun ke atas tersebut tidak menjadikan status pendidikannya sebagai prioritas karena mereka lebih berfokus pada pekerjaannya sebagai mata pencaharian sehari-hari.

HARAPAN LAMA SEKOLAH

Tabel 2.76.
Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	HLS	12,26	12,27	12,29

Sumber: BPS, 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah yang diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS Lampung Barat tahun 2023 sebesar

12,29 tahun yang berarti bahwa penduduk Lampung Barat diperkirakan akan dapat menempuh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tahun pertama perguruan tinggi. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Lampung yang sebesar 12,77 tahun. HLS juga menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses di Kabupaten Lampung Barat baik oleh penduduk Lampung Barat ataupun penduduk dari luar Lampung Barat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk dapat meningkatkan minat masyarakat setempat dan pendatang untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.77.
Indeks Minat Baca Masyarakat

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Minat Baca Masyarakat	-	-	-	67,365	76,901

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat belum melakukan survey indeks minat baca, survey tersebut mulai dilakukan pada tahun 2022. Berdasarkan survey indeks minat baca yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 didapatkan hasil realisasi sebesar 67,365 maka indeks minat baca tersebut termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, dari data tahun 2023 terjadi peningkatan survey indeks minat baca yang telah mendapatkan hasil realisasi sebesar 76,901 maka indeks minat baca tersebut dalam kategori tinggi.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 82,01% turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.78.
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun
2010-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,09	79,53	83,48	83,23	83,17	82,01

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Barat pada 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Pemerintah daerah melalui urusan tenaga kerja menghadapi tantangan dalam peningkatan komitmen dan rasa tanggung jawab aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, diperlukan sistem reward and

punishment untuk meningkatkan tanggung jawab atas capaian keberhasilan dan kualitas pekerjaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan tenaga kerja. Masalah SDM juga dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja, di mana dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional.

Persoalan yang berkaitan dengan kualitas SDM salah satunya adalah berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja di Lampung Barat. Tabel berikut menunjukkan status pendidikan pada penduduk angkatan kerja (penduduk bekerja dan pengangguran terbuka) dan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 2.79.
Status Pendidikan Tenaga Kerja Lampung Barat Tahun 2023

Status Pendidikan	Angkatan Kerja (org)	Bekerja (org)	Pengangguran Terbuka (org)	Bukan Angkatan Kerja (org)
Jumlah	189.541	185.269	4.272	41.588
SD ke bawah	79.584 (41,99%)	78.915 (42,59%)	669 (15,66%)	13.990 (33,64%)
SMP sederajat	41.040 (21,65%)	40.563 (21,89%)	477 (11,17%)	17.756 (42,7%)
SMA sederajat	55.648 (29,36%)	52.761 (28,48%)	2.887 (67,58%)	9.211 (22,15%)
Perguruan Tinggi	13.269 (7%)	13.030 (7,03%)	239 (5,6%)	631 (1,52%)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa status pendidikan tertinggi angkatan kerja di Lampung Barat adalah dengan pendidikan SD ke bawah, diikuti oleh pendidikan SMA sederajat, selanjutnya pendidikan SMP sederajat dan terakhir pendidikan perguruan tinggi. Demikian juga halnya dengan status pendidikan untuk penduduk bekerja sama halnya dengan penduduk angkatan kerja. Namun untuk penduduk dengan status pengangguran terbuka, pendidikan SMA sederajat memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 2.887 (67,58%) dari 4.272 penduduk pengangguran terbuka.

Dengan angkatan kerja berstatus pendidikan SD ke bawah memiliki jumlah tertinggi maka menjadi suatu hal yang sejalan dengan mayoritas mata pencaharian penduduk di Kabupaten Lampung Barat yang didominasi oleh lapangan usaha sektor informal dalam hal ini pada sektor pertanian.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Tabel 2.80.
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	-	-	-	76,12

Sumber data : BPS Tahun 2023

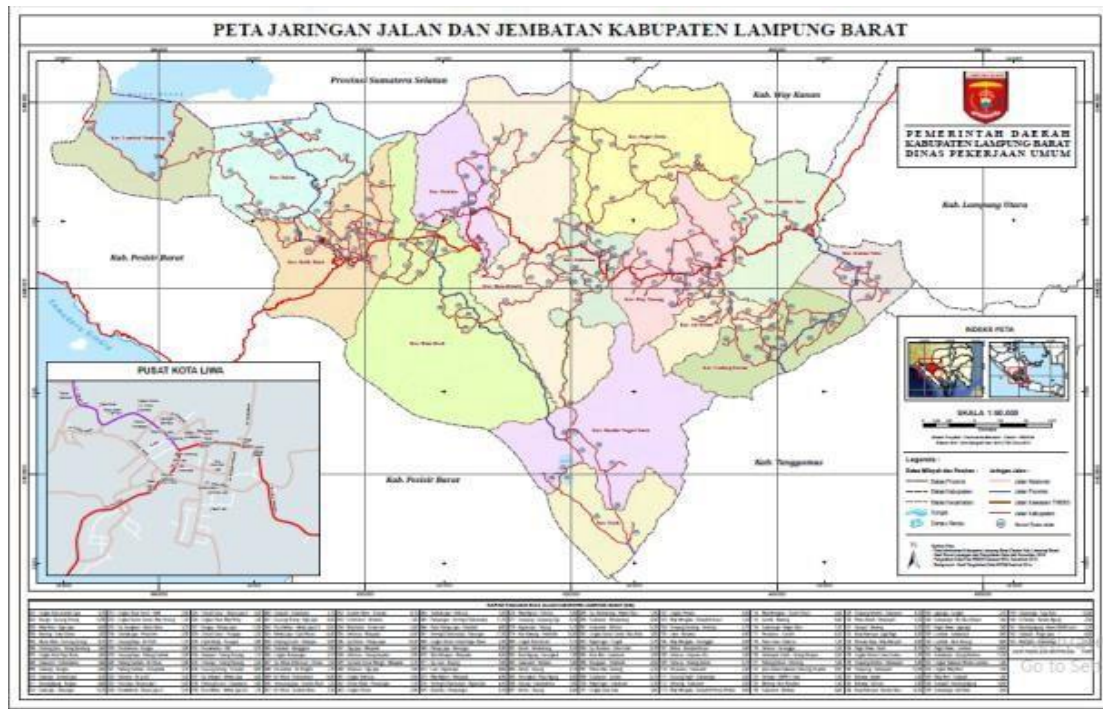
Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

2.4.3.1. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan adalah dua infrastruktur penting dalam transportasi. Jalan adalah suatu tempat yang memungkinkan kendaraan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jalan dapat dibangun di atas tanah, beton, maupun aspal. Sedangkan jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh air, lembah, atau jalan yang tidak dapat dilalui.

Kedua infrastruktur ini sangat penting dalam memfasilitasi aktivitas manusia seperti transportasi barang dan manusia. Jalan dan jembatan juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena memungkinkan transportasi yang efisien dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, jalan dan jembatan juga memungkinkan orang untuk mengakses sumber daya alam seperti pertanian dan kehutanan.

Gambar 2.32.
Peta Jaringan Jalan dan Jembatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, 2024

Jalan raya di Kabupaten Lampung Barat dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan dan hirarki. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan berhubungan dengan aspek pengelolaan sedangkan kategori hirarki dikaitkan dengan fungsi jalan.

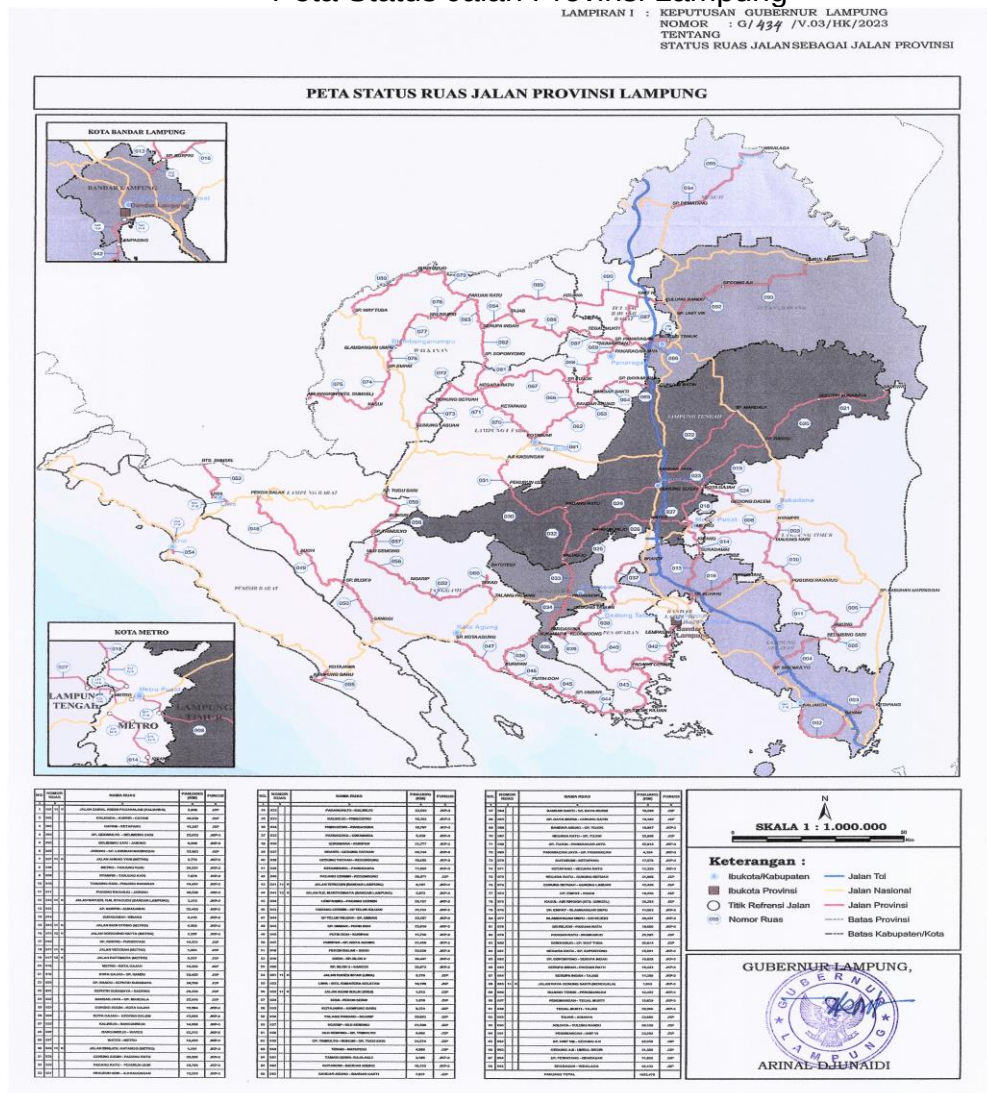
2.4.3.1.1 Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang. Jalan nasional memiliki fungsi sebagai penghubung antar kota dan antar provinsi yang penting dalam mendukung mobilitas barang dan jasa serta kegiatan ekonomi nasional. Jalan nasional juga memiliki peran penting dalam mendukung pertahanan keamanan nasional karena dapat digunakan sebagai jalur pengiriman logistik ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jalan nasional memiliki standar yang ditentukan oleh pemerintah, seperti lebar jalan dan bahu jalan yang sesuai dengan kebutuhan volume lalu lintas serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan raya seperti marka jalan, rambu lalu lintas, lampu penerangan, dan lain-lain. Kabupaten Lampung barat terdapat beberapa jalan nasional diantaranya; Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lintas Timur, dan Jalan Raya Lintas Barat.

2.4.3.1.2. Jalan Provinsi

Jalan Provinsi yakni jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antar-kota atau antar-kabupaten dalam satu provinsi. Di Lampung Barat terdapat beberapa ruas jalan provinsi sesuai dengan SK Gubernur Lampung Nomor :g/434/V.03/HK/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 sepanjang 112,937 Km yang tersebar di 5 ruas.

Gambar 2.33.
Peta Status Jalan Provinsi Lampung



Tabel 2.81.
Panjang dan Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Data dasar subbidang jalan									
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Panjang tiap kondisi (Km)				Jalan Mantap
					Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	(%)
					(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	048	Pekon Balak - Suoh	Batu Brak/BNS	33,63	28,31	1,60	0,20	3,52	88,94
2	049	Suoh - Blok 9	BNS	30,45	15,71	3,13	0,00	11,61	61,88
3	051	Jalan Raden Intan (Liwa)	Balik Bukit	5,18	4,18	1,00	0,00	0,00	100,00
4	052	Liwa - Batas Sumatera Selatan	Balik Bukit/Sukau	19,11	12,50	6,00	0,20	0,41	96,81
s5	059	Sp. Trimulyo - Bungin - Sp. Tugusari	Gedung Surian/Kebun Tebu/Sumber Jaya	24,57	18,77	5,80	0,00	0,00	100,00
		A. Total Panjang Jalan (Km)		112,937	79,471	17,530	0,400	15,536	85,89

Tabel 2.82.
Jenis Perkerasan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Data dasar subbidang jalan										
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan			Panjang tiap jenis permukaan					Ket
			Kecamatan	Panjang	Rigid	Hotmix	Lapen	Agregat	Telford	
			yang dilalui	Ruas (km)						
					(Km)	(Km)	(Km)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	048	Pekon Balak - Suoh	Batu Brak/BNS	33,63	17,37	13,54	-	-	2,72	-
2	049	Suoh - Blok 9	BNS	30,45	7,87	18,8	-	-	3,73	-
3	051	Jalan Raden Intan (Liwa)	Balik Bukit	5,18	-	5,18	-	-	-	-
4	052	Liwa - Batas Sumatera Selatan	Balik Bukit/Sukau	19,11	-	19,11	-	-	-	-
5	059	Sp.Trimulyo - Bungin - Sp. Tugusari	GedungSurian/Kebun Tebu/Sumber Jaya	24,57	-	23,67	-	-	-	-
		A. Total Panjang Jalan (Km)		112,937	26,142	80,348	-	-	6,447	-

2.4.3.1.2. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten mengacu pada jalan yang menghubungkan antara kota atau desa yang berada dalam satu cakupan wilayah kabupaten Lampung Barat. Jalan di Kabupaten Lampung Barat dikelola dan dipelihara oleh pemerintah setempat, sesuai dengan SK Bupati Lampung Barat Nomor :B/ 323 /KPTS/III.03/2023 tahun 2023 Panjang jalan Kabupaten 668,90 km 140 tersebar di 147 ruas dengan jenis bahan permukaan pembuat jalan yang bervariasi, diantaranya Aspal, beton, kerikil dan tanah.

Tabel 2.83.
Jenis perkerasan Jalan Kabupaten di Lampung Barat

KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	JENIS PERKERASAN (KM)				
		HOTMIX (Km)	Lapen / Makadam (Km)	Perkerasan Beton (Km)	Telford / Kerikil (Km)	Tanah/ Belum Tembus (Km)
SUMBER JAYA	26,40	14,66	2,08	6,64	2,51	0,51
SUOH	12,50	0	10,78	1,19	0,53	0
KEBUN TEBU	20,18	12,06	3,3	3,61	0,88	0,33
GEDUNG SURIAN	45,20	27,25	6,74	9,24	0,49	1,48
BNS	19,20	0	9,99	4,555	5,35	0,81
AIR HITAM	36,40	10,31	4,66	12,35	2,3	6,78
WAY TENONG	67,80	23,25	3,68	27,63	4,41	8,84
LUMBOK SEMINUNG	27,50	23,98	1	1,02	0,00	0,00
BELALAU	44,80	13,10	4,72	13,85	8,65	4,48
SEKINCAU	49,05	19,22	3,14	13,72	9,17	3,80
BALIK BUKIT	90,87	34,87	10,00	20,29	14,79	10,92
PAGAR DEWA	42,10	10,12	0,07	19,88	2,25	9,78
SUKAU	78,40	16,79	5,014	25,863	22,751	7,982
BATU KETULIS	68,40	14,54	9,8	11,63	5,73	26,7
BATU BRAK	40,10	7,808	5,73	11,297	4,395	10,87
JUMLAH	668,90	227,96	80,70	182,76	84,20	93,28

Tabel 2.84.
Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota	724	724	724	Km
1. Kondisi Baik	354,04	216,915	214,015	Km
2. Kondisi Sedang	124,52	205,148	208,418	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	133,68	64,182	62,882	Km
4. Kondisi Rusak Berat	111,76	237,775	238,685	Km
2. Panjang Jalan Desa	382,46	382,6	382,46	Km
1. Kondisi Baik	151,528	157,661	161,923	Km
2. Kondisi Sedang	26,91	26,91	26,91	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	28,1	28,1	28,1	Km
4. Kondisi Rusak Berat	175,922	169,789	165,527	Km
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota				Km
1. Di Aspal	338,855	332,938	309,59	Km
2. Di Beton	199,959	187,637	181,83	Km
3. Kerikil	61,781	77,322	73,16	Km
4. Tanah	121,066	126,103	102,80	Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota	180	180	196	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik	144	144	144	Unit
2. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Sedang	26	26	24	Unit
3. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan	3	3	2	Unit
4. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat	7	7	26	Unit
2. Jumlah Jembatan Desa	3	3	3	Unit



Jalan dan Jembatan		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik		3	3	3	Unit
4	Kondisi Jalan Mantap	66,10	72,69	57,42	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Pembangunan jalan / jembatan pada umumnya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan penumpang ke tempat tujuan di kota-kota yang dilalui atau yang dituju secara cepat, mudah, dan menyenangkan serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat ditekan. Kebutuhan akan prasarana jalan/jembatan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan faktor penunjang lancarnya perekonomian. Mengingat kondisi sarana jalan yang ada saat ini banyak kerusakan baik diakibatkan faktor alam, maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan sehingga perlu diadakan perbaikan dan peningkatan guna memenuhi kebutuhan lalu lintas yang makin tinggi. Di dalam proses perencanaan sebagai pedoman untuk pelaksanaan perlu diperhatikan faktor-faktor, seperti kenyamanan, keamanan, lingkungan serta faktor lain yang mendukung perencanaan lebih matang dan terencana. Pada tahun 2023 kenaikan jalan dalam kondisi mantap sebesar 1,45 %. Untuk jalan desa mengalami peningkatan jalan kondisi baik sebesar 4,262 kilometer.

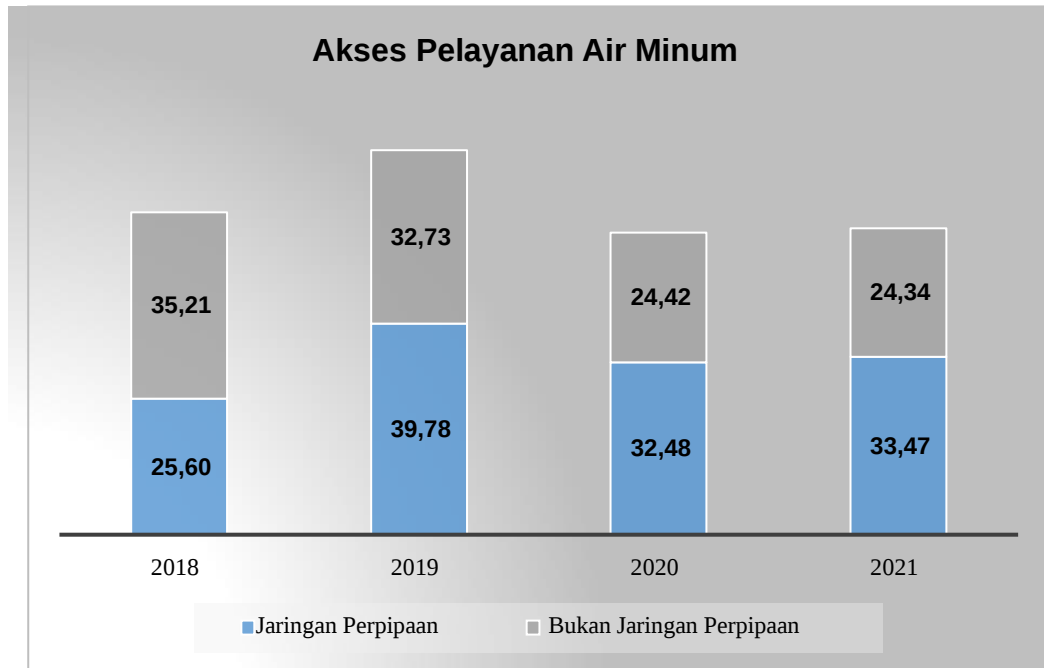
2.4.3.2. Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Lampung Barat saat ini dipenuhi melalui sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Limau Kunci dan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAM) yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Selain dua sistem tersebut, akses air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat didapat secara individu melalui air sumur gali terlindungi, air sumur pompa dan Hidran Umum.

Cakupan pelayanan keseluruhan air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat saat ini baru melayani sekitar 86.736 jiwa atau 28,54 % dari total jumlah penduduk daerah administrasi Kabupaten Lampung Barat yaitu 303.931 jiwa

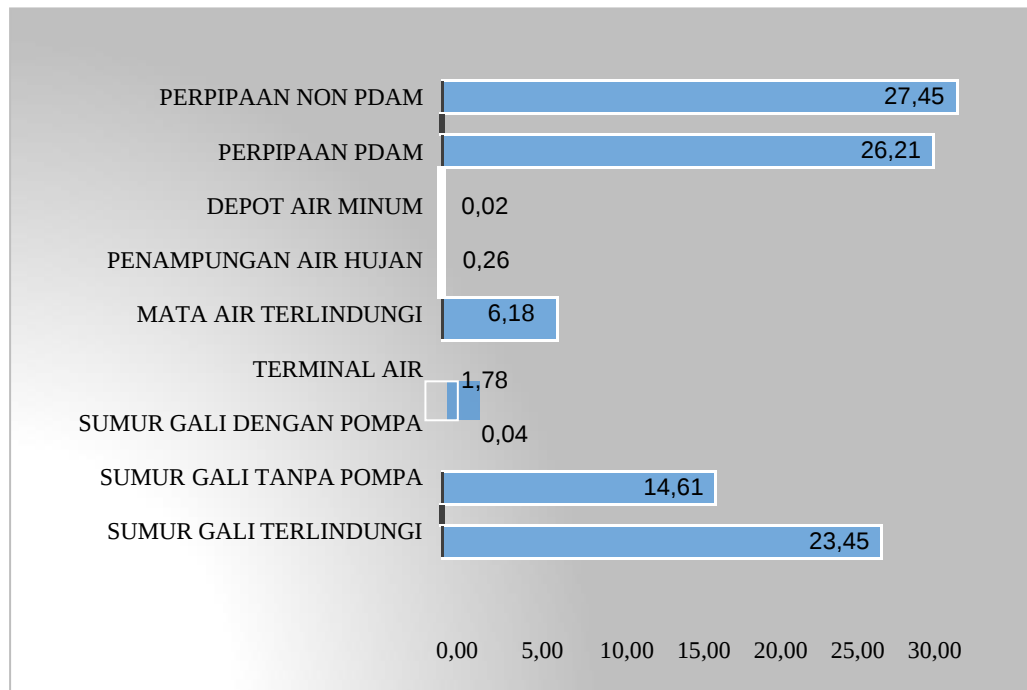
Gambar 2.34.

Grafik Akses Pelayanan Air Minum (Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan) Kabupaten Lampung Barat



Gambar 2.35.

Grafik Pemanfaatan Air Bersih Kabupaten Lampung Barat



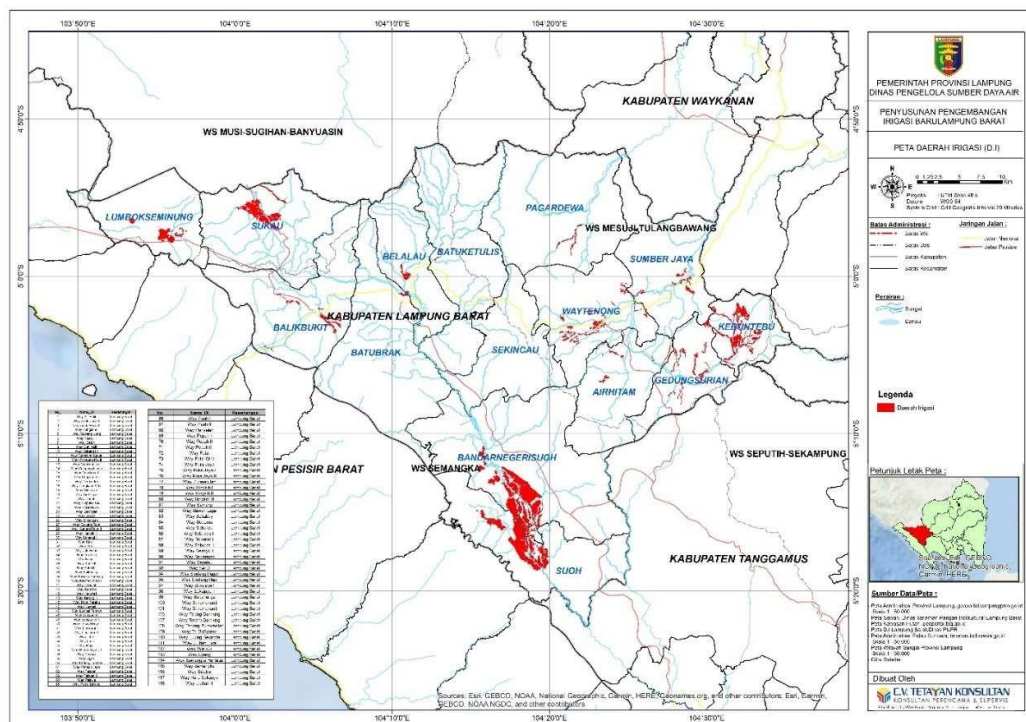
2.4.3.1. Irigasi

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi menjelaskan tentang pembagian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan luasan areal persawahan yang dilayani oleh jaringan irigasi tersebut, yaitu : luas areal sampai dengan 1000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, luas areal 1000 – 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, luas areal diatas 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Gambar 2.36.

Peta Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2023

Tabel 2.85.
Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	D.I. Way Air Putih	100	60	D.I. Way Padang Tambak	96
2	D.I. Way Anak Besay I	100	61	D.I. Way Pahayu Jaya	37
3	D.I. Way Anak Besay II	60	62	D.I. Way Pakuan	104
4	D.I. Way Bangkenol	220	63	D.I. Way Pakuan II	5
5	D.I. Way Bawang Ujung	200	64	D.I. Way Palakia	200
6	D.I. Way Besay II	15	65	D.I. Way Pama Blidang	36
7	D.I. Way Beton	50	66	D.I. Way Pauh I	45
8	D.I. Way Buni Asih	100	67	D.I. Way Pauh II	75
9	D.I. Way Buyuk	250	68	D.I. Way Penyelan	14
10	D.I. Way Cabang III	100	69	D.I. Way Pepuh I	53
11	D.I. Way Campang Kanan	100	70	D.I. Way Pepuh II	43
12	D.I. Way Campang Kanan Kecil	43	71	D.I. Way Pepuh III	140
13	D.I. Way Campang Kiri	75	72	D.I. Way Petai	16
14	D.I. Way Campang Limau	124	73	D.I. Way Petai Cina	200
15	D.I. Way Cangkaan I	75	74	D.I. Way Pura Jaya	19
16	D.I. Way Cangkaan II	17	75	D.I. Way Pura Jaya I	98
17	D.I. Way Cempedak	160	76	D.I. Way Pura Jaya II	196
18	D.I. Way Cengkaan Kelat	75	77	D.I. Way Purawiwitan	39
19	D.I. Way Cilamaya	95	78	D.I. Way Ringkih I	73
20	D.I. Way Dingin	75	79	D.I. Way Ringkih II	81
21	D.I. Way Durian	50	80	D.I. Way Ringkih III	75
22	D.I. Way Empulau Ulu	12	81	D.I. Way Samang	444
23	D.I. Way Fajar Bulan	8	82	D.I. Way Sawah Lega	116
24	D.I. Way Gadingan	100	83	D.I. Way Sebabuy	150
25	D.I. Way Giham	55	84	D.I. Way Sebarus	12
26	D.I. Way Gintungan	24	85	D.I. Way Sebukau I	62
27	D.I. Way Gunung Raya	150	86	D.I. Way Sebukau II	35
28	D.I. Way Gunung Raya II	5	87	D.I. Way Seburas I	20
29	D.I. Way Hantatai I	31	88	D.I. Way Seburas II	22
30	D.I. Way Hantatai II	14	89	D.I. Way Selingkut	172
31	D.I. Way Haru I	582	90	D.I. Way Seluangan	100
32	D.I. Way Heni	300	91	D.I. Way Sepalau	19
33	D.I. Way Jati Wangi	80	92	D.I. Way Serut	25
34	D.I. Way Jelatong	97	93	D.I. Way Sidomulyo	94
35	D.I. Way Kabul I	22	94	D.I. Way Sindang Pagar	81
36	D.I. Way Kabul II	5	95	D.I. Way Sindang Reja	25

Tabel 2.86.
Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan

Jaringan Irigasi/Pengairan		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis		126.371	126.371	126.371	Meter
	1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
	1. Saluran Kondisi Baik	70.368	70.835,94	71.874,57	Meter
	2. Saluran Kondisi Sedang	18.752,5	21.366,97	21.366,97	Meter
	3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	10.097,5	7.514,26	6.475,53	Meter
	4. Saluran Kondisi Rusak Berat	27.153,5	26.653,38	26.653,93	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi		118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis		5425,2	5.425,2	5.425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis		11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan air di persawahan maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air di persawahan ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Untuk irigasi, pengertiannya adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar yakni seefisien dan seefektif mungkin agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada panjang saluran irigasi kondisi baik sebesar 1.038,63 meter

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Tabel 2.87.
Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	2,56	2,91

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrument pengukuran daya saing daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dan dilakukan secara komprehensif.

IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Pengukuran IDSD awalnya diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi pada Tahun 2017 hingga tahun 2021. Mulai tahun 2022, pengukuran IDSD dilaksanakan oleh BRIN.

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Sumber investasi secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sampai dengan saat ini belum ada penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk mendorong pertumbuhan investasi dapat dilaksanakan salah satunya dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan kemudahan dalam pengurusan perizinan sehingga dapat menarik pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat dan . Berikut adalah gambaran perkembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat, jumlah pelaku usaha/investor yang berinvestasi serta data perizinan berusaha berbasis resiko tahun 2023.

Tabel 2.88.
Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	USAHA SKALA UMK/Non UMK	USAHA SKALA BESAR	TOTAL INVESTASI	TARGET INVESTASI
2020	52.433.256.674	61.050.718.877	113.483.975.551	85.000.000.000
2021	24.845.725.422	88.075,816.767	112.921.542.189	90.000.000.000
2022	3.807.500.000	257.223.287.770	261.030.787.440	95.000.000.000
2023	2.100.940.000	117.604.358.159	119.705.298.159	95.000.000.000

Sumber: Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.89.
Pencapaian Kinerja Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	624	282	17	
Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp.	113.483.975.551,-	112.921.542.189,-	261.030.787.440,-	119.705.298.159,-
Jumlah Unit Usaha	Perusahaan	624	282	17	

Sumber: Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.90.
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun 2023

No	SEKTOR / URUSAN	JUMLAH KBLI BERDASARKAN RISIKO				
		Resiko Rendah	Resiko Menengah Rendah	Resiko Menengah Tinggi	Resiko Tinggi	Total
1	Perikanan	7	37	1	8	53
2	Pertanian	83	82	78	20	263
3	Lingkungan Hidup	-	-	3	2	5
4	Perindustrian	242	158	70	48	518
5	Perdagangan	237	-	-	1	238
6	Transportasi	-	2	21	-	23
7	Kesehatan	-	15	6	7	28
8	Pariwisata	51	20	-	-	71
9	Ketenagakerjaan	17	-	16	1	34
10	Pos, Telekomunikasi Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik	-	-	1	-	1
11	Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	11	-	11
	Total	637	314	207	87	1.245

Sumber Data : Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.91.
Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	67.46	72.39	84.06	84.06	89.58

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama tersebut, tampaknya mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling membantu dan bekerjasama dalam keberagamaan.

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu antara lain nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas.

Pada masyarakat Lampung Barat pemahaman toleransi beragama merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki dalam menjalankan hidup, karena agama merupakan suatu kendali atas perbuatan yang akan dilakukan baik sekarang maupun yang akan datang. Sampai dengan saat ini masyarakat Lampung Barat sangat menjunjung nilai-nilai kerukunan oleh karenanya kondisi wilayah Lampung Barat masih relative kondusif, aman dan tentram, Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh salah satu universitas negeri di Provinsi Lampung yang memberikan penilaian dengan nilai indeks kerukunan umat beragama Sangat Tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2019 memperoleh nilai 67,46 sedangkan pada pelaksanaan survey terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 89,58.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Tabel 2.92.
Indeks Pelayanan Publik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pelayanan Publik	belum	belum	3.46	4.07	belum

Tahun 2021

Perangkat daerah yang menjadi sampel Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2021 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 3.59 kategori B (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) namun belum sesuai dengan PermenPANRB No. 15 Th. 2014; b. SP disusun tanpa melibatkan masyarakat dan pihak terkait; c. SKM yang dimiliki belum sesuai dengan PermenPANRB No.14 Th. 2017 dan belum disusun rencana tindak lanjut sebagai bahan evaluasi perbaikan UPP dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya; d. Agar dibuat antrian secara elektronik dan online dan terintegrasi terutama dimasa pandemi ini.
2.	Profesionalisme SDM	a. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan; b. Kode etik disarankan untuk dilengkapi dengan klausul yang mengatur tentang hak, penjatuan sanksi, dan pemberian penghargaan; c. Agar ada regulasi yang mengatur pemberian penghargaan.
3.	Sarana Prasarana	a. Agar menyediakan fasilitas parkir yang bersih bagi kelompok rentan; b. Fasilitas ruang tunggu agar ditambah fasilitas charging box, arena bermain anak, dan monitor antrian; c. Fasilitas toilet agar memisahkan pria dan

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		wanita serta dijaga kebersihannya; d. Sarana dan prasarana yang sudah tersedia agar dilakukan pemeliharaan sehingga tetap bersih, aman dan nyaman; e. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus agar mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggurannya.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Sistem Informasi Pelayanan Publik disarankan untuk disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional; b. Pemutakhiran data yang telah dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik; c. Informasi non elektronik disarankan untuk dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik dan <i>stakeholder</i> terkait.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>); b. Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
6.	Inovasi	a. Inovasi disarankan untuk dilakukan evaluasi kebermanfaatan kepada masyarakat dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik; b. Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh Indeks 3.32 kategori B- (baik dengan catatan) dan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	a. SP yang disusun agar melibatkan masyarakat dan dilakukan reuiu secara berkala; b. Hasil SKM yang sudah dilakukan agar disusun rencana tindak lanjut beserta

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		<i>time table</i> penyelesaian serta dilakukan monitoring dan evaluasi; c. Perlu dibuat antrian <i>online</i> dan terintegrasi terutama di masa pandemi ini.
2.	Profesionalisme SDM	a. Belum tersedianya informasi bagi petugas layanan terkait posisi jabatan, masa kerja, pendidikan formal, diklat, dan sertifikat; b. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan; c. Pemberian penghargaan agar dapat dilakukan secara rutin; d. Kode etik yang ada belum memuat tentang klausul larangan diskriminasi.
3.	Sarana Prasarana	a. Fasilitas parkir bagi kelompok rentan agar disediakan; b. Fasilitas ruang tunggu agar dioptimalkan dengan menambah fasilitas: TV, AC, pojok baca, air minum, hotspot/wifi, charging box; c. Sarana dan prasarana penunjang agar ditambah dengan menyediakan arena bermain anak dan foto copy; d. Fasilitas bagi kelompok rentan agar disediakan yang meliputi: ruang tunggu, loket, toilet, step lobby/tamp; e. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan dan berkebutuhan khusus agar mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggarannya.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Sistem Informasi Pelayanan Publik disarankan untuk disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional; b. Pemutakhiran data yang telah dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik; c. Informasi non elektronik yang telah dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik, <i>stakeholder</i>, dan kantor pemerintahan untuk dapat tetap

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		dipertahankan.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>); b. Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
6.	Inovasi	a. Inovasi disarankan untuk lebih digali kembali dan konsisten untuk diterapkan secara berkelanjutan; b. Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.

Sehingga pada tahun 2021 diperoleh Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Barat $(3.59+3.32)/2 = 3.46$ dengan kategori B- (Baik dengan catatan)

Tahun 2022

Perangkat daerah sampel Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 4.07 kategori A- (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Agar Standar Pelayanan ditinjau ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan minimal 1 Tahun sekali atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. b. Agar tindak lanjut SKM yang telah dianalisis dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan kebijakan perbaikan layanan.
2.	Profesionalisme SDM	a. Agar ada penambahan waktu layanan

No	ASPEK	REKOMENDASI
		di luar hari kerja namun secara rutin. b. Agar peraturan tentang kode etik dilakukan revisi kembali dikarenakan kode etik masih belum lengkap dan belum memasuki klausul yang mengatur tentang hak, penjatuhan sanksi, dan pemberian penghargaan. c. Agar dibuatkan Surat Keputusan atau regulasi penetapan bagi pegawai yang mendapatkan penghargaan tersebut.
3.	Sarana Prasarana	a. Perlu ditunjuk petugas parkir untuk menjaga di area parkir. b. Penitipan jaket/helm harus tersedia untuk kenyamanan.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Agar SIPP selalu dilakukan pemutakhiran data dan informasi kamal digital dan dalam pembaharuan data, informasi dan aplikasi yang disajikan dalam situs unit pelayanan.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi dan pengaduan sarana belum pernah mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>). b. Agar rubrik konsultasi dan pengaduan dibuatkan dokumentasi dan arsip agar proses konsultasi pengaduan yang telah dilakukan dapat menjadi reprensi baik oleh masyarakat maupun unit penyelenggara pelayanan publik.
6.	inovasi	Inovasi disarankan untuk dilakukan evaluasi kebermanfaatan kepada masyarakat dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 3.97 kategori B (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Agar penyusunan SP melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM.

No	ASPEK	REKOMENDASI
		b. Agar dilakukan perbaikan sistem antrian secara elektronik, nomor antrian ditampilkan (di layar antrian), dibagi setiap jenis layanan atau dikelompokkan bagi setiap jenis layanan serumpun. c. Agar dibuatkan rencana tindak lanjut laporan SKM dan dipublikasikan.
2.	Profesionalisme SDM	Agar diberikan informasi tentang dokumentasi informasi posisi, masa kerja pendidikan formal.
3.	Sarana Prasarana	a. Agar disediakan monitor antrian, <i>charging box</i> hotspot/wifi. b. Agar sarana penunjang lainnya dilengkapi dengan fasilitas arena bermain anak. c. Agar toilet pria/wanita dapat dipisahkan dan fasilitas toiletres dilengkapi. d. Agar disediakan <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus disabilitas, loket khusus, petugas khusus dan kursi roda.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu setiap minggu.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	Agar hasil konsultasi dan pengaduan dapat diarsipkan dan dipublikasikan.
6.	Inovasi	Agar inovasi pelayanan yang telah berjalan dan dilaksanakan, dilakukan evaluasi secara berkala.

Sehingga pada tahun 2022 diperoleh Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Barat $(4.17+3.97)/2 = 4.07$ dengan kategori A- (Sangat Baik)

Tabel 2.93.
Indeks Inovasi Daerah

No.	Tahun	Peringkat	Capaian Indeks Inovasi Daerah	
			Nilai	Kategori
1.	2019	25	12.500	Sangat Inovatif
	2020	6	11.288	Terinovatif
	2021	5	62,8	Sangat Inovatif
	2022	14	65,39	Sangat Inovatif
	2023	31	61,46	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2024

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dalam hal peringkat dan nilai, namun secara kategori masih masuk dalam kategori sangat inovatif. Kategori sangat inovatif berada pada interval nilai 60 – 100.

Jumlah Inovasi yang dilaporkan pada Tahun 2023 ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah inovasi yang dilaporkan sebanyak 271, tahun 2022 sebanyak 192, dan tahun 2023 sebanyak 126 inovasi. Makin berkurangnya jumlah inovasi yang dilaporkan kedalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

- Sedikitnya inovasi-inovasi baru di Perangkat Daerah, inovasi yang ada baru berupa pembaharuan-pembaharuan dari inovasi yang telah ada sebelumnya;
- Kualitas eviden menurun, eviden banyak yang tidak lengkap;
- Menurunnya semangat perangkat daerah dalam pelaporan inovasi daerah.

Tabel 2.94.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	1,91	2,26	2,75

Digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi membangun sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip *Data-Driven Government*. Untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik prima dan pembangunan SPBE yang optimal, dibutuhkan pula pembangunan sumber daya manusia serta kerangka kelembagaan yang dapat mengakomodir tata kelola transformasi digital di sektor pemerintahan. Kehidupan masyarakat akan mengarah sepenuhnya ke era digital.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen

SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 1,91 dengan predikat cukup, dengan urutan ke lima se-Provinsi Lampung.

Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 2,26 dengan predikat cukup, dengan urutan ke lima se-Provinsi Lampung.

Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 2,75 dengan predikat Baik , dengan urutan ke Tujuh se-Provinsi Lampung.



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2020 s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.121.507.601.470	1.036.843.069.935,00	1.035.041.046.662	988.918.708.180	1.091.795.802.539,0
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.728.304.508	69.535.239.033,00	73.660.779.843	65.358.127.413	67.738.029.191,00
1.1.1	Pajak Daerah	11.555.032.178	11.953.787.464,00	13.038.206.178	14.986.447.574	16.111.675.421,00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.350.705.973	5.882.330.230,00	2.289.310.896	2.403.681.111	2.338.534.672,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.431.364.507	4.757.968.413,00	6.623.153.836	5.653.827.321	5.653.827.320,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.391.201.850	46.941.152.926,00	51.710.108.933	42.314.171.407	43.633.991.778,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	811.938.611.060	932.064.831.002,00	961.380.266.819	923.560.580.767	1.024.057.773.348,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	811.938.611.060	858.522.085.000,00	885.434.520.817	850.778.668.525	950.422.205.500,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah		73.542.746.002,00	75.945.746.002	72.781.912.242	73.635.567.848,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		35.242.999.900,00			
1.3.1	Hibah	40.902.044.900				
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	75.506.856.002				
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.431.785.000				
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		35.242.999.900,00			



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2	BELANJA DAERAH	1.147.457.240.969	1.064.443.069.935,00	1.112.536.131.046	1.017.174.385.750	1.096.792.411.919,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	603.957.494.409				
2.1.1	Belanja Pegawai	389.784.516.085				
2.1.4	Belanja Hibah	17.035.908.400				
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000				
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1.590.573.900				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	192.928.581.683				
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.367.914.341				
2.2	BELANJA LANGSUNG	543.499.746.560				
2.2.1	Belanja Pegawai	63.024.388.154				
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	268.954.472.332				
2.2.3	Belanja Modal	211.520.886.074				
2.1	BELANJA OPERASI		740.715.111.187,00	753.345.910.113	723.908.191.300	763.658.896.869,00
2.1.1	Belanja Pegawai		434.859.973.448,00	439.557.838.884	432.656.812.843	469.862.442.476,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		276.166.226.367,00	286.861.840.345	254.637.081.677	250.846.781.189,00
2.1.3	Belanja Bunga			3.964.805.812	3.720.929.625	3.720.929.625,00
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah		25.831.121.372,00	21.052.070.072	32.601.367.155	39.183.743.579,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		3.857.790.000,00	1.909.355.000	292.000.000	45.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL		139.010.757.118,00	181.964.428.161	118.299.512.355	158.744.965.868,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah		1.274.795.000,00			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		26.731.453.047,00	33.576.048.390	23.927.641.926	19.359.573.157,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		36.998.900.240,00	44.205.687.150	20.483.790.975	96.232.666.145,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan,		67.430.497.249,00	99.245.247.146	67.738.072.944	38.248.067.133,00



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	dan Irigasi					
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		6.575.111.582,00	3.700.899.025	5.995.006.510	4.645.328.433,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya			1.236.546.450	155.000.000	259.331.000,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		3.171.248.230,00	4.839.003.972	1.613.141.895	2.150.745.082,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga		3.171.248.230,00	4.839.003.972	1.613.141.895	2.150.745.082,00
2.4	BELANJA TRANSFER		181.545.953.400,00	172.386.788.800	173.353.540.200	172.237.804.100,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil		1.797.366.400,00	1.532.751.800	2.183.360.200	1.845.021.100,0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		179.748.587.000,00	170.854.037.000	171.170.180.000	170.392.783.000,00
3	PEMBIAYAAN	25.949.639.499	27.600.000.000,00	77.495.084.384	28.255.677.570	4.996.609.380,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.949.639.499	28.600.000.000,00	90.462.469.000	48.174.340.190	24.915.272.000,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	26.949.639.499	28.600.000.000,00	31.850.000.000	48.174.340.190	24.915.272.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			58.612.469.000		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000,00	12.967.384.616	19.918.662.620	19.918.662.620,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			10.967.384.616	17.918.662.620	17.918.662.620,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Daerah Lampung Barat mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp.1.121.507.601.470,03, tahun 2021 berkurang menjadi sebesar Rp.1.036.843.069.935,00, tahun 2022 bertambah menjadi sebesar Rp.1.035.041.046.662, tahun 2023 turun menjadi sebesar Rp.988.918.708.180 dan pada tahun 2024 kembali bertambah menjadi sebesar Rp.1.091.795.802.539.

Pada pos Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.1.147.457.240.969,03, berkurang pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.064.443.069.935,00, bertambah pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.1.112.536.131.046, berkurang pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.017.174.385.750 dan bertambah pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.1.096.792.411.919,00.

3.1.2. Neraca Daerah

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Jumlah Aset tetap	2.635.377.382.764,22	2.646.514.219.523,88	2.843.148.274.683,41	2.918.150.470.168,48
2.	Jumlah Kewajiban	9.978.324.388,96	35.168.309.602,84	76.373.400.825,81	64.280.885.819,15
3	Jumlah Ikuitas	2.625399.058.375,26	2.611.345.909.921,04	2.766.774.873.857,60	2.853.869.584.349,33

3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.3
Analisis Poroporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2021	399.752.460.193,95	1.027.463.108.596,95	38,91%
2	Tahun anggaran 2022	395.256.776.924,00	1.091.056.005.261,05	36,23%
3	Tahun anggaran 2023	413.304.923.702,00	1.003.327.330.633,50	41,19%

3.1.4. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.007.143.618.927,59	1.024.279.168.592,28	985.836.203.764,84
2	Realisasi Belanja Daerah	1.025.317.675.528,95	1.081.589.995.536,05	984.409.205.393,50
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	2.145.433.068,00	9.466.009.725,00	18.918.125.240,00
	Defisit riil	1,98%	6,12%	1,74%

Tabel 5
Kompisipi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya	57.625.748.528,17	56.959.356.108,81	48.174.340.190,04
2	Pencairan dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4	Penerimaan pinjaman daerah	19.653.117.250,00	57.991.820.750,00	
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
6	Penerimaan piutang daerah			

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)		Tahun 2022 (Rp)		Tahun 2023 (Rp)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA						
2	Pelampauan penerimaan PAD	(4.753.765.860,21)		(19.212.935.625,00)		(3.912.811.838,00)	
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(5.038.450.581,79)		(569.534.967,00)		(7.066.121.096,00)	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	67.417.964.970,17		76.741.826.701,00		59.153.273.124,00	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
7	Kegiatan lanjutan						



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data

Tabel 3.7
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2025 s.d 2029
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH		1.144.814.561.472	1.213.503.435.161	1.286.313.641.270	1.363.492.459.747	1.445.302.007.331
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		84.291.300.161	89.348.778.171	94.709.704.861	100.392.287.153	106.415.824.382
1.1.1	Pajak Daerah	6%	29.567.365.165	31.341.407.075	33.221.891.500	35.215.204.990	37.328.117.289
1.1.2	Retribusi Daerah	6%	2.478.846.752	2.627.577.557	2.785.232.211	2.952.346.144	3.129.486.912
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6%	5.993.056.959	6.352.640.377	6.733.798.799	7.137.826.727	7.566.096.331
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6%	46.252.031.285	49.027.153.162	51.968.782.351	55.086.909.293	58.392.123.850
1.2	PENDAPATAN TRANSFER		1.060.523.261.311	1.124.154.656.990	1.191.603.936.409	1.263.100.172.593	1.338.886.182.949
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6%	1.007.447.537.830	1.067.894.390.100	1.131.968.053.506	1.199.886.136.716	1.271.879.304.919
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6%	53.075.723.481	56.260.266.890	59.635.882.903	63.214.035.877	67.006.878.030
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	Pendapatan	1.144.814.561.472	1.213.503.435.161	1.286.313.641.270	1.363.492.459.747	1.445.302.007.331
2	Pencairan dana Cadangan (sesuai perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan					
	Dikurangi :					
4	Belanja Operasi	725.475.952.025,00	725.475.952.025,00	725.475.952.025,00	725.475.952.025,00	725.475.952.025,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	19.918.063.340,00	16.931.719.450,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah adalah masalah yang harus dihadapi oleh suatu wilayah. Permasalahan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor publik untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi saat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah terbagi ke dalam berbagai aspek, sebagai berikut :

Aspek SDM

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
3. Tingkatnya apresiasi terhadap budaya lokal masih rendah
4. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat
5. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah.
7. Kurangnya Prestasi Olah Raga
8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak
9. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
10. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan
11. Pengendalian penduduk belum optimal

Aspek Ekonomi

1. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal
2. Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal
3. Produktivitas pertanian rendah
4. Menurunnya kualitas produksi pertanian
5. Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian
6. Rendahnya peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian
7. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
8. Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan
9. Belum optimalnya daya tarik investasi;
10. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro
11. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasaan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi
12. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal

13. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal (Geopark)
14. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran

Aspek Pemerintahan

1. Belum optimalnya penegakan aturan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen bencana kebakaran.
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, dengan indikasi belum semua aset tanah yang tercatat dalam neraca dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak pakai, dan belum terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur pengelola barang milik daerah.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
5. Belum optimalnya pelayanan publik, akuntabilitas dan RB berbasis elektronik.
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan arsip daerah.
7. Masih rendahnya daya saing daerah.
8. Belum optimalnya manajemen PNS.
9. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal.
10. Belum optimalnya pembangunan di kecamatan dan di pekon.

Aspek Infrastruktur

1. Kondisi kemantapan jalan masih rendah
2. Ketersediaan air baku
3. Cakupan Layanan Sanitasi
4. Rendahnya penggunaan kendaraan umum
5. Belum optimalnya sarpras transportasi dan manajemen lalu lintas.
6. Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi
7. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana
8. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar
9. Belum tertatanya kawasan kumuh
10. Pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pengembangan Kewilayahan

Aspek Lingkungan Hidup

1. Adanya peningkatan alih fungsi lahan
2. Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran
3. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal
4. Perubahan iklim dan Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
5. Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
6. Pengelolaan Persampahan belum optimal
7. Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal

4.2 Isu Strategis Daerah

Fokus ke Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Terdegradasinya budaya lokal akibat pengaruh budaya luar
6. Peningkatan Pemenuhan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat
7. Kurangnya Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
8. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak
9. Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender
10. Ketahanan Pangan dan peningkatan keamanan pangan belum optimal.
11. Pengendalian penduduk belum berjalan secara optimal

Fokus Pembangunan pada Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Menurunnya produksi sektor pertanian dan perkebunan.
2. Rendahnya produksi pada sektor peternakan dan optimalisasi manajemen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Rendahnya produksi perikanan dibandingkan potensi yang tersedia.
4. Produktivitas dan daya saing produk olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih rendah
5. Rendahnya investasi pada setiap sektor unggulan.
6. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasaan kesempatan kerja
7. Digitalisasi ekonomi pada pengelolaan UMKM dan koperasi modern.
8. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal
9. Rendahnya Kompetensi pemasaran dan promosi wisata

Fokus Pembangunan pada Tatacara Pemerintahan yang baik, Akuntabel, Inovatif dan Transparan

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan pekon serta peningkatan kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rendahnya daya inovasi daerah.
4. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan untuk peningkatan tata kelola, transparansi dan pelayanan publik.

5. Penetapan dan Penegasan batas wilayah pemerintahan.

Fokus Pembangunan pada Infrastruktur yang Berkualitas dan penanggulangan kebencanaan

1. Peningkatan jalan mantap
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi air baku
3. Pengendalian pemanfaatan penggunaan air tanah
4. Meningkatkan layanan irigasi dalam kondisi baik
5. Meningkatkan layanan sanitasi layak dan aman
6. Meningkatkan moda transportasi umum
7. Meningkatkan sarana prasarana transportasi
8. Meningkatkan layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara merata.
9. Meningkatkan manajemen mitigas bencana
10. Mewujudkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan
11. Pengentasan Permukiman kumuh terpadu
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan/wilayah Danau, pada daerah aliran sungai, Rawan bencana dan Pemukiman perkotaan
13. Memantapkan pengembangan wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup

Fokus Pembangunan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Penurunan kualitas kawasan lindung
4. Pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi
5. Pemanfaatan potensi Limbah
6. Pencemaran perairan Danau dan Sungai
7. Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Perubahan iklim atau ketahanan iklim
9. Perdagangan Carbon yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10. Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
12. Konflik satwa dengan manusia

BAB V REKOMENDASI

5.1. Permasalahan dan Isu strategis

Perencanaan pembangunan dalam prosesnya hal yang sangat untuk diperhatikan adalah permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di bab IV, beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan prioritas Jangka menengah daerah.

Permasalahan - permasalahan yang perlu dijawab selama periode 5 tahun tersebut meliputi :

5.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia

5.1.1.1. Permasalahan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
3. Tingkatnya apresiasi terhadap budaya lokal masih rendah
4. Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat
5. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah.
7. Kurangnya Prestasi Olah Raga
8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak
9. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
10. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan
11. Pengendalian penduduk belum optimal

5.1.1.2. Isu Strategis

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Terdegradasinya budaya lokal akibat pengaruh budaya luar
6. Peningkatan Pemenuhan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat
7. Kurangnya Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan
8. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak

9. Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender
10. Ketahanan Pangan dan peningkatan keamanan pangan belum optimal.
11. Pengendalian penduduk belum berjalan secara optimal

5.1.2. Aspek Ekonomi

5.1.2.1. Permasalahan

1. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal
2. Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal
3. Produktivitas pertanian rendah
4. Menurunnya kualitas produksi pertanian
5. Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian
6. Rendahnya peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian
7. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian
8. Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat
9. Belum optimalnya daya tarik investasi;
10. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro
11. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi
12. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal

5.1.2.2. Isu Strategis

1. Menurunnya produksi sektor pertanian dan perkebunan.
2. Rendahnya produksi pada sektor peternakan dan optimalisasi manajemen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Rendahnya produksi perikanan dibandingkan potensi yang tersedia.
4. Produktivitas dan daya saing produk olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih rendah
5. Rendahnya investasi pada setiap sektor unggulan.
6. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja
7. Digitalisasi ekonomi pada pengelolaan UMKM dan koperasi modern.
8. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal
9. Rendahnya Kompetensi pemasaran dan promosi wisata

5.1.3. Aspek Pemerintahan

5.1.3.1. Permasalahan

1. Belum optimalnya penegakan aturan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen bencana kebakaran.
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, dengan indikasi belum semua aset tanah yang tercatat dalam neraca dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak pakai, dan belum terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur pengelola barang milik daerah.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
5. Belum optimalnya pelayanan publik, akuntabilitas dan RB berbasis elektronik.
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan arsip daerah.
7. Masih rendahnya daya saing daerah.
8. Belum optimalnya manajemen PNS.
9. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal.
10. Belum optimalnya pembangunan di kecamatan dan di pekon.

5.1.3.2. Isu Strategis

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan pekon serta peningkatan kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rendahnya daya inovasi daerah.
4. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan untuk peningkatan tata kelola, transparansi dan pelayanan publik.
5. Penetapan dan Penegasan batas wilayah pemerintahan.

5.1.4. Aspek Infrastruktur

5.1.4.1. Permasalahan

1. Kondisi kemandapan jalan masih rendah
2. Ketersediaan air baku
3. Cakupan Layanan Sanitasi
4. Rendahnya penggunaan kendaraan umum
5. Belum optimalnya sarpras transportasi dan manajemen lalu lintas.
6. Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi
7. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana
8. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar
9. Belum tertatanya kawasan kumuh
10. Pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pengembangan Kewilayahan

5.1.4.2. Isu Strategis

1. Peningkatan jalan mantap
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi air baku
3. Pengendalian pemanfaatan penggunaan air tanah
4. Meningkatkan layanan irigasi dalam kondisi baik
5. Meningkatkan layanan sanitasi layak dan aman
6. Meningkatkan moda transportasi umum
7. Meningkatkan sarana prasarana transportasi
8. Meningkatkan layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara merata.
9. Meningkatkan manajemen mitigas bencana
12. Mewujudkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan
13. Pengentasan Permukiman kumuh terpadu
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan/wilayah Danau, pada daerah aliran sungai, Rawan bencana dan Pemukiman perkotaan
15. Memantapkan pengembangan wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup

5.1.5. Aspek Lingkungan Hidup

5.1.5.1. Permasalahan

1. Adanya peningkatan alih fungsi lahan
2. Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran
3. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal
4. Perubahan iklim dan Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
5. Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
6. Pengelolaan Persampahan belum optimal
7. Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal

5.1.5.2. Isu Strategis

1. Mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Penurunan kualitas kawasan lindung
4. Pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi
5. Pemanfaatan potensi Limbah
6. Pencemaran perairan Danau dan Sungai
7. Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Perubahan iklim atau ketahanan iklim
9. Perdagangan Carbon yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10. Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
12. Konflik satwa dengan manusia

5.2. Visi, Misi, Arah kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD 2025-2045

5.2.1. Visi dan Misi RPJPD 2025-2045

5.2.1.1. Visi RPJPD 2025-2045

Adapun Visi Kabupaten Lampung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 adalah : **“Kabupaten Lampung Barat yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**

Sejahtera adalah Makmur, sehat jasmani dan rohani, rasa aman dan damai Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Lampung Barat yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lampung Barat

Maju merupakan SDM Unggul, berwawasan kedepan, pelayanan publik yang merata, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah

Berdaya saing, pokok-pokok visi berdaya saing adalah Meningkatkan sumberdaya ekonomi yang unggul secara Komparatif dan kompetitif, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Lampung Barat yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan secara bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riilnya.

Berkelanjutan, berkelanjutan artinya adalah lestari, pengelolaan SDA yang bertanggung jawab, terpeliharanya kekayaan, keragaman jenis dan kekhasan SDA. Berkelanjutan dalam hal ini artinya adalah tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai minimal selalu dipertahankan bahkan harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Lestari juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi lestari adalah terbangunnya sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap; terjaminnya hak-hak warga, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. Sebagai tolok ukur pencapaian Visi RPJPD tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Sasaran dan Indikator Visi

No.	Rantek RPJMD						
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	31,47 - 32,67	35,19 - 39,03	38,85 - 45,27	42,45 - 51,41	46,00 - 57,45
		Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	1.09	1.03	1.03	1.03	1.03
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5.49%	5.99%	6.49%	6.99%	7.49%
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 - 10,5	9,92 - 10,22	9,49 - 9,79	9,06 - 9,36	8,62 - 8,92
		Rasio gini (Indeks)	0.264	0.259	0.253	0.247	0.242
		Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.03%	2.04%	2.05%	2.06%	2.07%
		Persentase Desa Mandiri (%)	50.38%	52.67%	54.96%	57.25%	59.54%
3	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2.58	2.59	2.60	2.61	2.62
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,91 - 72,91	72.83	73.25	73.67	74.10
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (Angka Provinsi)	7.48%	7.65%	7.80%	8.01%	8.16%

Target visi tersebut akan dicapai secara periodik lima tahunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

5.2.1.2. Misi RPJPD 2025-2045

Adapun misi untuk mencapai visi RPJPD 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya.
2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian.
3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai.
4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana.
5. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

5.2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Periode I

Dalam rangka mencapai misi jangka panjang daerah maka sebagai bentuk operasionalisasinya telah disusun Arah Kebijakan tiap periode 5 (lima) tahun. Adapun arah kebijakan setiap misi periode pertama 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- 5.2.2.1. Misi 1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Lampung Barat yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya.

Arah kebijakannya periode I tahun 2025-2029 adalah Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial, serta Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 5.2. Sasaran Pokok Misi 1 Periode 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kualitas kesehatan tinggi	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,09 - 75,09	73,25 - 75,25	73,4 - 75,4	73,56 - 75,56	73,72 - 75,72	76,23 - 78,23
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	38.02	38.01	38	37.9	37.8	36.2
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13	12	11.5	11	10.5	2.5



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	42.73%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	100.00%
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98.65%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Kualitas pendidikan tinggi dan merata	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*						
		i) Literasi Membaca (angka Provinsi)	9,09-11,09				30-40	90 - 100
		ii) Numerasi (angka Provinsi)	0 - 2				20-30	90 - 100
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk						
		i) Literasi Membaca	76.96	84.85	86.37	87.88	89.4	100
		ii) Numerasi	72.73	73.64	75.16	76.67	78.19	80-100
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.5	8,68 - 9,05	8,86 - 9,25	9,04 - 9,45	9,22 -9,65	12,10 - 12,85
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.35	12,73 - 13,54	12,81 - 13,63	12,89 - 13,72	12,97 - 13,81	14,25 - 15,25
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6.5	7.05	7.1	7.15	7.2	8
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan	84.95%	85.50%	86.06%	86.61%	87.17%	96.03%



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)						
3	kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menjadi berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 - 10,5	9,92 - 10,22	9,49 - 9,79	9,06 - 9,36	8,62 - 8,92	1,73 - 2,03
4	Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	20.57	22.57	24.57	26.57	28.57	60.57
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	5.00%	6.25%	7.50%	8.75%	10.00%	30.00%
5	Kehidupan beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (angka Provinsi)	56,15 – 56,16				62,15- 63,99	68,87 - 70,05
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	89.80	89.90	90.00	90.10	90.20	93.40
6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61	61.69	62.38	63.07	63.76	74.8
		Indeks Perlindungan Anak	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	83,92
		Indeks Pembangunan Pemuda	61.8	62.4	62.6	62.8	63	66.7
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.495	0.490	0.485	0.480	0.475	0.395

Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian arah misi tersebut adalah :

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan,
9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

5.2.2.2. Misi 2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian, arah kebijakan periode pertama adalah Pemberdayaan perekonomian mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya alam unggulan pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemenuhan akses digital dan pemanfaatan IPTEK.

Tabel 5.3. Sasaran Pokok Misi 2 Periode 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-							
1	Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5.49%	5.99%	6.49%	6.99%	7.49%	15.49%



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Pariwisata						
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1.35	1.38	1.41	1.44	1.46	2.01
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	0.278	0.291	0.306	0.321	0.337	0.737
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (angka Provinsi)	1,82				1,91-2,30	2,77 - 3,10
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) (angka Provinsi)	11,81				13,39	18,11
		b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	4.21	4.23	4.25	4.27	4.29	5.01
		c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2	2.2	2.4	2.6	2.8	6
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (angka Provinsi)	1,35				2,76	7,00
		e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.198	2.161	1,97 - 2,27	1,93 - 2,23	1,9 - 2,2	1,3 - 1,6
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72.53	73.02	73.51	74	74.49	82.33
		Tingkat						



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penguasaan IPTEK						
		Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)	Sangat Inovatif (63)	Sangat Inovatif (64)	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (67)	Sangat Inovatif (83)
2	Ekonomi hijau yang berkelanjutan	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (angka Provinsi)	59,19				63,06	74,65
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) (angka Provinsi)	36,00				38,50	60,64
3	Transformasi digital yang berkualitas	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5.65	5.7	5.75	5.8	5.85	6.65
4	Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	5,15				4,82	3,83
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	40.69%
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	57.37	57.63	57.89	58.16	58.42	62.63
5	Pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang tinggi	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) (angka Provinsi)	18,35				18,35 - 19,00	21,00 - 22,00
6	Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	94.31	94.42	94.54	94.65	94.76	96.54
		Persentase Desa Mandiri (%)	50.38%	52.67%	54.96%	57.25%	59.54%	80.15%

Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian arah misi tersebut adalah :

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah
3. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
4. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.
5. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
7. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
8. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
9. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
10. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
11. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
12. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
13. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.

14. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
15. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
16. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
17. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
18. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
19. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
20. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
21. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
22. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
23. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
24. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
25. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
26. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
27. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
28. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

29. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
30. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan
31. pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform.
32. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
33. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & pembudidaya ikan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
34. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
35. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
36. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
37. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
38. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
39. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
40. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik

- dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
41. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 42. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama
 43. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara
 44. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah
 45. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
 46. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
 47. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
 48. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 49. Peningkatan produktivitas BUMD.
 50. Pemenuhan pelayanan dasar air minum layak dan berkelanjutan
 51. Meningkatnya infrastruktur layanan air minum yang memadai.
 52. Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum yang layak di Kabupaten Lampung Barat

5.2.2.3. Misi 3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai, arah kebijakannya adalah Transformasi kelembagaan dan birokrasi dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

Tabel 5.4. Sasaran Pokok Misi 3 Periode 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-							
1	Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	94.31	94.42	94.54	94.65	94.76	96.54
		Persentase Desa Mandiri (%)	50.38%	52.67%	54.96%	57.25%	59.54%	80.15%



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*	64 (B)	70 (B)	70 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (BB)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.95	3.05	3.15	3.25	3.35	4.95
		Indeks Pelayanan Publik	2.6	2.65	2.75	2.85	2.95	4.55
		Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	69.7	70	70.35	70.6	71	79,00
3	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah yang terjaga	Tingkat Kriminalitas (Rasio) (angka Provinsi)	122 (2023)				11500.00%	85.00
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80.00%	80.50%	81.00%	81.50%	82.00%	90.00%
		Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	baik
4	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.17%	17.57%	17.74%	17.90%	18.08%	0.21%
		Tingkat Inflasi (%)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * (angka Provinsi)	16,2				25,33	52,7
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%) (angka Provinsi)	0,05				0,06	0,09
		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata	3.076,48				6.444,31	16.547,8



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tahunan* (angka Provinsi)						
		Total Kredit/PDRB (%) (angka Provinsi)	15,0				24	51,0
		Inklusi Keuangan (%) (angka Provinsi)	85,5				88,43	97,2
5	Daya saing daerah tinggi	Efektivitas Kerjasama Daerah (%) (angka Provinsi)	n.a				80	100
		Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) (angka Provinsi)	20				60	100

Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian arah misi tersebut adalah :

1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
2. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
3. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
4. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
5. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
6. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
7. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Lampung, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung yang profesional dan bebas korupsi.
9. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
10. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

11. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
12. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
13. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
14. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
15. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
16. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
17. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
18. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
19. Penguatan integritas partai politik
20. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
21. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan
22. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
23. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

24. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
25. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
26. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
27. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
28. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
29. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
30. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

5.2.2.4. Misi 4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana , arah kebijakan periode 2025-2029 adalah Pemenuhan akses dan kemantapan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar pusat-pusat kawasan strategis, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana.

Tabel 5.5. Sasaran Pokok Misi 4 Periode 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-							
1	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* (angka Provinsi)	680				750	2170
		ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* (angka Provinsi)	161				161	137
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	8.3	8.2	8.08	7.96	7.84	5
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2.45	2.45	2.85	2.85	2.85	3.15
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18.57	18.75	18.94	19.12	19.31	22.38

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Infrastruktur serta kapasitas masyarakat terhadap perlindungan dan evakuasi bencana yang memadai serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	169.55	152.38	150.86	149.35	147.85	111.63
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
		Kumulatif (angka Provinsi)	9,52				9,52	30,69
		Tahunan (angka Provinsi)	15,32				15,32	71,18

Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian arah misi tersebut adalah :

1. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
6. Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
7. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
8. Berkurangnya risiko bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan.

5.2.2.5. Misi 5. kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, arah kebijakan periode 2025-2029 yang merupakan periode pelaksanaan RPJPD 2025-2045 adalah Penyiapan instrumen pengendalian dan revitalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengarusutamaan keanekaragaman hayati serta prinsip-prinsip konservasi.

Tabel 5.6. Sasaran Pokok Misi 5 Periode 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-							
1	Lingkungan Hidup Berkualitas dan luas lahan yang direhabilitasi meningkat serta kualitas perairan sungai dan danau yang meningkat	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (angka Provinsi)	0,537				0,537	0,720
		Indeks kualitas lingkungan hidup	74.64	74.89	75.14	75.39	75.65	79,69
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1.39%	1.91%	2.43%	2.95%	3.47%	11.79%
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	70	75	79	76	73	20



Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target					
			Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* (angka Provinsi)	14,46 (2022)				31.568	100

Arah Kebijakan Transformasi Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian arah misi tersebut adalah :

1. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
2. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
4. Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi
5. Meningkatnya kualitas perairan Danau dan Sungai

5.3. Rangkaian kinerja dan Rangkaian Kerja RPJMD 2025-2029

5.3.1. Rangkaian Kinerja

Rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024;

5.3.1.1. Keselarasan dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045.

Dokumen RPJPD memiliki keterkaitan yang nyata dengan RPJMD untuk itu dalam penyusunan RPJMD harus mengacu dan berpedoman pada RPJPD. Demikian pula RPJPD dapat diimplementasikan dan terwujud antara lain dengan adanya Indikator tujuan dan sasaran sdio setiap misinya dan indikator tersebut dijabarkan ke dalam lima tahunan.

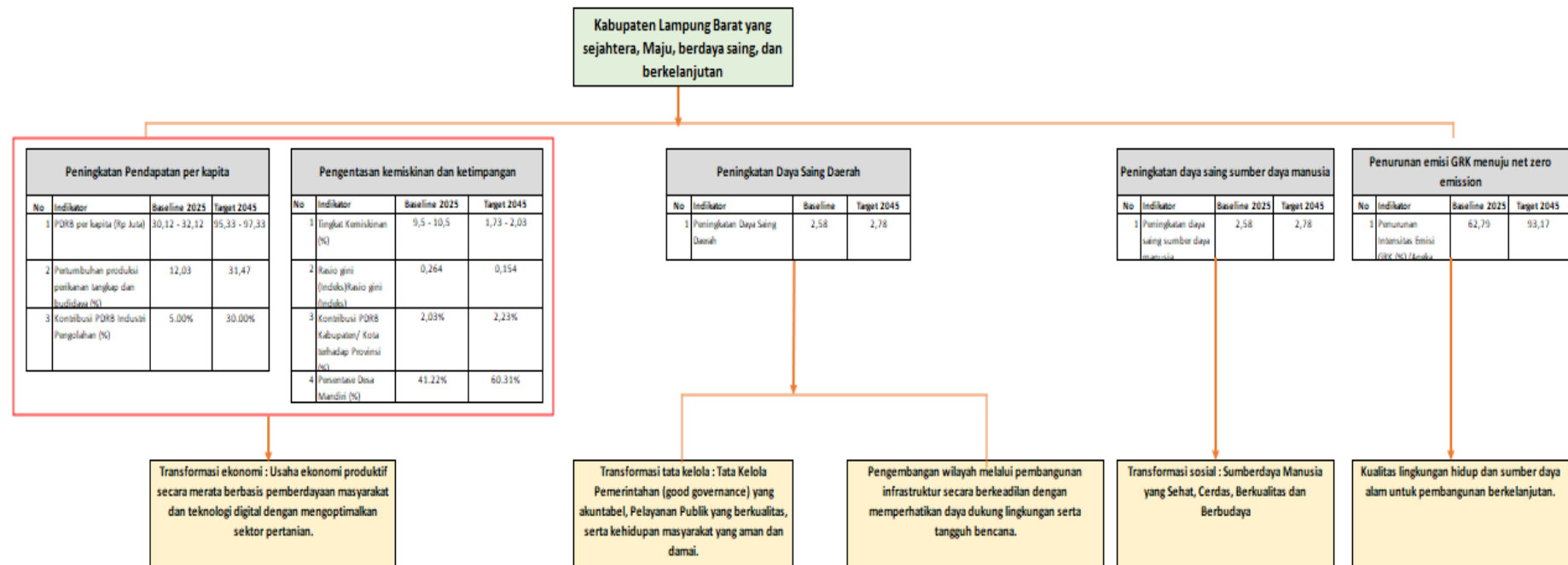
Memedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan menelaraskan sasaran, setrategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah



kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk menjabarkan pelaksanaan dan menjaga keselarasan dan kesinambungan pencapaian kinerja RPJPD 2025-20245 pada periode Pertama melalui RPJMD 2029-2029 mengacu pada Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok serta indikatornya.

Gambar 5.1. Penjabaran Kinerja RPJPD 2025-2045



5.3.1.2. Menentukan Kinerja Strategis RPJMD 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat merupakan Periode pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Teknokratis RPJMD tersebut disusun secara paralel bersamaan dengan penyusunan RPJPD tersebut. Isu strategis yang mendasari penyusunan RPJPD dan RPJMD tersebut antara lain masih tingginya angka kemiskinan, Pengangguran terbuka dan rendahnya Pendapatan Perkapita. Hal tersebut menjadi tantangan yang strategis dimana jika tidak diselesaikan dapat menghambat upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dimana Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyusunan dokumen tersebut juga harus diselaraskan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi serta RPJMD Provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dan hasil penyelarasan dapat ditetapkan sebagai outcome/kinerja strategis (Ultimate Outcome) RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 adalah harus selaras dan terkait dengan visi RPJPD 2025-2045 yang antara lain mengandung unsur-unsur sebagai pokok-pokok visi yaitu "sejahtera, Maju, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan indikator kinerja : 1. Meningkatnya Pendapatan Perkapita 2. Menurunnya Angka Kemiskinan 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk menjabarkan kinerja strategis sebagai ultimate outcome pemerintah daerah dalam jangka menengah tersebut maka perlu dilakukan dengan misi-misi.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis serta tinjauan dokumen RPJPD 2025-2045 yaitu visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok maka misi RPJMD 2025-2045 harus mengakomodir hal-hal prioritas sebagai berikut :

1. Upaya untuk meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi dan daya saing daerah.
3. Upaya untuk membangun dan mengimplementasikan tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan.
4. Membangun dan mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas, merata dan berkeadilan
5. Memperhatikan dan mewujudkan daerah yang tangguh bencana
6. Memperhatikan isu lingkungan hidup antara lain dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sedangkan untuk mencapai misi tersebut maka beberapa tujuan yang perlu dilakukan antara lain adalah :

1. Dengan upaya mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan tolok ukur untuk mencapainya adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas Kesehatan dengan indikator antara lain :
 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
 2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 4. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)
 5. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
 - b. Meningkatkan kualitas Pendidikan dengan indikator :
 1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*
 - i) Literasi Membaca (angka Provinsi)
 - ii) Numerasi (angka Provinsi)
 2. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk
 - i) Literasi Membaca
 - ii) Numerasi
 3. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
 - i) Harapan Lama Sekolah (tahun)
 - ii) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*
 - iii) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%).
 - c. Mengurangi kemiskinan dengan indikator :
 - Tingkat Kemiskinan (%)
 - d. Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat dengan indikator :
 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)
 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)
 - e. Kehidupan beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dengan indikator :
 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (angka Provinsi)
 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
 - f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan indikator :
 1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
 2. Indeks Perlindungan Anak
 3. Indeks Pembangunan Pemuda

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan tolok ukur untuk mencapainya adalah :
 - a. Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
 1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
 2. Pengembangan Pariwisata
 3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
 4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*
 5. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (angka Provinsi)
 6. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
 - i. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) (angka Provinsi)
 - ii. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
 - iii. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
 - iv. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (angka Provinsi)
 - v. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*
 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
 9. Tingkat penguasaan IPTEK
 10. Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)
 - b. Transformasi digital yang berkualitas, dengan indikator : Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi
 - c. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, indikator :
 1. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
 - d. Pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang tinggi, indikator : Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) (angka Provinsi)
 - e. Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai dengan indikator :
 1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
 2. Persentase Desa Mandiri (%)
 - f. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif, indikator :
 1. Indeks Reformasi Hukum*

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 3. Indeks Pelayanan Publik
 4. Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)
 5. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan tolok ukur untuk mencapainya adalah :
- a. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah yang terjaga, inikator :
 1. Tingkat Kriminalitas (Rasio) (angka Provinsi)
 2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
 3. Indeks Demokrasi Indonesia
 - b. Stabilitas Ekonomi Makro
 1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
 2. Tingkat Inflasi (%)
 3. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * (angka Provinsi)
 4. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) (angka Provinsi)
 5. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan* (angka Provinsi)
 6. Total Kredit/PDRB (%) (angka Provinsi)
 7. Inklusi Keuangan (%) (angka Provinsi)
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai, indikator :
- a. Efektivitas Kerjasama Daerah (%) (angka Provinsi)
 - b. Persentase Penurunan Konflik Sosial (%) (angka Provinsi)
 - c. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, dengan indikator :
 1. Indeks Layanan Infrastruktur Daerah
 2. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* (angka Provinsi)
 3. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* (angka Provinsi)
 4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
 5. Kapasitas Air Baku (m3/detik)*
 6. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
5. Meningkatnya Daya Tanggap Masyarakat terhadap bencana, dengan tolok ukur untuk mencapainya adalah :
- a. Indeks Risiko Bencana (IRB)*
 - b. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
 - c. Kumulatif (angka Provinsi)
 - d. Tahunan (angka Provinsi)

6. Menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari dengan tolok ukur untuk mencapainya adalah :
 - a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (angka Provinsi)
 - b. Indeks kualitas lingkungan hidup
 - c. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
 - d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
 - e. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* (angka Provinsi)

5.3.2. Rangkaian Kerja

Rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Rangkaian kerja tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan misi sampai dengan program prioritas/unggulan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024.

Rangkaian Kerja disusun berdasarkan penjabaran kinerja strategis yang telah disusun sampai dengan kinerja taktikal dan operasional.

5.3.2.1. Aspek Kesehatan :

Dalam aspek kesehatan, kinerja Strategis sebagaimana digambarkan di RPJPD yang harus di jabarkan dalam RPJMD adalah upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan,
9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.

5.3.2.2. Bidang Pendidikan :

Dalam aspek pendidikan, kinerja strategis sebagaimana digambarkan di RPJPD yang harus dijabarkan dalam RPJMD adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang merata yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
7. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
8. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

10. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
11. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
12. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
13. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
14. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
15. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
16. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
17. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama

5.3.2.3. Bidang Sosial :

Rangkaian kerja pada aspek sosial adalah fokus kepada penurunan angka kemiskinan dan penanganan masalah penyandang sosial dalam rangka mewujudkan kinerja strategis meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
3. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi
4. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
5. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan

sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah

6. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah
7. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan
8. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5.3.2.4. Bidang Ketertiban umum dan budaya :

Rangkaian kinerja dalam rangka mencapai kinerja strategis meningkatkan dan melastarikan nilai-nilai budaya serta meningkatkan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

5.3.2.5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, kesetaraan gender :

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

5.3.2.6. Bidang Ekonomi :

Pembangunan ekonomi sangat perlu memperhatikan potensi-potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah untuk itu perlu dilakukan upaya mencapai kinerja strategis dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita dengan rangkaian kinerja sebagai berikut :

1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah
3. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
4. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.
5. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis
7. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa..
8. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
9. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
10. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
11. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
12. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
13. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
14. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke

- sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
15. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
 16. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
 17. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
 18. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
 19. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
 20. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
 21. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
 22. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
 23. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
 24. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
 25. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
 26. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
 27. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian

28. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
29. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
30. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan
31. Pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
32. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
33. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & pembudidaya ikan, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
34. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
35. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
36. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
37. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
38. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian,

- fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
39. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
 40. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
 41. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 42. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama
 43. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara
 44. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah
 45. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
 46. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
 47. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
 48. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 49. Peningkatan produktivitas BUMD.
 50. Pemenuhan pelayanan dasar air minum layak dan berkelanjutan
 51. Meningkatnya infrastruktur layanan air minum yang memadai.
 52. Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum yang layak di Kabupaten Lampung Barat

5.3.2.7. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Tatakelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya mencapai prioritas daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Kinerja strategis yang perlu dicapai adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akan dicapai melalui rangkaian kerja sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
2. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
3. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
4. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
5. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
6. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
7. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Lampung, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung yang profesional dan bebas korupsi.
9. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
10. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
11. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
12. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
13. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
14. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik

di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.

15. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
16. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
17. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
18. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
19. Penguatan integritas partai politik
20. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
21. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan
22. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
23. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
24. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
25. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
26. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten.
27. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
28. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
29. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
30. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

5.3.2.8. Bidang Infrastruktur :

Kinerja strategis bidang infrastruktur yang perlu capai dalam periode menengah 5 (lima) tahunan adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur yang berkualitas serta menjangkau di seluruh wilayah daerah dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, untuk itu rangkaian kerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
2. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

5.3.2.9. Bidang Kebencanaan :

Lampung Barat memiliki resiko bencana yang cukup tinggi untuk itu agar menjadi fokus dan menjadi kinerja strategis dalam perencanaan menengah daerah antara lain dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana, yang akan dicapai melalui rangkaian kerja sebagai berikut :

1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi

masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

2. Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
3. Berkurangnya risiko bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan.
4. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.

5.3.2.10. Bidang Lingkungan Hidup :

Isu lingkungan hidup baik regional maupun internasional saat ini menjadi perhatian pemerintah karena sudah banyak terjadi degradasi lingkungan, pencemaran, alih fungsi lahan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan emisi gas karbon, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya konservasi salah satunya adalah dengan meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Rangkaian kerja untuk mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
3. Meningkatkan luas lahan yang direhabilitasi
4. Meningkatkan kualitas perairan Danau dan Sungai

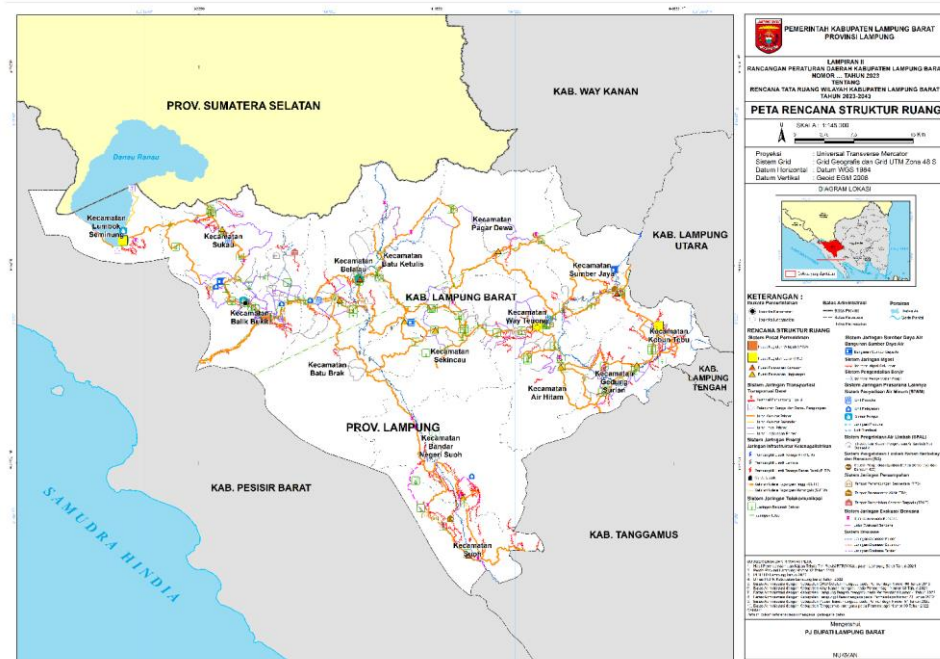
5.4. Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW.

Berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 (dua) Koridor yaitu:

1. Koridor pertumbuhan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang terdiri dari 7 kabupaten yaitu: Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, dan Kab. Lampung Timur. Melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota - desa pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan.
2. Koridor pemerataan bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar yang lebih merata yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu : Kab. Lampung Utara, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab.

Lampung Barat, dan Kab. Pesisir Barat. Melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Gambar 5.2.
Rencana Struktur Ruang



Sumber : Perda No 5 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.

Kabupaten Lampung Barat masuk kedalam Koridor pemerataan dengan wilayah pusat pertumbuhan III (Koridor Barat) dengan arah perkembangan wilayah sebagai berikut :

- Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Danau Ranau
- Perwujudan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 3 Kabupaten WP III dan Suaka margasatwa Gunung Raya Lampung Barat.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata KSPN Danau Ranau
- Kawasan Strategis Geo-Park Suoh

Perwujudan perkembangan wilayah diatas menunjukan bahwa adanya kepentingan Nasional dan provinsi di Wilayah Kabupaten Lampung Barat. Selain Kepentingan Nasional dan Provinsi, kabupaten lampung Barat juga memiliki wilayah pusat pertumbuhan dan Kawasan Strategis Yaitu:

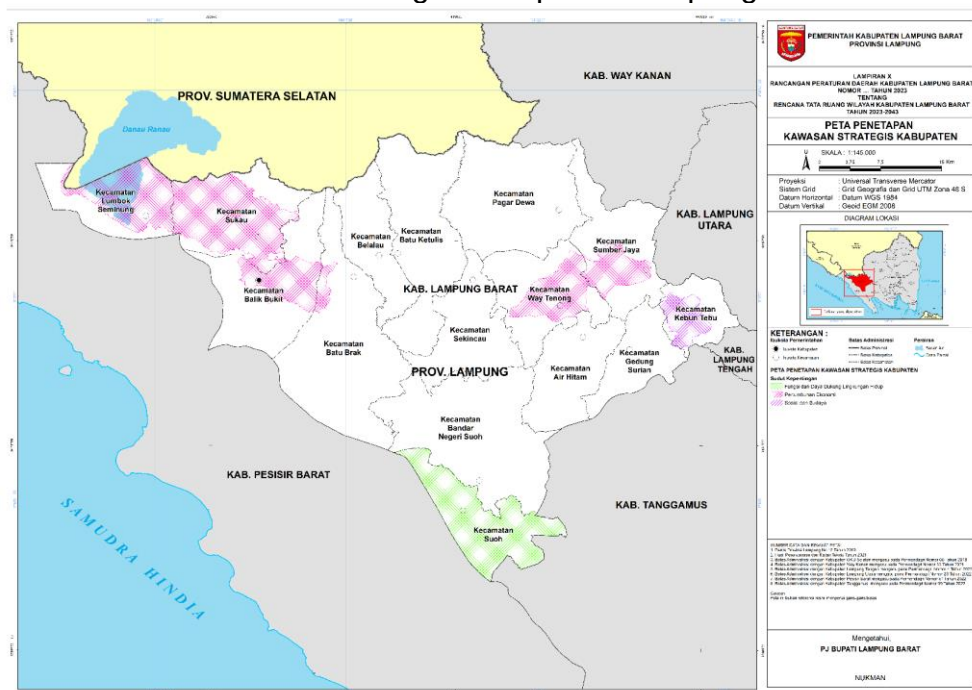
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Perwujudan PKW Kota Liwa dilakukan meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Liwa.

2. Kawasan Strategis.

Berdasarkan Perda No.5 tahun 2023 tentang RTRWK Lampung Barat tahun 2023-2043, Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari:
 - Kawasan Agropolitan Way Tenong dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kelurahan Fajar Bulan
 - Kawasan Agroteknopark di Kecamatan Sumber Jaya dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Kelurahan Tugusari
- b. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup terdiri dari
 - Kawasan Geopark dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Sumber Agung
 - Kebun Raya Liwa, berada di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kota Liwa
- c. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
 - Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud berupa cagar budaya dengan Pusat Kegiatan Lokal berada di Purajaya Kecamatan Kebun Tebu.

Gambar 5.3.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Lampung



Sumber : Perda No 5 tahun 2023 tentang RTRWK Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.



BAB VI PENUTUP

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 diharapkan bisa menjadi salah satu acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah agar dapat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan Masyarakat secara luas.